

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M.Ag.

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Pengantar

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.



Penerbit CV Pustaka Setia
Bandung

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

ISBN 978-979-076-604-4

Cet. I: April 2016, 16 × 24 cm, xvi + 248 halaman

Penulis: **Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M.Ag.**

Kata Pengantar: **Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cetakan ke-1: April 2016

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp.: (022) 5210588, Faks.: (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.com

Bandung 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copyright © 2016 **CV PUSTAKA SETIA**

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

KATA PENGANTAR

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Modal terbesar dalam pembangunan adalah masyarakat atau penduduk.

Oleh karena itu, penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Demikian pula, keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dapat berdampingan dengan bangsa lain, dan mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya terencana untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk adalah perkembangan penduduk

dan pembangunan. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa. Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas masyarakat sejak usia dini dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangannya.

Dalam perspektif sosiologis, prioritas pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan sebagai upaya pemberantasan angka kemiskinan. Pembangunan dilaksanakan atas dasar aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik, dengan visi dan misi kepemimpinan yang kondusif yang memiliki visi prospektif jauh ke depan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi para pemimpin dituangkan dalam rencana pembangunan nasional.

Ada tiga indikator keberhasilan pembangunan masyarakat, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan dikatakan berhasil apabila produktivitas masyarakat meningkat disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Tingkat efisiensi dapat dicapai dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sedikit uraian penulis yang saya utarakan tersebut menjadi pendorong positif bagi para pembaca untuk semua kalangan, yakni mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum ataupun para pakar

sosiologi untuk menggali lebih mendalam isi buku ini agar memperoleh masukan yang komprehensif mengenai sosiologi pembangunan. Hal ini dikarenakan sesungguhnya, pembangunan tidak selamanya berdampak positif untuk masyarakat, ada juga pembangunan yang menimbulkan dampak negatif untuk kehidupan sosial. Salah satunya adalah pembangunan berbagai *mall* di wilayah pedesaan yang dapat menimbulkan efek negatif, seperti kemacetan lalu lintas, kecemburuan sosial, dan meningkatkan kriminalitas. Selain itu, berkurangnya lahan tanah yang menjadi serapan air akibat banyaknya gedung apartemen, kontrakan mahasiswa, perumahan, dan sebagainya yang tumbuh semakin cepat karena dorongan ekonomi masyarakat dengan adanya industrialisasi.

Kajian sosiologi pembangunan juga dianalisis dengan pelbagai teori pembangunan, di antaranya teori tradisionalisme, teori modernisasi, dan teori yang dikembangkan oleh Max Weber yang disajikan secara lengkap dan mendalam. Oleh karena itu, saya menyambut baik kehadiran buku ini sebagai literatur mahasiswa dan masyarakat umum dalam mengkaji pembangunan perspektif sosiologis atau sosiologi pembangunan.

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim,

Atas nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis memanjatkan puji dan syukur tiada terhingga. Berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku *Sosiologi Pembangunan*. Buku ini disusun berdasarkan silabus sehingga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya, dan tidak menutup kemungkinan untuk perguruan tinggi lainnya.

Studi pembangunan adalah studi multidisiplin (ekonomi, politik, sosiologi, psikologi, budaya, sejarah, dan lain-lain) dengan fokus perhatian pada negara-negara berkembang dan interaksi negara berkembang dengan negara maju dan di antara negara berkembang itu sendiri. Sejak akhir tahun 1940-an, pembangunan telah menjadi perhatian bagi penelitian akademik dan pengajaran yang penting, terutama di negara-negara yang baru merdeka (*post colonial states*). Sejak saat itu, istilah pembangunan diasosiasikan dengan kondisi dan situasi ekonomi, politik, dan perubahan sosial di negara-negara baru merdeka.

Perkembangan studi pembangunan pada masa kini menjadi lebih relevan karena semakin kompleksnya permasalahan pembangunan, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara

maju. Permasalahan pembangunan yang paling umum dihadapi setiap negara adalah tentang *kemiskinan, kesenjangan, lingkungan, dan ketidakadilan (injustice)* yang masih terus terjadi. Adapun studi pembangunan bertugas menjembatani kesenjangan dan ketidakadilan, serta merumuskan model pembangunan yang berpihak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, muncullah berbagai teori pembangunan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dunia, terutama pembangunan di negara ketiga atau negara berkembang.

Pembangunan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia, dimulai pada tahun 1970-an. Isu yang diangkat adalah membangun ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera. Pada umumnya pemikiran tentang pembangunan di negara-negara belum berkembang (*underdevelopment*) selalu meletakkan persoalan-persoalan di atas sebagai isu sentralnya.

Buku yang ada di hadapan Anda mengulas persoalan tersebut. Buku ini disajikan secara sederhana, dikupas dengan lengkap dan menarik, yang diawali dari pengertian pembangunan hingga teori-teori klasik ataupun modern yang berkembang seputar pembangunan. Sekalipun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada Dr. Beni A. Saebani, M.Si. yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca semua sangat penulis nantikan agar buku ini dapat menjadi karya terbaik. *Simplex Veri Siggillum*, kesederhanaan adalah tanda kebenaran. Semoga apa yang penulis suguhkan dalam buku yang sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M.Ag.

DAFTAR ISI

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

PEMBANGUNAN	1
A. Sosiologi dan Pembangunan.....	1
B. Makna Pembangunan	5
C. Ruang Lingkup Pembangunan	10
1. Pembangunan di Bidang Ekonomi	10
2. Pembangunan di Bidang Politik.....	13
3. Pembangunan di Bidang Sosial.....	15
4. Pembangunan di Bidang Pendidikan	17
5. Pembangunan di Bidang Keagamaan.....	17
6. Pembangunan di Bidang Lingkungan	19
D. Reorientasi Paradigma, Arah, dan Tujuan Pembangunan.....	20
E. Paradigma <i>People Centered Development</i> dalam Pembangunan.....	21
F. Tiga Komponen dalam Pembangunan.....	23
G. Mengukur Pembangunan.....	25
1. Kekayaan Rata-rata	25
2. Pemerataan.....	26

BAB 2

PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Peran Pemerintah dalam Pembangunan.....	28
C. Peran Masyarakat sebagai Pelaku dalam Pembangunan.....	37

BAB 3

TEORI MODERNISASI.....

39	
A. Pendahuluan.....	39
B. Makna Teori Modernisasi	40
C. Lahirnya Teori Modernisasi.....	42
D. Teori Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi	45
E. Max Weber: Etika Protestan.....	47
F. David McClelland: Dorongan Berprestasi atau <i>n-Ach</i>	50
G. W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan.....	51
1. Latar Belakang Teori	51
2. Urutan Mengenai Teori Pembangunan Rostow.....	52
H. Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non-Ekonomi	56
1. Pemasokan Modal Besar dan Perbankan	56
2. Pemasokan Tenaga Ahli dan Terampil.....	57
I. Alex Inkeles dan David H. Smith: Manusia Modern.....	57

BAB 4

TEORI KETERGANTUNGAN (*DEPENDENCY THEORY*)

65	
A. Pendahuluan.....	65
B. Sejarah Teori Ketergantungan	66
C. Negara Dunia Ketiga	73
D. Pembangunan di Negara Sedang Berkembang (Dunia Ketiga).....	76
E. Inti Teori Ketergantungan.....	81
F. Akibat Ketergantungan	85
G. Kritik terhadap Teori Ketergantungan	90

BAB 5

TEORI PASCA-KETERGANTUNGAN.....	93
A. Teori Sistem Dunia (<i>World System Theory</i>).....	93
1. Pendahuluan	93
2. Dari Dependensi Menuju Sistem Dunia	94
3. Immanuel Wallerstein: Teori Sistem Dunia	97
4. Teori Pusat dan Pinggiran	98
5. Kritik terhadap Teori Sistem Dunia.....	101
B. Teori Pembangunan Alternatif: <i>Post Colonialism, Post Structural, dan Post Developmentalism</i>	101
1. Teori Poskolonial (<i>Post Colonial</i>)	101
2. Teori Pos-Struktural (<i>Post Structural</i>)	103
3. Teori <i>Post Developmentalism</i>	104
C. Teori-teori dan Praktik Pembangunan Kontemporer: MDG's, Neoliberalisme, dan Feminisme	106
1. Teori <i>Millenium Development Goals</i> (MDG's)	106
2. Teori Neoliberalisme	108
3. Teori Feminisme	114

BAB 6

TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (<i>SUISTAINABLE DEVELOPMENT THEORY</i>).....	117
A. Pendahuluan.....	117
B. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (<i>Suistainable Development</i>)	118
C. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan	121
D. Strategi Pembangunan Berkelanjutan	122
E. Indikator Pembangunan Berkelanjutan	124
F. Ruang Lingkup Pembangunan Berkelanjutan.....	126
1. Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	126
2. Pengembangan Tata Ruang	127
3. Penetapan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah	128

4.	Penetapan PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	129
5.	Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan yang Berwawasan Lingkungan	130
6.	Pendekatan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.....	132
7.	Lingkungan dan Pembangunan	133
8.	Isu-isu Pembangunan yang Berhubungan dengan Pembangunan Berkelanjutan dari Segi Positif dan Negatif	134
9.	Beberapa Isu Utama Pengembangan Wilayah di Negara yang Sedang Berkembang	134

BAB 7

	TEORI PEMBANGUNAN MANUSIA.....	139
A.	Pengertian Pembangunan Manusia.....	139
B.	Arah Pengembangan Konsep Pembangunan Manusia ..	143
C.	Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>).....	144
1.	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	144
2.	Tujuan Pemberdayaan.....	146
3.	Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan	148
4.	Aktor Pemberdayaan Masyarakat.....	149
D.	Kerja Sama (<i>Cooperation</i>).....	151
E.	Kesetaraan (<i>Equity</i>)	152

BAB 8

	INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN.....	155
A.	Pengertian Industrialisasi	155
B.	Konsep dan Tujuan Industrialisasi.....	157
C.	Faktor Pendorong Industrialisasi	158
D.	Industrialisasi: sebagai Pembangunan Ekonomi	160
E.	Industrialisasi di Indonesia.....	162
F.	Globalisasi dan Strategi Industrialisasi	164
G.	Hubungan Industrialisasi dengan Lingkungan	168
H.	Hubungan Pembangunan dengan Lingkungan	169
I.	Dampak Industrialisasi	169

BAB 9	
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN	171
A. Pendahuluan.....	171
B. Pentingnya Memahami Kependudukan dalam Pembangunan.....	173
C. Hubungan Kependudukan dan Pembangunan.....	179
D. Masalah Kependudukan.....	181
E. Pembangunan Berwawasan Kependudukan.....	184
BAB 10	
DINAMIKA PEMBANGUNAN DI INDONESIA.....	187
A. Pendahuluan.....	187
B. Pola Dasar Pembangunan Nasional	189
C. Faktor Pendukung Pembangunan Nasional.....	190
D. Faktor Penghambat Pembangunan Nasional	191
E. Pembangunan Masa Pra-Kolonial dan Kolonial	193
1. Kondisi Pemerintahan.....	193
2. Pembangunan Masa Pra-Kolonial dan Kolonial....	195
3. Pendudukan Jepang (1942-1945)	195
F. Pembangunan Masa Kemerdekaan (Orde Lama)	196
1. Kondisi Pemerintahan.....	196
2. Pembangunan Masa Kemerdekaan (Orde Lama)..	196
G. Pembangunan Masa Orde Baru	199
1. Kondisi Pemerintahan.....	199
2. Pembangunan Era Orde Baru.....	202
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru	204
H. Pembangunan Era Reformasi.....	205
1. Kondisi Pemerintahan.....	205
2. Pembangunan Era Reformasi	206
BAB 11	
ALTERNATIF MODEL PEMBANGUNAN	211
A. Pendahuluan.....	211
B. Berbagai Alternatif Model Pembangunan	212

1.	Model Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat.....	212
2.	Model Pembangunan yang Relevan	214
C.	Mencari Suatu Ideal Model Pembangunan	217
D.	Pembangunan Politik: Masyarakat dan Pemerintah	218
1.	Pembangunan Politik Masyarakat	218
2.	Pembangunan Politik Pemerintahan	219
E.	Model Pembangunan Spontan.....	219
1.	Model Kapitalisme	220
2.	Model Sosialisme	220
F.	Model Pembangunan yang Dominan dalam Perspektif Sejarah.....	222
1.	Pembangunan yang Terpusat pada Pertumbuhan atau Produksi.....	222
2.	Pembangunan Berwawasan Pemerataan.....	222
	DAFTAR PUSTAKA	223
	LAMPIRAN.....	233
	BIOGRAFI PENULIS	247

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN

A. Sosiologi dan Pembangunan

Soerjono Soekanto (2004: 412-413) menjelaskan bahwa ilmu atau pengetahuan sosiologi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahapan perencanaan, pencarian, penerapan, dan penilaian proses pembangunan. Pada tahap perencanaan, hasil penelitian sosiologi dapat digunakan sebagai bahan pada tahap evaluasi. Adapun pada tahap penerapan, ilmu sosiologi dapat digunakan sebagai identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang dapat melancarkan pembangunan dan yang menghambat pembangunan.

Hingga saat ini, konsep pembangunan telah menjadi ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan sangat berhubungan dengan sosiologi pembangunan.

Pembangunan dalam sosiologi adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, sedangkan masyarakat merupakan tenaga pembangunan dan dampak pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat adalah subjek sekaligus objek dalam

pembangunan. Mengapa? Sebab, pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tenteram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dalam konteks ke-Indonesia-an, harapan tersebut diwujudkan dengan kata “adil” dan “makmur”. Dalam konteks ini, tentu saja setiap pembangunan menghendaki adanya perubahan dan perubahan merupakan proses dan usaha yang diarahkan dengan maksud mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian, proses atau usaha pembangunan memiliki arti humanisasi, yaitu memanusiaikan manusia atau masyarakat (Arbi Sanit, 1987: 112).

Sosiologi pembangunan berkembang pesat sejak awal 1960-an. Sebagai bagian dari ilmu sosiologi, sosiologi pembangunan sangat dipengaruhi oleh pokok-pokok pikiran ahli sosiologi klasik, seperti Marx, Weber, dan Durkheim. Dalam perkembangannya, sosiologi pembangunan semakin pesat seiring dengan gagalnya program pembangunan yang disponsori oleh Amerika Serikat pada negara-negara dunia ketiga. Kegagalan tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya besar bagi peneliti sosial untuk mengungkap faktor-faktor penyebabnya.

Pada perkembangan selanjutnya, sosiologi pembangunan membawa dampak pada lahirnya dimensi-dimensi baru dalam konsep pembangunan. Webster menyebutkan lima dimensi yang perlu diungkap dalam sosiologi pembangunan, antara lain: (1) posisi negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonominya dengan negara-negara lain; (2) ciri khas atau karakter dari suatu masyarakat yang memengaruhi pembangunan; (3) hubungan antara proses budaya dan ekonomi yang memengaruhi pembangunan; (4) aspek sejarah dalam proses pembangunan atau perubahan sosial yang terjadi; (5) penerapan berbagai teori perubahan sosial yang memengaruhi kebijakan pembangunan nasional pada negara-negara berkembang.

Sosiologi pembangunan juga menimbulkan hubungan interaksi pada masyarakat dan interaksi tersebut menimbulkan adanya gotong royong. Aktivitas gotong royong dalam berbagai dimensi memberikan implikasi semangat dan nilai (*value*) untuk saling memberikan jaminan atas hak dan kelangsungan hidup antar-sesama warga masyarakat yang masih melekat cukup kuat.

Secara sosiologis, fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada golongan elite, tetapi juga secara menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah. Dengan kata lain, pembangunan dalam arti kata sosiologi ditujukan pada pemberantasan terhadap angka kemiskinan. Kepekaan dan kemajuan pemikiran sosiologi inilah yang menjadikan pengetahuan sosiologi diterapkan dalam pembangunan. Selain itu, prosedur penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam sosiologi merupakan pemikiran gabungan yang paling maju sehingga metode ini sering digunakan untuk menuntun proses pembangunan dapat lebih objektif dan efisien.

Menurut Soerjono Soekanto (2004: 412-413), manfaat sosiologi bagi pembangunan dapat diidentifikasi melalui beberapa tahap berikut.

1. Tahap Perencanaan

Sebelum pembangunan dilaksanakan, pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Selain menyerap aspirasi tersebut, pemerintah juga harus memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi pemerintah inilah yang kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan nasional. Lembaga yang bertugas membuat rencana pembangunan adalah Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada lembaga ini banyak ahli sosiologi berkumpul dan menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan sosiologinya untuk membuat rencana pembangunan yang baik. Mereka bekerja sama dengan para ahli dari berbagai bidang sehingga rencana yang dibuat bersifat menyeluruh. Di lembaga Bappenas inilah pengetahuan sosiologi benar-benar diaplikasikan dalam proses pembangunan. Bappenas membuat rencana pembangunan secara nasional, meliputi rencana jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (lima tahun), dan jangka panjang (25 tahun).

Pada pemerintah Orde Lama program pembangunan yang dijalankan adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956 hingga 1961), yang dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Semesta (1961 hingga 1968).

Pada pemerintah Orde Baru, pembangunan dirancang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP) dengan periode 25 tahun; kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan periode lima tahun (repelita); Rencana Jangka Pendek Tahunan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Tahap-tahap pembangunan selama pemerintahan Orde Baru, yaitu: (a) Pelita I (1969-1974), (b) Pelita II (1974-1976), (c) Pelita III (1979-1984), (d) Pelita IV (1984-1989), dan (e) Pelita V (1989-1994).

Sementara itu, rencana pembangunan pada masa Reformasi (1999-2004) dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Dalam Propenas termuat sembilan sektor kehidupan masyarakat yang direncanakan untuk dibangun, yaitu politik, pertahanan dan keamanan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, kelautan, dan industri.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Segala sesuatu yang tertuang dalam rencana harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pemerintahan berperan sebagai agen pembangunan (pelopor), tetapi dukungan dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan rencana harus diperhatikan. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto (2004: 408-409), pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan tiga cara berikut.

- a. Secara struktural, yaitu membangun lembaga-lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga inilah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat.
- b. Secara spiritual, yaitu membangun watak dan kepribadian melalui pendidikan. Watak yang dibangun didasari oleh kemampuan berpikir logis dalam menghadapi kenyataan sosial.
- c. Gabungan dua cara sebelumnya (struktural dan spiritual).

3. Tahap Evaluasi

Untuk mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum, dilakukan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan

analisis terhadap akibat perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil pembangunan. Dengan evaluasi, dapat diketahui dan diidentifikasi aspek-aspek yang kurang, macet, mundur, dan merosot. Selanjutnya, dilakukan upaya perbaikan. Evaluasi juga memberikan informasi mengenai keberhasilan-keberhasilan pembangunan.

Ketiga tahap pembangunan tersebut mutlak membutuhkan dukungan pengetahuan sosiologi. Tahap perencanaan membutuhkan pengetahuan sosiologi karena sebuah rencana yang baik harus didasari dengan data dan fakta sosial yang akurat. Data yang dibutuhkan untuk membuat rencana yang baik, meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, dan stratifikasi sosial.

Ada tiga indikator keberhasilan usaha pembangunan masyarakat, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Usaha pembangunan dikatakan berhasil apabila produktivitas masyarakat meningkat. Peningkatan itu harus disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan, dan efisiensi dapat dicapai dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun partisipasi masyarakat menjamin kesinambungan pelaksanaan usaha pembangunan.

B. Makna Pembangunan

Pembangunan adalah proses yang historikal (Gunawan Sumodiningrat, dkk., 2005: 1). Sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti.

Perubahan ke arah perbaikan memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari.

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik

dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa.

Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europeanization*, bahkan terma *political change*. Identifikasi tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable* sehingga istilah tersebut sering disamakan dengan beberapa terma lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004: 23). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.

Secara teoretis, pembangunan dapat dijelaskan dalam dua paradigma, yaitu teori modernisasi dan imperialisme (Elly M. Setyadi, 2011: 677-678).

1. Teori Modernisasi

Teori ini mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi. Rwalt Rostow dalam teori ekonominya menyatakan pembangunan lebih ditekankan pada tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stages of economic growth*). Berbeda dengan pandangan ekonomi, dalam pandangan sosiologi, pembangunan lebih ditekankan pada perubahan besar pada sektor nonekonomi yang menyangkut perubahan yang mengandung berbagai macam perbedaan. Perbedaan dalam konsep pemikiran ini adalah perbedaan watak atau karakter antara bangsa di negara maju dan negara sedang berkembang. Dengan demikian, pembangunan dapat dijelaskan pada perubahan karakter atau mentalitas bangsa untuk mengambil sampel dari negara-negara industri maju ini. Akan tetapi, apakah negara berkembang dapat dipaksakan untuk meniru negara

industri maju dengan perbedaan kultural di antara keduanya. Selain itu, jika pembangunan lebih dititikberatkan pada persoalan antara pertumbuhan tahapan ekonomi dan watak atau karakter antarbangsa, sehingga timbul skala prioritas, manakah yang hendak didahulukan antara membangun karakter dan pertumbuhan ekonomi?

2. *Teori Imperialisme*

Teori imperialisme yang berpijak pada konsep pemikiran Marxis lebih berasumsi bahwa kekayaan milik negara Barat adalah hasil dari pencurian. Neo-Marxisme berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang erat sekali dengan faktor historis, yaitu eksploitasi, pemerasan, dan penjajahan. Ini merupakan kenyataan dalam sejarah karena kemiskinan negara-negara berkembang memang disebabkan faktor-faktor yang bersifat struktural. Dengan kata lain, kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan sengaja diciptakan oleh struktur politik dalam masa kolonialisme Barat.

Melihat definisi tersebut, jelas bahwa pembangunan merupakan perubahan, perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik atau usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Kemajuan ini sering dikaitkan dengan kemajuan material sehingga pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi (Arif Budiman, 2000: 1).

Hal ini pula yang mengaitkan beberapa pengertian pembangunan dengan ukuran ekonomi. Dalam literatur-literatur ekonomi, pembangunan didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan real per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya (Afifuddin, 2010: 67).

Para ahli ekonomi secara berbeda mendefinisikan pembangunan sesuai dengan selernya sehingga definisi tentang pembangunan pun sedemikian banyak dan berbeda satu sama lain. Sekalipun demikian, secara garis besar istilah pembangunan dapat dikelompokkan dalam dua bagian berdasarkan periode waktunya, yaitu pandangan lama berdasarkan *ukuran ekonomi tradisional* dan *pandangan baru ekonomi pembangunan*.

a. *Ukuran-ukuran Ekonomi Tradisional*

Istilah pembangunan (*development*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama, untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas Pendapatan Nasional Bruto atau *Gross National Product* (GNP)-nya pada tingkat 5 persen hingga 7 persen, atau lebih tinggi lagi. Ukuran lain yang mirip dengan GNP, yaitu yang dikenal dengan istilah Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP).

Indeks ekonomi lainnya yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) atau GNP per kapita. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar *output*-nya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita "real" (sama dengan pertumbuhan GNP per kapita dalam satuan moneter dikurangi dengan tingkat inflasi) merupakan tolok ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomis dari suatu bangsa.

Pembangunan ekonomi pada masa lampau juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (*employment*) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberikan kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang secara sengaja diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara besar-besaran sehingga kadang-kadang mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan pada umumnya yang sebenarnya tidak kalah pentingnya. Jelaslah, bahwa penerapan tolok ukur pembangunan yang murni bersifat ekonomis tersebut, agar lebih akurat dan bermanfaat, harus didukung pula oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) nonekonomis.

Secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Dengan demikian, tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita,

yang diyakini akan menetes sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi, yang pada akhirnya menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Itulah yang secara luas dikenal sebagai prinsip “efek penetesan ke bawah” (*trickle down effect*). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah-masalah lain, seperti sosial kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan sering dinomorduakan.

b. Pandangan Baru Ekonomi Pembangunan

Pengalaman pada dekade 1950-an dan 1960-an, ketika di negara dunia ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama itu. Hal tersebut menyebabkan banyak ekonom dan perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan kemampuan “tolok ukur GNP” sebagai indikator tunggal atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan.

Mereka mulai mengubah strategi untuk mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak, seperti tingkat kemiskinan absolut yang semakin parah, ketimpangan pendapatan yang semakin mencolok, dan tingkat pengangguran yang terus melonjak. Singkatnya, selama dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Diawali dengan muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Penyesuaian definisi pertumbuhan yang kini lebih didasarkan pada konsep “redistribusi kemakmuran” merupakan slogan yang populer pada masa itu.

Meskipun demikian, peletakan dasar pembangunan seharusnya tidak hanya mementingkan aspek ekonomi dan mengabaikan aspek sosial. Pembangunan yang hanya mengutamakan ekonomi dapat menimbulkan instabilitas dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai (Arif Budiman, 2000: 5).

Pembangunan di bidang sosial yang selama ini termarginalisasikan justru dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal dapat meningkatkan mutu modal manusia, sedangkan pendidikan non-formal meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga mampu hidup mandiri.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Mansour Fakih (1996: 10), umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, "pembangunan" disejajarkan dengan kata "perubahan sosial". Dalam fenomena pembangunan yang kronis sesungguhnya tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomis atau sekadar mengukur tingkat pendapatan dan tidak terbatas berupa masalah perhitungan masalah ketenagakerjaan atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif.

Istilah pembangunan secara luas sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang "lebih baik" atau "lebih manusiawi". Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergeser lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba-lebih baik secara materiil ataupun spiritual.

C. Ruang Lingkup Pembangunan

Ruang lingkup pembangunan, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan di Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi (*economic development*) sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi berfungsi dalam rangka mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan bangsa dan negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan

ekonomi adalah proses upaya yang dilakukan secara sadar untuk kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu bangsa atau negara. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapat nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat *output* produksi yang dihasilkan. Adapun pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan nilai produksi, melainkan juga terdapat perubahan dalam struktur produksi, alokasi pembiayaan, dan jenis alat produksi yang digunakan.

Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

- a. Sumber daya alam. Memang sangat diakui bahwa sumber kehidupan manusia hampir dapat dikatakan bersumber dari alam, kekayaan alam, kesuburan tanah, kondisi iklim atau cuaca, potensi hutan, potensi tambang, potensi laut, dan sebagainya, yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara yang bersangkutan, terutama ketersediaan bahan baku produksi sehingga proses pengolahannya senantiasa berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sumber daya manusia. Salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah melalui jumlah dan kualitas penduduk atau manusia. Jumlah penduduk atau manusia yang besar merupakan pasar potensial untuk dijadikan sasaran memasarkan hasil-hasil produksi yang telah dilakukan, sementara kualitas penduduk atau manusia sangat menentukan seberapa besar produktivitas yang dapat dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, terutama manfaatnya kepada bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya.

- c. Permodalan. Sumber daya modal yang memadai merupakan faktor penunjang dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sumber daya modal sangat dibutuhkan suatu bangsa, negara, pemerintahan, untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
- d. Lapangan kerja. Pengangguran karena tidak tersedianya lapangan kerja merupakan masalah utama terhadap pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Sebaliknya, ketersediaan lapangan kerja bagi pencari kerja akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara yang bersangkutan.
- e. Keahlian atau kewirausahaan. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi sehingga bisa langsung digunakan masyarakat sangat diperlukan keahlian atau kemahiran untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sekalipun demikian, masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa yang memiliki keahlian, tetapi tidak memiliki jiwa kewirausahaan, tidak akan menyelesaikan masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat tercapai apabila masyarakat memiliki keahlian pada bidang tertentu dan memiliki jiwa kewirausahaan.
- f. Kestabilan politik. Kondisi politik suatu negara yang berubah-ubah sulit untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan kestabilan politik merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa.
- g. Kebijakan pemerintah. Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi kebijakan pemerintah turut memegang peranan. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung aktivitas di bidang ekonomi sudah pasti mengalami kemerosotan pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Demikian

pula sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah itu mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan akan dapat berlangsung dengan baik.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia telah banyak memberikan kemajuan, baik di bidang kehidupan fisik maupun nonfisik. Akan tetapi, pada kenyataannya, kondisi perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap kondisi eksternal dan internal, terutama yang berkaitan pada bidang pasar finansial dan pasar komoditas. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai ternyata sangat tidak merata secara adil antardaerah ataupun antarkelompok sosial ekonomi. Etika perekonomian senantiasa menekankan pada persepsi secara kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini ataupun mendatang, tetapi juga tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh semua anggota masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Fondasi moral kebijakan pembangunan ekonomi harus dapat memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

2. *Pembangunan di Bidang Politik*

Konfigurasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang politik yang dilakukan oleh para evaluator bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu aktivitas di bidang pembangunan sehingga fenomena yang tergambar dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa mengharuskan terciptanya dua jenis kekuatan. *Pertama*, kekuasaan yang dilakukan oleh kaum politisi bahwa untuk menetapkan suatu kebijakan dalam pelaksanaan dari berbagai jenis pembangunan lebih banyak diwarnai atau ditentukan oleh kemauan atau kekuasaan politik. *Kedua*, kekuatan yang tercipta atas ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kaum birokrasi yang mengatasnamakan publik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi sesungguhnya lebih berorientasi pada memenuhi desakan atau tuntutan kebutuhan ataupun keinginannya sendiri.

Pembangunan di bidang politik senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan ideologi pembangunan, bahkan lebih

diperkuat yang tujuan dan sasarannya bahwa semua manfaat dari hasil pembangunan pada akhirnya akan diperluas pada semua sektor dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang kita pahami sebagai argumentasi kesejahteraan atau manfaat diteteskan ke bawah (*trickle down effect*) sehingga melahirkan ungkapan bahwa perusahaan besar memiliki kewajiban mengasuh perusahaan kecil, orang kaya mengasuh orang miskin, dan sebagainya.

Apabila kita memerhatikan hasil kajian dan pengalaman dari berbagai pihak, jelas bahwa pernyataan politik terhadap kepentingan masyarakat pada kenyataannya hanya merupakan topeng. Hal tersebut disebabkan tujuan utamanya adalah memenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Orientasi pembangunan politik seperti ini tidak menyejahterakan masyarakat, tetapi justru semakin menyengsarakan masyarakat dalam kemiskinan, terutama mereka pada masyarakat pada level bawah secara individual. Kenyataan ini dijadikan isu sentral bagi partai politik untuk menciptakan propaganda kepada golongan masyarakat tersebut dalam menjalankan aksi politiknya.

Para pimpinan jabatan politik yang bersumber dari partai politik tidak lagi memiliki hati nurani yang memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, tetapi justru memanipulasi kepentingan masyarakat sehingga pemikiran dan tindakannya lebih berorientasi untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing. Untuk itu, pembangunan pada bidang politik seharusnya diarahkan pada sasaran berikut.

- a. Mendorong kesadaran para elite politik agar sejalan dengan anjuran konstitusi karena konstitusi tersebut merupakan produk dari pejabat politik dan jabatan publik. Dengan kata lain, konstitusi hasil komitmen (kesepakatan) seluruh pejabat politik dan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menciptakan atau mengamandemen konstitusi merupakan salah satu aspek kegiatan dalam pembangunan politik untuk mendorong kesadaran pejabat politik, pejabat publik, ataupun para elite politik
- b. Menciptakan kecerdasan para elite politik. Pembangunan politik diharapkan dapat melahirkan para elite politik yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk melakukan negosiasi dan berkolaborasi, baik secara internal maupun secara eksternal

sehingga suatu saat, seluruh pejabat dalam jabatan politik memiliki kecerdasan dan kemampuan dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

- c. Menciptakan pengetahuan masyarakat agar mampu menetapkan pilihan yang tepat. Pembangunan politik yang tepat sangat diharapkan untuk dapat menciptakan pengetahuan masyarakat dalam menetapkan pilihan, ketika saatnya tiba memilih pejabat-pejabat politik yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memahami hakikat demokrasi. Kecenderungan penyelenggaraan kekuasaan negara dan bangsa lebih banyak memilih ajaran demokrasi. Dengan adanya pembangunan politik, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang demokrasi. Dengan demikian, dalam menentukan pilihannya, rakyat tidak mengalami kesalahan yang dapat menyengsarakan dirinya sendiri.

Dengan adanya pemahaman dan pengertian para anggota masyarakat terhadap betapa pentingnya keberadaan politik dalam negara atau bangsa, kebijakan negara pada masa mendatang, yang tujuan dan sasaran utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3. *Pembangunan di Bidang Sosial*

Tujuan utama pembangunan di bidang sosial (*social development*) adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya, maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia dengan pemikiran dan tindakan melalui program yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial. Secara kontekstual,

pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tetapi dinikmati sekelompok kecil orang saja. Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitannya dengan program pembangunan sosial, mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, dengan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misalnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Program pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, rasional, efektif, dan efisien, yang sasaran utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat atau manusia Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi Negara Republik Indonesia yang mengisyaratkan bahwa untuk terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah melalui usaha pembangunan sosial.

Pembangunan sosial dapat dilakukan secara individual atau perseorangan ataupun secara kolektif atau kelompok. Pembangunan sosial juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan-kekuatan yang berubah menjadi hubungan pemberdayaan antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosialnya.

Usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf kesejahteraan sosial perlu terus dikembangkan karena sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diharapkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk pemenuhan kesejahteraan sosial menjadi isu secara nasional. Asumsinya bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan tidak lagi dilihat hanya meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi karena kemampuan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial ataupun korban bencana alam dan sosial.

4. Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan menciptakan kemampuan dan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, siapa pun yang berperan sebagai penyelenggara pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan harus mempunyai semangat kerja keras dan berdedikasi tinggi dalam semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal ini disebabkan penyelenggara pelaksanaan pembangunan pendidikan memerlukan orang-orang yang jujur dan mempunyai keteladanan.

Pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan pendidikan – oleh pemerintah adalah usaha yang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi generasi penerus perkembangan bangsa untuk meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat tercipta kualitas masyarakat Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing sejajar dengan bangsa lain.

Proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu tuntutan konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan membangun negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan negara yang tertinggi jelas menjadi dasar utama pelaksanaan pembangunan dalam bidang pendidikan.

5. Pembangunan di Bidang Keagamaan

Pembangunan di bidang keagamaan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dan dilandasi pemikiran rasional dan keyakinan secara transendental, untuk menghindari pengingkaran terhadap kebenaran keagamaan, terutama bagi pemula terhadap pendalaman ajaran agamanya masing-masing. Usaha ini dilakukan secara sadar agar tidak terjadi pengingkaran kebenaran keagamaan yang mereka anut.

Pengembangan kesadaran keagamaan tidak mungkin dilakukan secara revolusi, tetapi harus bersifat evolusi sehingga menciptakan premis-premis yang kuat dalam kehidupan manusia terhadap agama yang diyakininya selangkah demi selangkah hingga sampai pada pembentukan keyakinan hakiki, artinya memiliki keteguhan yang

tidak mudah digoyahkan oleh situasi atau kondisi apa pun. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam rangka pembangunan di bidang keagamaan agar komunitas masyarakat tertentu senantiasa dalam keadaan kedamaian dan bertoleransi adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan sarana keagamaan. Pembangunan untuk menyediakan sarana keagamaan, antara lain dengan memperbanyak, pengadaan, penulisan berbagai literatur yang materinya mengkaji pemahaman keagamaan ataupun pengadaan sarana keagamaan lainnya dalam rangka menunjang pertumbuhan keagamaan.
- b. Pembangunan prasarana keagamaan. Pembangunan prasarana peribadatan bertujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap ajaran agama yang mereka percayai untuk menuntun ke jalan yang benar dalam keselamatan hidupnya.
- c. Pembangunan ketaatan beragama. Sasaran pembangunan ketaatan beragama adalah meningkatnya kualitas keimanan atau kuatnya kepercayaan ajaran agama yang mereka yakini kebenarannya. Oleh karena itu, peranan dan keterlibatan pemerintah sangat diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan memberikan stimulus dalam kehidupan beragama.
- d. Pembangunan toleransi beragama. Keragaman agama dalam sebuah negara merupakan kekayaan bangsa, tetapi keragaman tersebut dapat menjadi ancaman apabila tidak didukung oleh toleransi antara penganut ajaran agama yang satu dan penganut ajaran agama lainnya.
- e. Pembangunan ketenagaan dalam keagamaan. Pembangunan ketenagaan dalam keagamaan sangat penting dilakukan oleh semua pihak, terutama pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan tentang ajaran keagamaan tertentu, kemudian diperkuat oleh program pemerintah dalam pembangunan ketenagaan di bidang keagamaan mereka masing-masing.

Ajaran keagamaan sebagai fundamental kehidupan manusia karena sangat berpengaruh positif terhadap pembentukan perilaku yang stabil, dalam arti perilaku yang tidak berubah-ubah dalam kondisi apa pun. Keagamaan merupakan pranata primer dari perilaku manusia karena keberadaannya senantiasa didukung oleh kesadaran,

terutama yang berkaitan dengan mempertahankan kehormatan, harga diri, dan sebagainya.

6. *Pembangunan di Bidang Lingkungan*

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam pada satu pihak dan sumber daya manusia pada pihak lain. Pelaksanaan pembangunan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menyetarakan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang tersedia dengan tidak menciptakan adanya perusakan kondisi alam lingkungan, baik secara geografis maupun demografis.

Kunci utama keberhasilan pembangunan lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dasar hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan atau pembenahan faktor lingkungan bukanlah suatu hal yang baru, tetapi telah ada sejak manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya karena kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungannya. Demikian pula, sebaliknya bahwa kelestarian lingkungan sangat bergantung juga pada peranan manusia terhadap pembenahannya. Pembangunan lingkungan dapat dilihat dari segi sumber daya alam, misalnya pembukaan lahan untuk pertanian, pembuatan bendungan air untuk irigasi, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan manusia agar bisa hidup lebih sejahtera. Dengan syarat, pemanfaatan sumber daya alam yang secara berlebihan agar tidak membawa malapetaka bagi manusia itu sendiri.

Selanjutnya, fenomena pembangunan lingkungan yang berkaitan dengan tumbuhan, yang semakin lama semakin memprihatinkan karena manusia tidak lagi memerhatikan dampak lingkungan atas usaha yang dilakukan dengan eksploitasi hutan-hutan yang tidak dilandasi nilai-nilai etika dan estetika. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu senantiasa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat atau dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan ataupun etika dan estetika yang dianut oleh masyarakat setempat. Penyimpangan yang dilakukan

oleh orang-orang tertentu, yang mengatasnamakan pembangunan lingkungan, tetapi sebenarnya merusak lingkungan baik dilihat dari segi alam sehingga melahirkan bencana alam, memusnahkan kelangsungan hidup tumbuhan tertentu yang selanjutnya akan menyengsarakan masyarakat bersangkutan.

D. Reorientasi Paradigma, Arah dan Tujuan Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, yang selama ini lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan, dengan karakteristik berupa memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan infrastrukturnya dalam meningkatkan produksi (prinsip produktivitas), pada kenyataannya telah gagal mewujudkan *trickle down effect development*, dan menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan dan akses dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Dengan kata lain, timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mengarah pada permasalahan politik.

Kegagalan tersebut mengilhami timbulnya paradigma kesejahteraan, yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dan keadilan, serta cenderung memandang rakyat sebagai objek alamiah melalui *charity strategy*, pendekatan *patronizing*, *asuk*, dan *proteksi* (Tjokrowinoto, 1999: 217).

Dalam kenyataannya, pada pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut masih melekat bahwa rakyat dipandang sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi sangat bergantung kepada pemerintah dalam melindungi, menyelamatkan, dan menyejahterakan kehidupan mereka. Hal ini akan memperlemah daya juang rakyat dalam memecahkan permasalahannya ataupun menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan sampai akhir pembangunan jangka panjang (PJP) I, jelas bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut cenderung bersifat normatif dan seragam serta kurang mengungkapkan variasi lokal yang memantapkan orisinalitas dan kepentingan atau kehidupan

penduduk setempat. Kecenderungan ini mengalihkan perhatian dari masalah-masalah real masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, produktivitas yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja, dan sebagainya.

Dampak dari pandangan tersebut pada akhir pembangunan jangka panjang (PJP) I terlihat bahwa setelah selama 25 tahun pemerintah melaksanakan pembangunan, masih ada masyarakat yang tertinggal atau tergolong masyarakat miskin.

Sebagai konsekuensinya, muncullah paradigma atau strategi pembangunan desa terpadu (*integrated rural development*), yang memberikan tekanan pada aktivitas multisektoral, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), partisipasi lokal, dan mobilisasi. Hal ini sejalan dengan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensi atau sangat kompleks, yang mencakup budaya, politik, sosial, teknikal, dan dimensi lainnya. Dikatakan oleh Ruttan dalam Compos (t.t.: 15) bahwa pembangunan pada dasarnya melibatkan interaksi dalam sejumlah besar antarahubungan aktivitas yang diwujudkan dalam implementasi program yang terpadu, dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan di daerah pedesaan secara cepat.

Dengan kata lain, pembangunan terpadu berupaya memadukan berbagai sektor pembangunan yang perlu dikembangkan, dengan melihat berbagai dimensi, baik kekuatan maupun kelemahannya, seperti budaya, sosial, politik, kelembagaan, potensi, kemampuan, dan lainnya, dengan menumbuhkan kekuatan rakyat melalui partisipasi lokal dalam membicarakan, merumuskan, dan merencanakan yang bersumber dari bawah. Dengan kata lain, rakyat menentukan hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lokal.

E. Paradigma *People Centered Development* dalam Pembangunan

Penggunaan paradigma pertumbuhan dan kesejahteraan dalam pembangunan menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan, yaitu menghasilkan distorsi atau krisis lingkungan dengan menipisnya daya dukung alami, meningkatnya ketergantungan rakyat yang luar biasa dengan proyek pembangunan atau kepada birokrasi dan menjadi kendala pada pembangunan berkelanjutan (*sustained development*).

Selain itu, partisipasi yang tumbuh lebih merupakan mobilisasi partisipasi dalam implementasi, bukan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Berbagai kelemahan tersebut memunculkan paradigma *people centered development*. Adapun logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia, dengan didukung sumber pembangunan utamanya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif, yang tidak akan pernah habis, dengan tujuan utama perkembangan manusia dengan aktualisasi yang optimal dari potensi manusia.

Menurut Korten, paradigma ini dapat memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan keragaman lokal, dan menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (Tjokrowinoto, 1999: 217). Manajemen pembangunannya mengubah peranan birokrasi pemerintah dari merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk rakyat, menjadi aktor dalam menciptakan kondisi yang menimbulkan kemandirian rakyat. Dengan kata lain, menempatkan pemerintah sebagai katalis dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat pada kemandirian lokal (Tjokrowinoto, 1999: 214).

Pembangunan yang berorientasi dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utama, memiliki kekuatan dalam merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, dalam mewujudkan keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis, dan kultur saat ini dan masa datang, dengan pendekatan pembangunan terpadu yang menekankan multisektoral, yang mengedepankan partisipasi lokal dan perencanaan dari bawah. Hal ini merupakan model pembangunan yang tepat untuk dilaksanakan seiring dengan semakin kuatnya tuntutan daerah akan otonomi yang luas.

Mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan reaksi, yang menjadikan partisipasi rakyat yang selama ini hanya mobilisasi partisipasi dalam implementasi, selaras dengan model pembangunan *top down* yang dikembangkan selama ini. Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat, menurut pemikiran Korten menekankan perkawinan antara *delivered development* atau *top-down strategy* dan *participatory development*.

Dengan demikian, proses pelaksanaan pembangunan tidak hanya melibatkan mobilisasi sosial, tetapi juga pelimpahan wewenang

(*devolution of power*). Untuk menciptakan suatu institusi dan pola kebijaksanaan yang memungkinkan masyarakat mengerjakan dan mengendalikan inisiatif sendiri, Korten menyarankan hal-hal berikut.

1. Intervensi harus terus-menerus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia secara mandiri.
2. Pengembangan struktur-struktur dan proses organisasional yang berfungsi menurut prinsip-prinsip *self organizing system*.
3. Pengembangan sistem-sistem produksi dan konsumsi yang terorganisasi secara teritorial berdasarkan pemilikan dan penguasaan lokal (Korten dan Rud Klaus, 1984).

Bertolak dari pemikiran tentang peningkatan kualitas manusia dengan menggunakan istilah paradigmanya, Korten mencoba mengadaptasikannya terhadap masalah menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, melalui serangkaian program yang disebut perencanaan pembangunan sosial (*social development planning*) yang terpadu di daerah. Program ini mencakup serangkaian kegiatan untuk membangkitkan munculnya usaha-usaha bersama masyarakat dan menemukan alternatif terbaik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Konsep tersebut muncul dari pemikiran bahwa keterlibatan masyarakat dalam gerakan pembangunan belum mendapat peranan yang seimbang dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, adanya upaya penumbuhan kemandirian (*self-reliance*) dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alami, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara mandiri.

F. Tiga Komponen dalam Pembangunan

Ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Ketiga hal tersebut merupakan nilai pokok atau tujuan inti yang harus dicapai dan diperoleh oleh setiap masyarakat melalui pembangunan. Ketiga komponen tersebut berkaitan secara langsung dengan kebutuhan manusia yang paling

mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi di seluruh masyarakat dan budaya sepanjang zaman.

Pertama, kecukupan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kecukupan ini tidak hanya menyangkut makanan, tetapi semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, muncullah keterbelakangan absolut. Fungsi semua kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan bekal untuk menghindari kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Atas dasar itulah dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. Tanpa kemajuan ekonomi secara berkesinambungan, realisasi potensi manusia, baik individu maupun keseluruhan masyarakat tidak mungkin berlangsung.

Dengan demikian, kenaikan pendapatan per kapita, penambahan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan merupakan hal-hal yang harus ada (*necessary condition*) bagi pembangunan, tetapi tidak akan memadai tanpa adanya faktor-faktor inti/positif lainnya (*not sufficient condition*).

Kedua, jati diri dan harga diri sebagai manusia. Kehidupan yang serba lebih baik, yaitu adanya dorongan dari dalam diri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa diri pantas (*able*) dan layak untuk melakukan sesuatu, terangkum dalam jati diri (*self-esteem*).

Ketiga, kebebasan dari perbudakan/penindasan. Tata nilai ketiga sebagai nilai-nilai hakiki pembangunan adalah konsep "Kebebasan atau Kemerdekaan. Kebebasan ini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiel dalam kehidupan serta bebas dari perasaan perbudakan sosial sebagai manusia terhadap alam. Kebebasan dari kebodohan dan ketergantungan terhadap pihak asing. Kebebasan merangkum pilihan-pilihan yang luas bagi masyarakat dan anggotanya secara bersama-sama untuk memperkecil paksaan/tekanan dari luar, dalam usaha untuk mencapai tujuan sosial yang dinamakan dengan "pembangunan".

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apa pun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan dalam semua masyarakat harus mempunyai tiga sasaran, yaitu: (1) meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; (2) mengangkat taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materiel, melainkan juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri, baik secara individu maupun nasional; (3) memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

G. Mengukur Pembangunan

1. Kekayaan Rata-rata

Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP), dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

Karena PNB atau PDB yang digunakan untuk mengukur hasil keseluruhan dari sebuah negara, (dalam arti jumlah penduduknya) berlainan, untuk memperbandingkan PNB dari satu negara dengan negara lainnya, dipakai ukuran PNB/kapita atau PDB/kapita. Oleh sebab itu, produksi rata-rata setiap orang dari suatu negara dapat diketahui. Dengan demikian, pembangunan dalam hal ini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau negara.

2. *Pemerataan*

Kekayaan yang dimiliki atau diproduksi oleh suatu bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa jadi, sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan.

Oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan, bukan lagi hanya PNB/kapita, melainkan diukur dengan melihat persentase dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, persentase 40% penduduk golongan menengah, dan persentase 20% penduduk terkaya. Apabila terjadi ketimpangan yang luar biasa, misalnya 20% terkaya meraih lebih dari 50% PNB, sedangkan sisanya dibagi pada 80% penduduknya, ketimpangan antara orang-orang kaya dan miskin dianggap besar.

Jika pembangunan sebuah bangsa diukur dengan PNB/kapita dan tingkat ketimpangan pembagian pendapatannya, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih majemuk. Tidak hanya kekayaan atau produktivitas bangsa tersebut yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaan. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB/kapitanya, berhasil juga dalam pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Demikian pula, tidak semua negara yang masih rendah PNB/kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah bangsa yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata (Arif Budiman, 2000: 1-8).

BAB 2

PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinu dari keadaan tertentu pada keadaan yang dianggap lebih baik (Suryono, 2010: 3). Pendapat lain yang berkaitan dengan definisi tersebut adalah pendapat Siagian (1979: 3) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Untuk itu, implikasi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah: (1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*); (2) pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*); (3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*sustainability*); (4) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, dan saling menghormati (*inter dependence*) (Bryan and White dalam Suryono, 2004: 35).

Suryono (2004: 81-83) menuliskan empat paradigma pembangunan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*). Konsep ini merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utama dari paradigma ini adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik.

Kedua, paradigma pembangunan pertumbuhan dan pemerataan (*growth and equity strategy development*). Strategi ini lebih diorientasikan pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Akan tetapi, strategi pertumbuhan dan pemerataan ini masih menciptakan ketergantungan suatu negara lain.

Ketiga, paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yaitu pada dasarnya pembangunan hendaknya memerhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable/nonrenewable*. Dengan demikian, pemanfaatan segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya.

Keempat, paradigma *human development*, yaitu pendekatan pembangunan yang memerhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pembangunan berpihak kepada rakyat, bukan elite penguasa. Penempatan manusia sebagai subjek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya secara maksimal.

B. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (1995: 18), peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk berikut:

1. penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan;
2. *service state*, yaitu peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat;

3. enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur pembaharuan atau pembangunan.

Menurut Munir (2010: 19), peran pemerintah sesuai dengan fungsinya, yaitu:

1. enterpreneur, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset daerah sumber daya ekonomi potensial sehingga secara ekonomi menguntungkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
2. koordinator, yaitu pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan;
3. fasilitator, yaitu mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.

Siagian (1979: 101-105) mengklasifikasikan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut.

1. Pemeliharaan ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*). Fungsi ini sangat penting karena ketertiban dan ketenangan dalam pembangunan tidak akan tercapai apabila pemerintah tidak berhasil melakukan fungsi ini. Gangguan tersebut dapat terjadi dari mana saja.
2. Pertahanan dan keamanan merupakan fungsi terpenting pula dari pemerintah karena adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mendominasi pihak lain dan menggunakan pihak lain tersebut sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran pihak-pihak yang lebih kuat.
3. Perpajakan, merupakan salah satu fungsi pemerintah yang pertama timbul di negara politik. Tujuannya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah, pemerintah membutuhkan biaya yang bersumber dari pajak.

4. Hukum, yaitu mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat agar konflik yang terjadi dalam pembangunan dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat. Dalam pandangan hukum, penguasa dan masyarakat berkedudukan sama.
5. Administratif, yaitu pemerintah harus bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, melalui pelaksanaan kegiatan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, pemerintah harus berusaha meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam pembangunan tersebut.

Secara terperinci, peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut.

Pertama, stabilisator, yang dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

- a. *Stabilisator dalam bidang politik*. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terhindar dari berbagai rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan antara berbagai kekuatan politik, apalagi jika didasarkan pada perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan yang bersumber dari dalam negeri berupa keinginan dan tindakan kelompok ekstrem tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan “peraturan permainan politik” yang telah disepakati bersama.

Adapun rongrongan dari luar berasal dari negara-negara kuat dan adikuasa yang ingin memantapkan pengaruh, bahkan memperluas hegemoninya. Dengan kata lain, keinginan agar “lingkungan pengaruhnya” (*sphere of influence*) semakin melebar, antara lain berupa panutan ideologi dan sistem politik yang diterapkan di banyak negara yang diakui sebagai sekutunya.

- b. *Stabilitas ekonomi*, yaitu iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga:
- 1) ekonomi tumbuh secara wajar;
 - 2) suku bunga yang tidak tinggi;
 - 3) rendahnya inflasi;
 - 4) kesempatan berusaha semakin luas;
 - 5) proses industrialisasi berlangsung dengan baik;
 - 6) kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian yang dihadapi oleh negara-negara terbelakang justru kebalikan dari ciri-ciri di atas. Kelabilan ekonomi di negara-negara dunia ketiga sering pula diperburuk oleh sikap dan tindakan negara-negara industri maju. Misalnya, dengan memperlakukan negara-negara dunia ketiga sekadar sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku yang sangat diperlukan oleh berbagai industri mereka. Apabila negara-negara maju tersebut menanam modalnya di negara-negara miskin dan terbelakang, tidak sedikit masalah yang ditimbulkannya, seperti repatriasi keuntungan ke negara sendiri, tidak terjadinya alih pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja lokal tidak ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, dan sistem imbalan yang digunakan bersifat diskriminatif dalam arti bahwa tenaga kerja yang berasal dari negara induk perusahaan mendapat gaji yang lebih mahal daripada tenaga kerja lokal, meskipun mempunyai tingkat pendidikan dan keahlian yang relatif sama.

Para pakar dan pengamat ekonomi menekankan lima hal yang menyebabkan stabilitas ekonomi sering terganggu di negara-negara miskin dan sedang membangun.

- 1) Jiwa kewirausahaan di kalangan warga negara tidak tinggi. Hal tersebut tampak pada keengganan mengambil risiko, keengganan menyusun rencana jangka panjang, adanya persepsi bahwa “berdagang” bukanlah pekerjaan yang paling terhormat dibandingkan dengan, misalnya menjadi seorang birokrat.

- 2) Keterampilan atau kemahiran manajerial di bidang bisnis rendah karena merupakan “produk sampingan” dari hal-hal yang telah disinggung pada butir pertama.
- 3) Produktivitas tenaga kerja yang rendah, bukan hanya keterampilan operasional yang kurang, melainkan juga etos kerja yang tidak tepat, ketidakdisiplinan mengenai waktu, ketidakcermatan melaksanakan tugas dan loyalitas yang tinggi kepada diri sendiri daripada kepada negara.
- 4) Para pendatang yang berimigrasi memiliki jiwa wirausahawan, memiliki modal, memiliki keterampilan manajerial dan bekerja keras sehingga meskipun jumlah mereka tidak besar, bahkan tergolong minoritas, mereka menguasai sebagian besar perekonomian nasional. Tidak jarang, meskipun mereka sudah menjadi warga negara di tempat mereka bermukim, pertalian darah mereka dengan orang-orang di negara leluhurnya tetap kuat. Dengan perkataan lain, tidak sedikit di antara mereka yang menunjukkan loyalitas kepada negara leluhurnya, bukan kepada negara yang mereka menjadi warganya.
- 5) Warga masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai “kelas menengah” tidak banyak, padahal mereka menjadi tulang punggung bangsa. Memang sering tampak adanya upaya pemerintah untuk menumbuhkan dan memperbesar jumlah anggota kelas menengah itu, antara lain dengan apa yang dikenal dengan *affirmative action plan*, yang menjadikan penduduk asli suatu negara sebagai “kelompok yang dilindungi” dengan memberikan perlakuan preferensial di bidang pendidikan, pelatihan, perolehan lapangan pekerjaan, dan segi-segi kehidupan lain yang diharapkan membuat mereka semakin kuat sebagai tulang punggung nasional.

Jelasnya bahwa karena pentingnya stabilitas ekonomi, peran pemerintah dalam menjaminkannya merupakan *conditio sine qua non*-pembangunan nasional.

- c. *Stabilitas sosial budaya*. Sasaran utamanya adalah menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Pembangunan sosial budaya seolah-olah

mengandung dilema karena pada satu pihak ada unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan, tetapi pada pihak lain, bangsa yang bersangkutan harus siap menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Mempertahankan jati diri memang sangat penting karena dalam jati diri itulah kekhasan suatu bangsa diketahui, dikenali, dan diakui oleh pihak atau bangsa lain. Dengan perkataan lain, budaya bangsa harus sedemikian kuat sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku positif dan sebagai perekat untuk menjamin stabilitas sosial.

Di sinilah terlihat peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejala sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara berikut:

- 1) kemampuan selektif yang tinggi;
- 2) proses sosialisasi yang elegan, tetapi efektif;
- 3) melalui pendidikan;
- 4) pendekatan yang persuasif;
- 5) pendekatan bertahap, tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan "loncatan jauh ke depan" (*quantum leap*).

Kedua, inovator. Inovasi merupakan salah satu "produk" dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan, metode, sistem, dan yang terpenting cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut.

Untuk itu, pemerintah harus memiliki tingkat keabsahan (*letimigacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan kepemilikan keabsahan yang tinggi, hal-hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang akan memudahkan terjadinya perubahan yang diinginkan.

Di samping keabsahan, hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah selaku inovator adalah sebagai berikut.

- a. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Salah satu "tuduhan" yang dilemparkan oleh masyarakat kepada aparaturnya adalah cara bekerja yang lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, dan cara berpikir yang didasarkan pada orientasi kekuasaan. Hasilnya, tingkat produktivitas kerja yang rendah. Inovasi dapat mengubah semua itu agar aparaturnya mampu bekerja dengan cepat dan aman, sistem kerja yang sederhana dan transparan, dan cara berpikir yang didasarkan pada pelayanan. Jika pemerintah mampu mewujudkan birokrasi demikian, cara-cara berinovasi yang ditawarkan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima.
- b. Inovasi yang sifatnya konseptual. Pemerintah dengan seluruh jajarannya menjadi sumber dari ide-ide baru. Hal yang menonjol dalam kaitan ini adalah "netralitas" birokrasi. Dalam pandangan ini, birokrasi sering menempatkan diri semata-mata sebagai pelaksanaan keputusan politik yang diambil oleh institusi yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengambilnya tanpa mempersoalkan, apalagi menganalisis, apakah keputusan politik itu demi kepentingan rakyat banyak atau tidak? Misalnya, jika dalam suatu negara tampil orang kuat yang berperilaku diktator atau despot dan mengambil berbagai keputusan politik yang hanya menguntungkan diri sendiri atau keluarga atau kelompok atau kliknya, birokrasi tetap melaksanakan keputusan tersebut karena mereka harus "bersikap netral". Konsepsi tentang netralitas tersebut tidak tepat karena birokrasi adalah abdi seluruh masyarakat maka di samping sebagai pelaksanaan yang andal, mereka juga harus menjadi sumber ide, sumber saran, dan sumber pendapat tentang keputusan-keputusan untuk menjamin bahwa berbagai keputusan tersebut ditujukan pada kepentingan nasional dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, interaksi positif dan hubungan yang serasi antara lembaga eksekutif dan lembaga konstitusional lainnya sangat penting.
- c. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Di sini peran pemerintah adalah bekerja berdasarkan pendekatan legalistik.

Dalam praktik, perwujudannya dapat dilakukan dengan pendekatan dalam penyelesaian masalah dan sikap, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pendekatan legalistik di sini antara lain bahwa untuk menghadapi permasalahan, pemerintah mengeluarkan ketentuan normatif dan formal, misalnya dengan menerbitkan undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, pendekatan ini menimbulkan persepsi bahwa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hal yang *self implemenitng* seolah-olah dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, permasalahan yang dihadapi sudah terpecahkan dengan sendirinya. Padahal, kenyataannya tidak demikian.
- 2) Timbul kecenderungan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut secara kaku. Dalam praktik, hal ini dapat terlihat pada interpretasi secara harfiah, padahal yang lebih diperlukan adalah menegakkan hukum dan peraturan itu dilihat dari semangat dan jiwanya. Dengan perkataan lain, menggunakan pendekatan situasional.

Hal itu berarti bahwa sistem, prosedur, metode kerja, dan pendekatan yang diperlukan bersifat *problem-solving* dan *action-oriented*, kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis latar belakang timbulnya permasalahan kemudian mencari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah. Dengan demikian, "terapi" yang digunakan tidak hanya mampu "mengobati" gejala-gejala yang timbul, tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga ke akarnya.

Ketiga, modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern, yaitu negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri pada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan *de jure*.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kemampuan dan kemahiran manajerial;
- c. kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi;
- d. sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif;
- e. landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis;
- f. visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan;
- g. rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang "nasibnya";
- h. kesediaan mengambil risiko;
- i. bersedia menerima perubahan.

Untuk itu, diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk "menggiring" masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu.

Keempat, pelopor, yaitu aparat pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, yang mencakup kepeloporan dalam hal-hal berikut:

- a. bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin;
- b. kejujuran, misalnya dalam hal pemberantasan korupsi dan kolusi;
- c. penegakan disiplin, misalnya dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku;
- d. ketaatan pada peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal perolehan izin dan berlalu lintas;
- e. kesediaan berkorban demi kepentingan negara, misalnya dalam hal bela negara dan bayar pajak;
- f. kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, misalnya dalam hal tidak membuang sampah secara sembarangan, tetapi melakukan daur ulang;

- g. penerapan objektivitas seperti dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain yang tidak diskriminatif;
- h. peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros dan gemar menabung;
- i. peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

Dengan kepeloporan tersebut, warga negara relatif mudah mengubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerja yang akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.

Kelima, pelaksana, meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi bahan pemerintah semata-mata. Akan tetapi, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, tidak diminati oleh masyarakat dan secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, ada kegiatan yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta, tetapi harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Demi keselamatan negara misalnya, pemerintah harus membangun kekuatan angkatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan nasional serta secara efektif mampu menangkal ancaman dan gangguan, baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar.

C. Peran Masyarakat sebagai Pelaku dalam Pembangunan

Poerbakawatja (1981: 139) mendefinisikan partisipasi sebagai gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang fisik ataupun bidang materiil dan dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal, masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan mereka dan mengerti cara mengatasi permasalahan mereka. Sukardi (2009: 44)

menyatakan bahwa hak masyarakat akan menjadi kenyataan apabila mereka dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Peran masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah aset yang sangat penting dalam tatanan negara. Ketika pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat membuat agenda-agenda pembangunan, selayaknya, masyarakat turut mengambil peran dalam mengeluarkan gagasan yang bisa diterima oleh pemerintah.

Banyak aspek yang perlu dimasuki masyarakat sebagai unsur penting yang berperan dalam pembangunan negeri ini. Dalam aspek pendidikan, misalnya masyarakat harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pendidikan.

Dari aspek ekonomi, pemerintah perlu mengambil serius akar permasalahan dari perekonomian masyarakat yang masih banyak berada di wilayah kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan yang tepat, pemerintah turun langsung melihat kondisi real, agar masyarakat yang awalnya apatis terhadap setiap kebijakan pemerintah bisa diajak bekerja sama dalam pembangunan di negeri ini.

Jika dikaji dari aspek politik, pemerintah harus memberikan definisi dan contoh nyata politik yang bersih, tidak saling menghancurkan. Dengan demikian, masyarakat tidak skeptis terhadap para politisi yang saat ini tidak bisa dimungkiri selalu dianggap sebagai sosok yang hanya mencari kekuasaan pribadi dan kelompok.

Adapun dalam bidang kesehatan, menurut Notoatmodjo, peran serta atau partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Secara aktif, masyarakat memikirkan, memecahkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan. Setiap anggota masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusi atau sumbangan yang tidak hanya terbatas pada dana dan finansial, tetapi dapat terbentuk dalam tenaga (*daya*) dan pemikiran (*ide*). Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam 4M, yaitu *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda), dan *mind* (ide atau gagasan).

BAB 3

TEORI MODERNISASI

A. Pendahuluan

Sebagai agenda sentral bagi hampir semua negara, pembangunan menjadi wacana pembicaraan di negara-negara maju, walaupun esensi dan tolok ukur yang dipergunakan berbeda dengan negara berkembang. Pembangunan dijadikan standar moral untuk menilai maju-mundurnya suatu negara dan berbagai kontroversi pun melekat dengannya. Oleh karena itu, memahami berbagai teori pembangunan dan preskripsi kebijakan yang terkandung di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku pembangunan agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan, baik dalam memahami, mengkritisi, merekonstruksi, maupun secara konkret mengaplikasikannya dalam pekerjaan.

Teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. Ide pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan muncul pada saat negara-negara maju bermaksud untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka. Pada perkembangannya, teori pembangunan mempunyai beragam pendekatan yang memberikan kritik satu dengan yang lain.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, yaitu modernisasi dan ketergantungan (Lewellen, 1995; Larrin, 1994; Kiely, 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Sementara paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under development*), ketergantungan (*dependent development*), dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrin (1994). Berbeda dengan klasifikasi Larrin, Tikson (2005) membaginya dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan.

B. Makna Teori Modernisasi

Dalam kajian pembangunan, teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembanguan. Ada dua teori besar yang memengaruhi teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep dari metafora teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif menuju tahapan yang lebih maju. Berdasarkan asumsi tersebut, para teoretikus perspektif modernisasi membuat kerangka teori dan tesis dengan ciri-ciri berikut.

1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow tentang tinggal landas membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju masyarakat maju, dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks.
2. Modernisasi sebagai proses homogenisasi. Proses modernisasi merupakan proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan, dan hal ini menjadi indikator keberhasilan proses pembangunan. Proses homogenisasi ini terjadi dalam beberapa tingkat. *Pertama*, homogenisasi internal, yaitu homogenisasi yang terjadi di dalam negara tersebut. Artinya, di antara masyarakat tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial. *Kedua*, homogenisasi eksternal, yaitu kemiripan dan kesamaan antara negara maju dan negara berkembang. Watak homogenisasi ini merupakan salah

satu target para pemikir teori modernisasi untuk melaksanakan pembangunan secara efektif.

3. Modernisasi merupakan proses Eropanisasi dan Amerikanisasi atau modernisasi itu sama dengan Barat. Negara Barat merupakan negara yang tidak tertandingi dalam kesejahteraan ekonomi dan politik sehingga dijadikan mentor bagi negara berkembang. Dalam hal yang lebih nyata, kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi mencontoh hal-hal yang dilakukan negara maju tanpa memerhatikan faktor budaya dan sejarah lokal negara berkembang.
4. Modernisasi merupakan proses yang tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata lain, ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju, dunia ketiga tidak mampu menolak proses selanjutnya.
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif, tetapi efek samping dari proses ini memakan banyak korban yang secara sosial berbiaya mahal.
6. Modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi merupakan proses evolusioner sehingga perubahan yang dapat dilihat sangat lambat. Untuk itu, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihat perubahan yang dialami, bahkan membutuhkan waktu antargenerasi untuk melihat seluruh proses yang dijalankan modernisasi, termasuk akibat yang dialami proses modernisasi.

Jika tilikan modernisasi didasarkan atas teori fungsional, teori modernisasi mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistematis, transformasi, dan terus-menerus. Sebagai proses sistematis, modernisasi merupakan proses melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi. Hal ini membentuk wajah modernisasi sebagai sebuah bentuk yang teratur dibandingkan dengan sebuah proses yang tidak beraturan. Sebagai proses transformasi, modernisasi merupakan proses yang membentuk dari sebuah kondisi tradisional menjadi modern dalam segala aspek sosial budaya. Kemudian, sebagai proses yang terus-menerus, modernisasi melibatkan perubahan sosial yang terus-menerus. Sekali perubahan sosial terjadi, aspek sosial lain ikut terpengaruh.

C. Lahirnya Teori Modernisasi

Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respons kaum intelektual atas Perang Dunia II, yang telah menyebabkan munculnya negara-negara dunia ketiga. Kelompok negara miskin yang ada dalam istilah dunia ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang diperebutkan oleh pelaku Perang Dunia II. Pada sisi lain, sebagai negara yang telah mendapatkan pengalaman sebagai negara jajahan, kelompok dunia ketiga berupaya melakukan pembangunan untuk menjawab pekerjaan rumah mereka, yaitu kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, rusaknya lingkungan, kebodohan, dan beberapa problem lain.

Lahirnya teori modernisasi ditandai beberapa momentum penting. *Pertama*, terjadinya revolusi intelektual di setiap negara untuk melakukan respons terhadap Perang Dunia II. Banyak pihak meyakini teori ini sebagai pintu masuk menuju perubahan. *Kedua*, terjadinya perang dingin antara negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis Uni Soviet (USSR) yang berideologi sosialis dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Dominasi yang ditunjukkan oleh kedua negara tersebut bermuara pada ekspansi wilayah di negara-negara berkembang untuk menerapkan ideologi mereka.

Sebuah kekuatan besar berhasil menempatkan negara-negara di dunia dalam beberapa kubu dan kategori, yang mengarah pada munculnya dikotomi negara. Pada saat itu negara-negara terbagi dalam bentuk negara maju-negara terbelakang (dunia ketiga), negara kaya-negara miskin, negara sosialis-negara kapitalis, negara pusat-negara pinggiran, dan lain-lain. Dengan istilah lain, teori ini melihat masyarakat pada posisi dikotomi, yaitu modern dan tradisional. Menurut teori modernisasi, negara yang belum maju dan masih tradisional belum bisa lepas dari nilai-nilai tradisionalnya sehingga tidak menopang pembangunan.

Kondisi ini menimbulkan persaingan serius yang tidak sehat antara negara sosialis yang dimotori Soviet dan negara kapitalis yang dimotori Amerika. Perseteruan ini terjadi karena ekspansi pengaruh pada negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka. Sebagai contoh, pada negara-negara Asia dan Afrika yang semula jajahan negara Eropa dan Amerika, Amerika merasa khawatir dengan pengaruh sosialis Rusia (dahulu Soviet) yang cenderung direspons negara-negara yang baru

berkembang. Hal tersebut mendorong para ilmuwan sosial Amerika (yang kapitalis) melakukan dua hal. *Pertama*, mengembangkan teori untuk memahami dunia ketiga yang baru lahir. *Kedua*, menemukan resep teoretis dalam rangka membentuk sosialisme untuk mendorong kapitalisme. Dalam konteks sejarah seperti inilah teori modernisasi dan pembangunan lahir.

Keberhasilan ilmuwan Amerika meramu dan merumuskan pijakan teoretis mampu memengaruhi dan membujuk negara-negara baru berkembang dengan teori modernisasinya. Semula teori ini hanya merupakan gagasan perubahan sosial, tetapi lambat laun menjadi ideologi baru bagi negara-negara berkembang (yang baru merdeka), termasuk Indonesia. Sekitar tahun 1980-an misalnya, beberapa ilmuwan sosial dan ekonomi yang dikenal sebagai pemikir kaum modernis mengusung tema modernisasi dalam berbagai tesisnya. Dari kalangan ilmu sosial (sosiologi) dikenal Sello Sumardjan, sedangkan dari kalangan ekonomi dikenal Sumitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro, dan lain-lain. Kuatnya pengaruh propaganda teori ini menyebabkan banyak negara memerlukan teori sebagai mitos sosial yang tumbuh dan sulit diruntuhkan saat itu. Menurut Fakih, perkembangan teori modernisasi ini disebabkan dukungan dana dan politik yang luar biasa besar dari pemerintah dan organisasi swasta di Amerika serta negara liberal lainnya.

Dilihat dari akar sejarahnya, teori modernisasi didewakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak pihak menuding paham ini telah gagal dalam penyelesaian segala problematika masyarakat menuju perubahan yang berarti. Paradigma ekonomi yang diemban, yang menjadi roh gerakan awal modernisasi hanya diukur secara fisik berdasarkan produktivitas masyarakat dan negara, sedangkan faktor lain tidak diperhitungkan. Jika modernisasi hanya merujuk pada paradigma tunggal (ekonomi) tanpa memerhatikan dimensi lainnya, seperti sosial, budaya, politik, bahkan agama ada kesan pemaksaan kehendak, dan monopoli ideologi yang tidak disadari oleh penguasa dan masyarakat di negara-negara berkembang.

Menurut Yudistira (2003), teori modernisasi adalah deskripsi dan ekspansi tentang proses transformasi dari masyarakat yang tradisional atau berkembang menuju masyarakat modern. Menurut Edwar F. Borgotta dan Maria Bergotta, ciri masyarakat modern ditandai

dengan kecenderungan mereka menganggap teori modernisasi sebagai salah satu perspektif sosiologi yang berorientasi pada pembangunan dan keterbelakangan (*development and underdevelopment*) (Yudistira, 2003). Perhatian utama teori ini, yaitu pada cara masyarakat dahulu dan sekarang yang telah modern diwesternisasikan melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, politik, dan struktur budaya.

Dalam kajian filsafat dan epistemologi, istilah modernisasi sering disamakan dengan istilah modernitas dan *modernity*. Menurut Borgotta, hal ini menunjuk perspektif bahwa hanya ada satu kebenaran model diskripsi dan eksplanasi yang mengungkap dunia nyata. Istilah modernitas ini telah mapan dalam sejarah seni dan teori estetika, dan kemudian dipakai dalam istilah ilmu-ilmu sosial (Yudistira, 2003). Demikian pula, proses modernisasi yang muncul pada perbincangan teori Max Weber yang cenderung melihat rasionalisasi sebagai kelanjutan atau proses awal lahirnya modernitas dan modernisasi. Secara lengkap, Weber menyebutkan bahwa modernitas merupakan hasil dalam istilah budaya, sosial, dan politik akibat proses besar rasionalisasi yang menyebabkan dunia dikontrol dan diatur oleh suatu etika penguasa dunia, menyangkut subornisasi diri, hubungan sosial, dan alam program kontrol dan regulasi yang terperinci. Proyek modernisasi diri ini merupakan pengenalan rasionalitas pada lingkungan sosial. Sejarah modernitas adalah sejarah akal sebagai pengaturan instrumen masyarakat dan lingkungan, seperti dilukiskan secara klasik dalam *dialectic of Enlightenment*.

Menurut Daniel Lerner (1958), aspek dasar modernisasi adalah urbanisasi, industrialisasi, sekularisasi, demokratisasi, pendidikan, dan peran serta media massa yang semuanya berlangsung dalam keterkaitan utuh, tidak terpisah, dan tidak serampangan sehingga Weber menyebut bahwa modernisasi sebagai proyek negara besar (Amerika) pada dunia ketiga.

Hal ini memunculkan berbagai tanggapan untuk melakukan tinjauan terhadap modernisasi, seperti dijelaskan Samuel P. Huntington (2003), yaitu secara psikologis, modernisasi melibatkan pergeseran mendasar di bidang mental, nilai-nilai, dan harapan.

Secara sosiologis, modernisasi merupakan alat yang melengkapi semua keluarga dan kelompok primer lainnya, agar memiliki peran-

peran khusus dengan munculnya kesadaran, dan pentingnya asosiasi sekunder yang berfungsi majemuk. Secara ekonomis, modernisasi mengacu pada terjadinya peragaan aktivitas, yang di dalamnya lapangan pekerjaan tradisional berkembang menjadi sektor yang lebih kompleks dan luas, mengandalkan keterampilan kerja secara berarti serta komposisi modal dan tenaga kerja yang lebih rasional.

Ada tiga asumsi pokok dalam modernisasi. *Pertama*, memercayai kondisi tradisional dan modern sebagai kondisi yang dikotomis. Modern adalah kondisi kemajuan, rasionalitas, dan efisiensi produksi, seperti yang terdapat pada masyarakat industri maju. Sebaliknya, masyarakat tradisional ditandai ciri-ciri irasionalitas, keterbelakangan, dan inefisiensi dalam masyarakat agraris. *Kedua*, percaya bahwa faktor penyebab keterbelakangan adalah faktor nonmateriil, terutama dunia ide dan alam pikiran. *Ketiga*, bersifat positivistik. Modernisasi bersifat universal sehingga perubahan sosial yang linier akan tercapai jika masyarakat tradisional membangun dengan cara yang sama dengan masyarakat modern. Karena klaim universalnya, asumsi ini cenderung ahistoris. Modernisasi melahirkan perubahan yang substansial, baik dalam ilmu pengetahuan, pikiran, maupun bentuk organisasi sosial yang ada dalam masyarakat, modernitas sendiri akan melepaskan seluruh historis terdahulu (fase tradisionalnya).

Teori modernisasi mengusung semangat pembangunan mengubah masyarakat dari era tradisional menuju masyarakat modern. Mulai nilai-nilai, ekonomi, budaya, sosial, dan politik yang dipercayai masyarakat negara-negara berkembang. Tema modernisasi selalu menjadi ukuran kemajuan masyarakat. Beberapa teori yang berkaitan dengan teori modernisasi adalah sebagai berikut.

D. Teori Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori Harrod-Domar dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah, tetapi menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang. Masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain.

Asumsi yang melandasi teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masa investasi modal. Jika investasi modal berkembang baik, pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Salah satu implikasi dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah mendorong penanaman investasi dan membuat investasi tumbuh subur di Indonesia. Pemerintah Indonesia berpijak dari teori Harrod-Domar mendirikan lembaga, yaitu Penanaman Modal Nasional karena langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, ketika penanaman modal dilakukan secara masal oleh negara asing yang kemudian membeli aset strategis yang dimiliki oleh bangsa, alih-alih menjangkau investasi agar besar, yang terjadi adalah penggerogotan aset negara. Oleh sebab itu, salah satu kritik terhadap teori ini bahwa teori ini sangat mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sedangkan aspek yang tidak dibahas adalah aspek manusia. Menurut Harrod Domar, yang paling penting adalah menyediakan modal, sedangkan masalah manusia setiap negara sudah memilikinya. Implikasinya, pengembangan kualitas manusia tidak menjadi perhatian Harrod Domar.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar yang sangat terkenal di kalangan para ahli ekonomi pembangunan.

Seperti dikatakan di atas, teori ini banyak mengalami modifikasi sehingga menjadi lebih canggih. Akan tetapi, pada intinya, rumus pembangunan Harrod-Domar ini masih dipertahankan. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal. Jika ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi, seperti yang dikatakan oleh Blomstrom dan Hettne.

Adanya perbedaan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang dibuatlah usaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan macam-macam aspek dari keterbelakangan. Persoalan keterbelakangan dirumuskan sebagai masalah kekurangan, yaitu kekurangan modal.

Oleh karena itu, para ahli ekonomi pembangunan di negara-negara dunia ketiga memecahkan persoalan keterbelakangannya dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan

mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri) maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri).

Modifikasi dari teori Harrod-Domar terus terjadi. Akan tetapi, prinsipnya sama: kekurangan modal, tabungan dan investasi menjadi masalah utama pembangunan. Salah satu teori yang merupakan modifikasi dari teori ini tecermin pada teori Rostow tentang tingkat pertumbuhan dan tinggal landas. Meskipun ditambahkan bermacam faktor lain, pada intinya Rostow berbicara tentang usaha peningkatan tabungan dan investasi dalam memacu perkembangan sebuah masyarakat untuk mencapai posisi tinggal landas.

E. Max Weber: Etika Protestan

Max Weber adalah sosiolog keenam yang lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt. Ia meninggal pada tahun 1920. Riwayat pendidikannya dimulai di Gymnasiun Berlin- Charlottenburg (1882), sedangkan karier intelektualnya diawali dengan menjadi mahasiswa di Universitas Heidelberg Strassburg Berlin dengan minat utama pada hukum, sejarah, dan teologi (1882-1886).

Pada tahun 1886-1889, ia melaksanakan studi Purna Sarjana di Berlin dalam kapasitasnya sebagai peserta dalam *seminar of professor Ludwig Goldchmidt* tentang hukum dagang dan sebagai peserta di *seminar of August Meitzen* tentang sejarah pertanian. Gelar Ph.D. ia peroleh dari Universitas Berlin dengan judul disertasi, yaitu *The Medieval Commercial Associations*. Banyak waktu yang dihabiskan untuk mengadakan penelitian mengenai peranan agama dan pengaruhnya terhadap etika ekonomi. Dengan singkat, dapat dijelaskan bahwa fokus penelitian Max Weber terletak pada dua fokus utama, yaitu agama yang memengaruhi pandangan hidup manusia dan perubahan sosial ekonomi yang memengaruhi agama. Akan tetapi, dilihat dari semua karyanya, Weber dengan sudut pandang tertentu jauh lebih mementingkan pengaruh agama dan perannya terhadap etika ekonomi.

Karya Max Weber yang sangat terkenal adalah *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* yang terbit pada tahun 1904. Dengan buku ini Max Weber telah mengawali kariernya sebagai sejarawan ekonomi dan ahli sosiologi. Buku yang merupakan langkah pertamanya untuk memasuki bidang sosiologi agama yang membahas masalah hubungan

berbagai kepercayaan keagamaan dan etika praktis, khususnya etika dalam kegiatan ekonomi di kalangan ekonomi masyarakat Barat sejak abad ke-16 hingga sekarang.

Max Weber telah mengakui bahwa ilmu-ilmu sosial harus berkaitan dengan fenomena spiritual atau ideal, sebagai ciri khas dari manusia yang tidak berada dalam jangkauan bidang ilmu-ilmu alam. Akan tetapi, pembedaan yang dilakukan tentang subjek dan objek tidak harus melibatkan pengorbanan objektivitas dalam ilmu-ilmu sosial.

Berbeda dengan Teori Harrod-Domar, teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Max Weber adalah sosiolog Jerman yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Ia membahas bermacam gejala kemasyarakatan, seperti perkembangan bangsa-bangsa di dunia, kepemimpinan, birokrasi, dan sebagainya. Salah satu topik yang penting tentang masalah pembangunan yang dibahas oleh Max Weber adalah peran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pembahasan ini diterbitkan dalam dua buah esai pada tahun 1905 dan 1914, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*.

Dalam bukunya, Weber mencoba menjawab pertanyaan, mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah *Etika Protestan*.

Studi Weber ini merupakan salah satu studi pertama yang meneliti hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Apabila agama kita perluas menjadi kebudayaan, studi Weber ini menjadi perangsang utama bagi munculnya studi tentang aspek kebudayaan terhadap pembangunan. Dalam melakukan penelitian tentang aspek kebudayaan ini, peran agama menjadi sangat penting sebagai salah satu nilai kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat tersebut.

Weber menyebutkan agama adalah salah satu alasan utama perbedaan antara budaya Barat dan Timur. Ia mengaitkan efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi

sosial dan pemikiran agama serta perbedaan karakteristik budaya Barat. Tujuannya adalah menemukan alasan budaya Barat dan Timur berkembang dengan jalur yang berbeda. Weber menjelaskan temuannya terhadap dampak pemikiran agama puritan (Protestan) yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sistem ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat. Tentu saja hal ini ditopang dengan faktor lain, seperti rasionalitas terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran dan yurisprudensi, sistematisasi terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi. Studi agama menurut Weber hanya meneliti satu emansipasi dari pengaruh magis, yaitu pembebasan dari pesona.

Max Weber mengaitkan antara Etika Protestan dan Semangat Kapitalis (*Die Protestan Ethik Under Giest Des Kapitalis*). Tesisnya tentang etika Protestan memengaruhi pertumbuhan ekonomi kapitalis. Hal ini sangat kontras dengan anggapan bahwa agama tidak dapat menggerakkan semangat kapitalisme. Studi Weber tentang kaitan antara doktrin-doktrin agama yang bersifat puritan dengan fakta-fakta sosial terutama dalam perkembangan industri modern telah melahirkan corak dan ragam nilai. Adapun nilai itu menjadi tolok ukur bagi perilaku individu.

Doktrin Calvin(ism) dan Semangat Kapitalisme

Upaya untuk merebut kehidupan yang indah di dunia dengan “mengumpulkan” harta benda yang banyak (kekayaan) material, tidak hanya menjamin kebahagiaan dunia, tetapi juga sebagai media dalam mengatasi kecemasan.

Weber mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai bentuk kebiasaan yang sangat mendukung pengejaran rasionalitas terhadap keuntungan ekonomi. Semangat tersebut telah menjadi kodrat manusia-manusia rasional. Artinya, pengejaran bagi kepentingan pribadi diutamakan daripada memikirkan kepentingan dan kebutuhan kolektif seperti yang dikehendaki oleh Karl Marx.

Menurut Max Weber, cara hidup — yang memiliki ciri-ciri khusus kapitalisme yang dapat mendominasi yang lainnya — merupakan kenyataan yang real ketika masa-masa awal Revolusi Industri. Pada masa Weber, kenyataan-kenyataan itu menjadi sesuatu yang benar-benar nyata dipraktikkan oleh manusia. Hidup harus dimulai

di suatu tempat dan bukan dari individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup lazim bagi keseluruhan kelompok manusia.

F. David McClelland: Dorongan Berprestasi atau *n-Ach*

Sebagai seorang ahli psikologi sosial, McClelland tertarik pada masalah pembangunan karena melihat adanya kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia ini. Ia mempunyai sebuah konsep yang terkenal, yaitu *the need for achievement*, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Konsep ini disingkat dengan sebuah simbol, yaitu *n-Ach*. Orang dengan *n-Ach* yang tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan karena mendapat imbalan dari hasil kerjanya, melainkan karena hasil kerja tersebut dianggap sangat baik. Ada kepuasan batin tersendiri jika ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna, sedangkan imbalan material menjadi faktor sekunder.

Selanjutnya, McClelland mengatakan bahwa jika dalam sebuah masyarakat ada banyak orang yang memiliki *n-Ach* yang tinggi, masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Dari data hasil penilaian ini ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selalu didahului oleh nilai *n-Ach* yang tinggi dalam karya sastra yang ada pada saat itu. Jika karya-karya tersebut menunjukkan nilai *n-Ach* yang rendah, pertumbuhan ekonominya menunjukkan angka yang menurun.

Metode penelitian yang sama digunakan lagi untuk menganalisis pembangunan ekonomi di Spanyol pada abad ke-16, yang kedua pada permulaan Revolusi Industri sekitar tahun 1800-an. Hasilnya ternyata sama, yaitu pertumbuhan ekonomi selalu didahului oleh karya-karya sastra yang mempunyai nilai *n-Ach* yang tinggi. Dari kajian sejarah ini, McClelland semakin yakin bahwa *n-Ach* yang tinggi dalam sebuah masyarakat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tersebut.

Pertanyaan tunggal yang diajukan oleh McClelland dalam penelitiannya ini berkisar pada penentuan kelompok masyarakat mana

yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap proses modernisasi negara-negara dunia ketiga. Bagi David McClelland (1964: 165-178), kaum wiraswastawan domestiklah – dan bukan para politikus atau para penasihat ahli yang didatangkan dari negara maju – yang berperan kritis dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kemajuan negara dunia ketiga.

G. W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan

1. Latar Belakang Teori

Teori pembangunan ekonomi Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Pada mulanya teori ini merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956), kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economics Growth* (1960). Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap:

- a. masyarakat tradisional (*the traditional society*);
- b. prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take off*);
- c. tinggal landas (*the take off*);
- d. menuju kedewasaan (*the drive to maturity*);
- e. masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*).

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi lima tahap tersebut adalah:

- a. karakteristik perubahan keadaan ekonomi;
- b. sosial;
- c. politik yang terjadi.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri. Pembangunan ekonomi berarti pula sebagai proses yang menyebabkan sebagai berikut.

- a. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
- b. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
- c. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah) menjadi investasi yang produktif.
- d. Perubahan sikap hidup dan adat-istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan).

2. *Uraian Mengenai Teori Pembangunan Rostow*

- a. *Masyarakat tradisional*. Pada masyarakat ini, fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif (yang didasarkan pada ilmu dan teknologi Pra-Newton) dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional. Selain itu, tingkat produktivitas pekerja masih rendah sehingga sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini struktur sosialnya bersifat hierarkis, yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil. Maksudnya kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyangnya. Adapun tentang kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa walaupun terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para tuan tanah yang ada di daerah tersebut. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan para tuan tanah di daerah tersebut.
- b. *Tahap prasyarat tinggal landas*. Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai masa transisi untuk mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai dua corak. *Pertama*, tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. *Kedua*, tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang *Born free*, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, yang telah mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara-negara tersebut yang terdiri atas imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap prasyarat tinggal landas.

Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itulah yang akan memungkinkan terjadinya kenaikan tabungan dan penggunaan tabungan itu sebaik-baiknya. Perubahan ini, misalnya kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Di samping itu, ada pula orang-orang yang menggunakan penemuan baru tersebut untuk memodernisasi cara produksi dan harus didukung pula dengan adanya kelompok masyarakat yang menciptakan tabungan dan meminjamkan kepada wiraswasta yang inovatif untuk meningkatkan produksi dan menaikkan produktivitas.

Rostow juga menekankan pula bahwa kenaikan tingkat investasi hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan. Kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting pada masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Sementara itu, menurut Rostow, pembangunan prasarana bisa menghabiskan sebagian besar dari dana investasi.

Rostow juga menunjukkan bentuk perubahan dalam kepemimpinan pemerintah dari masyarakat yang mengalami transisi. Untuk menjamin terciptanya pembangunan yang teratur, suatu kepemimpinan baru harus mempunyai sifat nasionalisme yang reaktif, yaitu bereaksi secara positif atas tekanan-tekanan dari negara maju.

- c. *Tahap tinggal landas.* Pada awalnya tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut, tercipta inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar

Rostow mengemukakan tiga ciri utama dan negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu:

- 1) terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari Produk Nasional Bersih (*Net National Product*= NNP);
 - 2) terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (*leading sectors*);
 - 3) terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Di sini juga termasuk kemampuan negara tersebut untuk mengerahkan sumber-sumber modal dalam negeri karena kenaikan tabungan dalam negeri peranannya besar sekali dalam menciptakan tahap lepas landas.
- d. *Tahap menuju kedewasaan.* Menurut Rostow, tahap menuju kedewasaan sebagai masa yang masyarakatnya secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang telah mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini

coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan kebijaksanaan pemerintah. Dalam menganalisis tahap menuju kedewasaan dalam menganalisis karakteristik tahap menuju ke kedewasaan, Rostow menekankan analisisnya pada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sekarang sudah maju. Ia juga menunjukkan bahwa di negara tersebut, jenis sektor pemimpin pada tahap sesudah tinggal landas berbeda dengan yang ada pada tahap tinggal landas. Di Inggris misalnya, industri tekstil yang telah memelopori pembangunan pada tahap tinggal landas telah digantikan oleh industri besi, batu bara, dan peralatan teknik berat. Adapun di Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman pembangunan jaringan jalan kereta api yang memegang peranan penting pada tahap tinggal landas telah digantikan oleh industri baja dan industri peralatan berat pada tahap menuju kedewasaan.

Selanjutnya, Rostow mengemukakan pula karakteristik non-ekonomis dari masyarakat yang telah mencapai tahap menuju kedewasaan sebagai berikut. (1) Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanian menurun. (2) Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan peranan manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. (3) Kritik-kritik terhadap industrial mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi.

- e. *Tahap konsumsi tinggi.* Tahap ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi pada masalah produksi. Pada tahap ini ada tiga macam tujuan masyarakat (negara), yaitu: (1) memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain; (2) menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapat yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif; (3) meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi pula

barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

H. Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non-Ekonomi

Hoselitz membahas faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan oleh Rostow, dalam karyanya yang terkenal, *Economic Growth and Development Noneconomic Factors in Economic Development*. Faktor non-ekonomi ini disebut oleh Hoselitz sebagai faktor kondisi lingkungan yang dianggap penting dalam proses pembangunan. Persoalan yang ditanyakan oleh Hoselitz adalah Rostow membuat perbedaan tingkat investasi (yaitu, rasio antara pembentukan modal neto terhadap produksi nasional neto) lepas landas, dan sedang memasuki tahap revolusi industri. Mengapa ekonomi memiliki kesanggupan untuk menabung dan melakukan investasi sebagian besar dari pendapatannya, terutama apabila dia tidak pernah bisa melakukannya untuk jangka waktu yang lama?

Selanjutnya, Hoselitz menamakan perubahan kelembagaan yang akan mendukung proses lepas landas ini sebagai hadiah dari masa lampau yang sangat penting artinya. Ia menekankan bahwa meskipun orang sering menunjukkan bahwa masalah utama pembangunan adalah kekurangan modal (dalam teori Harrod-Domar), ada masalah lain juga yang sangat penting, yaitu adanya keterampilan kerja tertentu, termasuk tenaga wiraswasta yang tangguh. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan kelembagaan pada masa sebelum lepas landas, yang akan memengaruhi pemasokan modal, agar modal ini bisa menjadi produktif. Perubahan kelembagaan ini menghasilkan tenaga wiraswasta dan administrasi, serta keterampilan teknis dan keilmuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, bagi Hoselitz, pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur berikut.

1. Pemasokan Modal Besar dan Perbankan

Pemasokan modal dalam jumlah yang besar ini, seperti yang diuraikan Rostow, membutuhkan lembaga-lembaga yang mampu menggerakkan tabungan masyarakat dan menyalurkannya pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Hoselitz menyebutkan lembaga ini adalah lembaga perbankan yang efektif. Pengalaman di negara-negara Eropa dalam menjalankan proses lepas landas menunjukkan

pentingnya lembaga perbankan. Tanpa lembaga tersebut, modal besar yang ada sulit dikumpulkan sehingga bisa menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan pembangunan.

2. Pemasokan Tenaga Ahli dan Terampil

Tenaga yang dimaksud adalah tenaga kewiraswastaan, administrator profesional, insinyur, ahli ilmu pengetahuan, dan tenaga manajerial yang tangguh. Di samping itu, disebutkan juga perkembangan teknologi dan sains harus sudah melembaga sebelum masyarakat tersebut melakukan lepas landas. Inilah yang menjadi pengalaman di negara-negara Eropa.

I. Alex Inkeles dan David H. Smith: Manusia Modern

Alex Inkeles dan David Smith juga berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekadar perkara pemasokan modal dan teknologi, melainkan juga membutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut agar menjadi produktif. Untuk ini, dibutuhkan apa yang disebut Inkeles sebagai manusia modern.

Dalam buku Inkeles dan Smith yang terkenal, *Becoming Modern*, disebutkan ciri-ciri manusia modern, yang meliputi hal-hal, seperti keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, mempunyai kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya, dan sebagainya.

Untuk tujuan buku ini, yang lebih penting adalah teori Inkeles dan Smith tentang proses pembentukan manusia modern. Pada awalnya, mereka menyatakan manusia bisa diubah secara mendasar setelah ia menjadi dewasa sehingga tidak ada manusia yang tetap menjadi manusia tradisional dalam pandangan dan kepribadiannya hanya karena ia dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang tradisional. Artinya, dengan memberikan lingkungan yang tepat, setiap orang bisa diubah menjadi manusia modern setelah ia mencapai usia dewasa.

Dari hasil penelitiannya, Inkeles dan Smith menjumpai bahwa pendidikan adalah hal yang paling efektif untuk mengubah

manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Kemudian, pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media massa merupakan cara kedua yang efektif. Penemuan ini mendukung pendapat Daniel Lerner yang menekankan pentingnya media massa sebagai lembaga yang mendorong proses modernisasi.

Inkeles dan Smith menekankan faktor pengalaman kerja, terutama pengalaman kerja di pabrik, sebagai faktor yang berperan besar dalam mengubah manusia tradisional menjadi modern. Dengan kata lain, seorang manusia tradisional bisa diubah menjadi manusia modern apabila bisa diterjunkan dalam lembaga-lembaga kerja yang modern.

Ada banyak variasi dari teori yang tergabung dalam kelompok teori modernisasi. Teori-teori yang diuraikan di atas hanya beberapa teori yang dianggap mewakili beberapa pemikiran aliran teori modernisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Teori yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi. Teori ini dikembangkan oleh para ekonom, yang salah satunya Teori Harrod-Domar.
2. Teori yang menekankan aspek *psikologi individu*. Teori McClelland dengan konsep *n-Ach*-nya dapat dianggap mewakili aliran ini. Bagi McClelland, mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan *n-Ach* yang tinggi. Cara pembentukannya melalui pendidikan individual pada masa anak-anak di lingkungan keluarga mereka. Jika manusia wiraswasta ini dapat dibentuk dalam jumlah yang banyak, proses pembangunan dalam masyarakat tersebut akan menjadi kenyataan.
3. Teori yang menekankan *nilai-nilai budaya*. Sumber aliran teori ini adalah teori Weber tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme. Nilai-nilai masyarakat, antara lain yang melalui agama, mempunyai peran dalam memengaruhi tingkah laku individu. Apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diarahkan pada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, proses pembangunan dalam masyarakat tersebut dapat terlaksana.

4. Teori yang menekankan adanya lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai. Contoh teori ini adalah teori Rostow (menekankan pada proses lepas landas) dan Hoselitz (membicarakan lembaga-lembaga yang diperlukan menjelang lepas landas). Berbeda dengan Weber yang menekankan nilai-nilai, Hoselitz menekankan lembaga-lembaga yang konkret. Lembaga-lembaga politik dan sosial ini diperlukan untuk menghimpun modal yang besar serta memasok tenaga teknis, tenaga wiraswasta dan teknologi.
5. Teori yang menekankan *lingkungan material*, yaitu lingkungan pekerjaan, sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. Inkeles dan Smith berbicara tentang persoalan ini. Berbeda dengan McClelland yang menekankan pendidikan dalam arti "manipulasi" mental anak didik, Inkeles dan Smith menekankan bahwa perubahan dicapai secara langsung memberikan pengalaman kerja. Di sini bukan "manipulasi" mental yang digunakan sebagai instrumen pengubah, melainkan pengalaman kerja yang dialami secara nyata oleh buruh yang mengubah sikap dan tingkah lakunya. Inkeles dan Smith juga menyatakan bahwa pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk membentuk manusia modern.

Perbedaan pada teori-teori ini hanyalah perbedaan penekanan aspek yang dianggap penting, baik dalam menciptakan manusia yang akan membangun maupun dalam mempersiapkan sarana material untuk pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, inti dari teori-teori ini sama. Dengan demikian, ciri umum dari teori modernisasi adalah sebagai berikut.

1. Teori ini didasarkan pada dikotomi antara modern dan tradisional. Modern merupakan simbol dari kemajuan, pemikiran yang rasional, cara kerja yang efisien, dan seterusnya. Dengan demikian, masyarakat modern dianggap sebagai ciri dari masyarakat di negara-negara industri maju. Sebaliknya, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berpikir yang irasional serta cara kerja yang tidak efisien. Ini merupakan ciri masyarakat pedesaan yang didasarkan pada usaha pertanian di negara-negara miskin.

2. Teori modernisasi juga didasarkan pada faktor-faktor nonmaterial sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor-faktor ini menjelma dalam alam psikologi individu, atau nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi penduduk dalam memberikan arah pada tingkah lakunya. Faktor-faktor non-material atau ide ini dianggap sebagai faktor yang mandiri, yang bisa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dengan dunia ide yang lain. Dalam perkembangannya, ada teori yang juga menekankan aspek kondisi material, seperti teori Hoselitz (menekankan pembentukan lembaga-lembaga yang menunjang proses modernisasi), atau Inkeles dan Smith (menekankan lingkungan kerja sebagai cara untuk menciptakan manusia modern). Teori-teori ini memang merupakan teori peralihan ke teori struktural meskipun persoalan yang dibahas berlainan.
3. Teori modernisasi biasanya bersifat ahistoris dan hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal. Ia dapat diberlakukan tanpa memerhatikan faktor waktu ataupun faktor tempat. Misalnya, tentang prinsip rasionalitas atau efisiensi. Teori-teori ini beranggapan bahwa prinsip ini bisa diberlakukan kapan saja dan di mana saja. Konteks masyarakat dan perkembangan masyarakat tersebut sepanjang sejarah kurang dapat mendapat perhatian. Ada anggapan bahwa masyarakat bergerak secara garis lurus atau *unilinier*, dari sesuatu yang irasional menjadi rasional. Misalnya, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Gejala ini dianggap sebagai suatu yang universal, yang berlaku pada masyarakat mana pun, pada segala waktu. Masyarakat yang belum modern adalah masyarakat yang terbelakang, sesuai dengan perkembangan dalam garis lurus tersebut. Pada saatnya, apabila sudah sampai waktunya, masyarakat ini pada akhirnya akan menjadi modern, seperti yang dialami oleh negara-negara Eropa.
4. Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari di dalam negara-negara yang bersangkutan, bukan di luarnya. Misalnya, kurangnya pendidikan pada sebagian besar penduduknya, adanya nilai-nilai budaya lokal yang kurang menghargai kekayaan material, dan sebagainya.

Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal negara-negara yang bersangkutan.

Penelitian lain dari teori modernisasi klasik yang juga sangat populer dijumpai pada proyek penelitian yang dikerjakan oleh Inkeles, yang melahirkan berbagai buku dan artikel tentang ide “manusia modern”. Untuk keperluan ini, Inkeles memusatkan perhatian pada usaha untuk mencari jawaban dari dua pertanyaan pokok yang telah ia rumuskan. *Pertama*, apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup seseorang. *Kedua*, apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan masa sebelumnya, jika mereka berinteraksi dengan negara Barat yang telah memiliki sikap dan pandangan hidup modern terlebih dahulu.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, Inkeles seperti juga McClelland, melakukan penelitiannya di berbagai negara, seperti Argentina, Chili, India, Israel, Nigeria, dan Pakistan. Negara-negara ini dipilih karena dikategorikan pada skala modernisasi yang berbeda, sejak negara bukan industri ke negara industri, dan sejak negara otoriter ke negara demokratis.

Untuk mendukung program itu, Inkeles mewawancarai 6.000 anak muda yang dipilih dari berbagai kategori, seperti petani, kaum migran, pekerja perkotaan sektor bukan industri, pekerja perkotaan pada sektor industri, dan pelajar.

Dari seluruh rangkaian penelitiannya, Inkeles menemukan kenyataan tentang adanya pola yang stabil dari apa yang disebut manusia modern di berbagai negara tersebut. Dengan kata lain, kriteria yang digunakan untuk menentukan batasan modernitas manusia di satu negara tertentu juga dapat digunakan (berlaku) untuk menentukan batasan manusia modern di negara lain. Untuk ini, Inkeles membuat skala dari nol sampai 100 untuk mengatur pola stabil dari pribadi manusia modern.

Menurut Inkeles, manusia modern memiliki berbagai karakteristik pokok berikut:

1. terbuka terhadap pengalaman baru, yaitu selalu berkeinginan untuk mencari sesuatu yang baru;

2. memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional, seperti orangtua, kepala suku (etnis), dan raja;
3. percaya terhadap ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta;
4. memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Mereka berkehendak untuk meneliti tangga jenjang pekerjaannya;
5. memiliki rencana jangka panjang. Mereka selalu merencanakan sesuatu jauh di depan dan mengetahui apa yang mereka capai dalam waktu lima tahun ke depan;
6. aktif terlibat dalam percaturan politik. Mereka bergabung dengan berbagai organisasi kekeluargaan dan berpartisipasi aktif dalam urusan masyarakat lokal.

Inkeles tidak memfokuskan ciri-ciri tersebut menjadi pertanyaan futuristik, yaitu apa yang membuat manusia modern merumuskan faktor-faktor pokok yang mengakibatkan manusia negara dunia ketiga mampu menyerap nilai dan pranata sosial modern. Dari pertanyaan itu muncul pokok-pokok pikiran berikut. *Pertama*, pendidikan merupakan faktor terpenting yang mencirikan manusia modern. Satu tahun pendidikan mampu menaikkan dua sampai tiga poin skala modernisasi dari nol sampai seratus. Lebih jauh, bahwa kurikulum teknis seperti matematika, kimia, biologi, bukan merupakan faktor yang bertanggung jawab terhadap penyerapan nilai dan pembentukan manusia modern. Bagi Inkeles, justru kurikulum informal, seperti kecenderungan tenaga pengajar pada nilai-nilai Barat, pemakaian buku-buku Barat, dan melihat film-film Barat membantu penyerapan nilai-nilai modern. *Kedua*, jenis pekerjaan yang diukur dari satuan pekerjaan pabrik, memiliki pengaruh independen terhadap pembentukan nilai-nilai modern. Jika terjadi keterlambatan sosialisasi karena, misalnya seseorang tidak mengalami pendidikan formal, orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk menjadi manusia modern jika ia bekerja pada pabrik yang berskala besar.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan pengujian, apakah ada akibat ketegangan psikologis dari manusia negara dunia ketiga setelah mengalami modernisasi? Menurut Inkeles, negara dunia ketiga memiliki kecenderungan untuk menonjolkan akibat negatif

modernisasi, seperti pada organisasi sosial, demoralisasi kepribadian, penyimpangan kepribadian, dan alienasi. Secara khusus, penekanan akibat negatif modernisasi ini terlihat jelas pada teori fungsionalisme dari Persons yang lebih memilih pada cara perubahan sosial negara dunia ketiga dengan lambat, tetapi terus-menerus daripada perubahan sosial yang cepat dan mendadak. Sekalipun demikian, menurut Inkeles, dengan mendasarkan diri pada tes *Psychosomatic Symptombya*, ia tidak mempunyai indikator akan adanya perbedaan ketegangan psikologis antara manusia modern dan tidak modern di dunia ketiga.

Oleh karena itu, Inkeles menyimpulkan bahwa modernisasi tidak akan mengakibatkan munculnya ketegangan psikologis dari manusia negara dunia ketiga. Dengan kata lain, manusia modern tidak akan menunjukkan gejala yang lebih besar daripada manusia tidak modern dari ketegangan atau penyakit psikologis lainnya yang mungkin dialami.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah memungkinkan setiap orang untuk mencapai suatu taraf hidup yang layak. Akan tetapi, tidak seorang pun kemajuan suatu negara atau bangsa harus diukur berdasarkan Penghasilan Nasional Kotor dan penghasilan per kapita. Pembangunan juga mencakup ide pendewaan politik, seperti yang tampak dalam suatu proses pemerintahan yang stabil dan teratur berdasarkan keinginan yang dinyatakan rakyat.

BAB 4

TEORI KETERGANTUNGAN (*DEPENDENCY THEORY*)

A. Pendahuluan

Teori ketergantungan mempunyai keterkaitan erat dengan kajian wilayah atau ilmu geografi. Hal itu disebabkan dalam teori ketergantungan dibahas keadaan dan hubungan antara dua kelompok negara yang pada dasarnya merupakan hubungan antara dua "region". Teori ketergantungan pada dasarnya menggunakan pendekatan struktural sehingga dapat digolongkan dalam kelompok teori struktural. Menurut teori struktural, kemiskinan yang terdapat pada negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan pada produksi pertanian merupakan akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, bahwa yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah. Menurut teori struktural, perdagangan dunia yang bebas justru merupakan ajang praktik eksploitasi.

Teori struktural lebih meningkatkan pada lingkungan material manusia, yaitu organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material manusia, termasuk perubahan teknologi (Arif Budiman, 2000: 44). Dengan demikian, dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan gejala atau proses sosial yang terjadi, teori struktural mencari faktor-faktor lingkungan material manusia sebagai penyebabnya.

Teori ketergantungan yang merupakan salah satu teori kelompok teori struktural lahir dari dua induk. *Pertama*, teori-teori tentang imperialisme dan kolonialisme, baik Marxis maupun bukan Marxis. *Kedua*, datang dari studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran, baik dari Marxis maupun dari Paul Prebisch.

B. Sejarah Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan atau disebut juga teori dependensi muncul pertama kali di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh *United Nation Economic Commission for Latin America (ECLA)* pada masa awal tahun 1960-an (Mansour Fakih, 2009: 43). Tujuan pembentukan lembaga tersebut adalah menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa. Teori dependensi juga lahir atas respons ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neo-marxisme inilah yang menopang keberadaan teori dependensi ini.

Teori ketergantungan sering dikaitkan dengan Marxisme sehingga disebut juga Neo-Marxisme. Pada umumnya teori ketergantungan diidentikkan dengan Marxisme karena Marxisme dan teori ketergantungan sama-sama menolak kapitalisme. Padahal, teori ketergantungan memiliki sedikit perbedaan dengan Marxisme, yaitu dalam hal metamorfosis perubahan jenis masyarakat. Marxisme yang dilahirkan oleh Karl Marx memiliki teori bahwa pada masa depan, ketika kapitalisme mencapai titik jenuh, masyarakat dunia akan bertransformasi menjadi masyarakat sosialis dunia. Akan tetapi, sebelum itu, ada beberapa tahapan masyarakat yang harus dicapai terlebih dahulu. Titik tolak pemikiran Karl Marx berawal dari kenyataan masyarakat Eropa yang feodal, kemudian secara alamiah bertransformasi menjadi masyarakat kapitalis. Lalu, melalui imperialisme, kapitalisme menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan seluruh negara di dunia menjadi negara kapitalis yang maju. Setelah itu, masyarakat sosialis dunia akan terwujud (Franz Magnis Suseno, 2001: 56).

Berbeda dengan Karl Marx, para penganut teori ketergantungan menganggap bahwa teori Marx tidak terbukti. Teori Marx hanya benar sampai pada tahap imperialisme. Masyarakat di luar Eropa yang telah tersentuh oleh kapitalisme justru menjadi semakin terbelakang. Pada akhirnya kapitalisme hanya menghasilkan dua jenis negara, yaitu negara maju dan negara terbelakang (Arif Budiman, 2000: 61).

Pada perkembangannya teori ketergantungan mengalami perubahan. Melalui berbagai kritik dari kaum liberal, teori ketergantungan terus mengalami penyempurnaan. Berikut ini teori-teori ketergantungan yang diurutkan berdasarkan sejarahnya (perkembangannya), sebagaimana dijelaskan oleh Arif Budiman (2000: 41-70).

1. Raul Presbich: Industri Substitusi Impor

Raul Presbich adalah seorang ekonom liberal yang pada awalnya membuat penelitian di negara-negara Amerika Latin. Penelitian Presbich terfokus pada satu perhatian utama, yaitu mengapa negara-negara yang melakukan spesialisasi di bidang industri menjadi negara-negara kaya, sedangkan mereka yang memilih bidang pertanian tetap miskin?

Presbich menganggap bahwa kenyataannya negara-negara pertanian selalu berada dalam kondisi terbelakang dan miskin, negara-negara industri adalah *negara pusat*, dan negara-negara pertanian adalah *negara pinggiran*. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai tukar dari komoditas pertanian terhadap komoditas industri yang mengakibatkan terjadinya defisit yang kian lama kian membesar pada neraca perdagangan negara pertanian dengan negara industri.

Sebab kedua negara pertanian selalu terbelakang adalah disebabkan oleh proteksi negara industri terhadap negara-negara pertanian. Proteksi tersebut dilakukan dengan beragam cara, yang salah satunya adalah dengan memberlakukan subsidi bagi petani dalam negeri di negara industri.

Untuk itu, Presbich menawarkan sebuah strategi baru yang dinamakan strategi "Industrialisasi Substitusi Impor". Pada intinya teori ini mengatakan bahwa apabila negara pertanian ingin maju, negara-negara tersebut harus melakukan industrialisasi juga, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju sebelumnya.

Presbich menganjurkan agar setiap komoditas yang diimpor dari luar negeri diproduksi dari dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap negara industri semakin berkurang. Apabila kebijakan ini diambil, pemerintah harus campur tangan terhadap industri dalam negeri dengan cara melindungi produk dalam negeri dari produk-produk impor dalam bentuk pembatasan kuota dan pemberlakuan tarif impor (Leo Agustino, 2000: 71-75).

Selanjutnya, apabila industrialisasi substitusi impor berhasil, Presbich mengemukakan strategi Industrialisasi Orientasi Ekspor (IOE). Dalam strategi ini mesin pertumbuhan dititikberatkan pada kegiatan yang memacu ekspor barang komoditas yang diproduksi dalam negeri. Untuk menjamin IOE yang efisien dan efektif, ada dua kaitan yang harus dipertimbangkan secara cermat. *Pertama*, kaitan antara promosi ekspor dan penetrasi impor. *Kedua*, kaitan antara diversifikasi dan spesialisasi ekspor. Negara yang telah menerapkan strategi ini di antaranya adalah Cina dan Korea Selatan.

Meskipun demikian, Presbich tidak menghendaki ekonomi diatur sepenuhnya oleh negara, seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Pada dasarnya Presbich adalah seorang liberalis. Dengan demikian, mungkin Presbich telah banyak dipengaruhi oleh John Maynard Keynes yang mengajarkan teori kapitalisme negara.

2. *Paul Baran: Sentuhan yang Mematikan dan Kretinisme*

Paul Baran adalah seorang Marxis yang menolak pandangan Marx mengenai pembangunan dunia ketiga. Negara dunia pertama adalah negara maju yang menganut sistem kapitalis. Negara dunia kedua adalah negara-negara penganut sistem sosialis, yang pada umumnya adalah negara-negara bekas Uni Sovyet. Adapun negara dunia ketiga adalah negara-negara berkembang yang mulanya adalah negara-negara jajahan. Menurut Baran, ketika dunia ketiga disentuh oleh kapitalisme, yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran. Argumennya adalah bahwa kapitalisme internasional yang ada pada hari ini berbeda jenis dengan kapitalisme di Eropa. Kapitalisme yang datang ke negara-negara pinggir (dunia ketiga) adalah kapitalisme yang membawa penyakit kretinisme. Kapitalisme jenis ini merupakan jenis lain yang harus dipelajari tersendiri.

Selanjutnya, Baran menyatakan bahwa negara-negara dunia ketiga yang pada dasarnya feodal dengan sendirinya akan maju menjadi negara kapitalis tanpa disentuh oleh kapitalis internasional, sebagaimana yang terjadi di Jepang.

Untuk menjelaskan cara kapitalisme merusak dunia ketiga, Baran mengklasifikasikan kelompok ekonomi di dunia ketiga:

- a. *tuan tanah* yang kaya, yang juga menjadi produsen dan eksportir produk pertanian;
- b. *pedagang*, awalnya terbatas di dalam negeri saja, tetapi dengan masuknya orang asing, mereka bekerja sama dengan orang asing tersebut;
- c. kaum *industrialis lokal*;
- d. *orang asing* yang mencari buruh dan bahan-bahan mentah yang murah sekaligus menjual produk industri mereka;
- e. *pemerintah lokal* yang otoriter;
- f. *rakyat jelata* yang umumnya adalah petani.

Kedatangan orang asing yang membawa produk-produk industri negara maju pada dasarnya menguntungkan kelas tuan tanah dan pedagang. Kelas tuan tanah merasa dimanjakan oleh produk-produk industri maju, sedangkan kelas pedagang menjadi distributor lokal dari produk-produk impor. Sebaliknya, dengan datangnya produk-produk impor, kaum industrialis terancam sebab mereka tidak bisa menyaingi kualitas dan harga dari produk impor, serta kekuatan modal pihak asing. Usaha mereka meminta bantuan proteksi ke pemerintah sia-sia sebab pemerintah dikendalikan oleh kelas tuan tanah yang berpihak terhadap orang-orang asing. Selain itu, pemerintah dan tuan tanah juga merupakan konsumen setia dari produk industri yang memanjakan gaya hidup mereka. Kemudian, efek politis yang diterima masyarakat adalah lahirnya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada pihak-pihak asing serta merugikan rakyat kebanyakan.

Sementara produk-produk lokal mati, rakyat pada umumnya tidak dapat membeli produk impor. Rakyat kebanyakan yang umumnya berpendidikan rendah tidak mengerti dengan situasi yang tengah terjadi, apalagi untuk memprotes. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan oleh negara berkembang hanyalah menjadi produsen

produk pertanian dan bersikap konsumtif terhadap barang-barang impor. Seiring dengan berjalannya waktu, nilai tukar mata uang lokal pun merosot disebabkan rendahnya permintaan dari negara-negara maju. Sebaliknya, harga komoditas produk impor terus meningkat. Dengan masuknya modal asing ke negara dunia ketiga, yang terjadi bukanlah akumulasi modal, melainkan penyusutan modal. Dalam kasus di Indonesia, penelitian Sritua Arief menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1973-1990, nilai kumulatif investasi asing yang masuk ke Indonesia berjumlah US\$ 5,775 miliar, dan diiringi kumulatif keuntungan investasi yang direpatriasi dari Indonesia dengan jumlah US\$ 58,859 miliar. Artinya, setiap US\$ 1 yang masuk akan diiringi US\$ 10,19 yang keluar dari Indonesia.

3. *Andre Gunder Frank: Pembangunan Keterbelakangan*

Andre Gunder Frank adalah murid Raul Presbich, ekonom Amerika yang menjadi sepakat dengan hasil penelitian Presbich, ia menyimpulkan bahwa hubungan negara pusat dan negara pinggiran (yang selanjutnya oleh Frank disebut negara satelit) adalah hubungan yang tidak sehat. Frank meyakini bahwa keterbelakangan yang terjadi di negara satelit bukanlah proses alamiah, melainkan akibat langsung dari kapitalisme negara pusat (yang selanjutnya oleh Frank disebut negara metropolis). Agak berbeda dengan Presbich yang membicarakan teori ketergantungan dari perspektif ekonomi (ketimpangan nilai tukar), Frank lebih menyoroti aspek-aspek politis dari interaksi ekonomi di negara satelit. Pada teori Frank terdapat tiga komponen utama, yaitu:

- a. modal asing;
- b. pemerintah lokal;
- c. borjuasi lokal (yang oleh Baran disebut kelas tuan tanah dan pedagang).

Pembangunan di negara satelit hanya terjadi dalam lingkaran ketiga komponen di atas. Rakyat yang hanya menjadi buruh dirugikan. Dengan adanya ketiga komponen tersebut dapat dilihat ciri-ciri dari perkembangan kapitalisme di negara satelit.

- a. Kehidupan ekonomi yang bergantung (seperti yang telah diungkapkan Baran sebelumnya, yaitu ketergantungan terhadap barang impor).
- b. Terjadinya kerja sama antara modal asing, pemerintah lokal, dan borjuasi lokal yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat banyak.
- c. Terjadinya ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Melihat kenyataan ini, Frank menolak teori Marxis mengenai tahapan masyarakat. Menurut Frank, di negara satelit tidak akan pernah terwujud masyarakat kapitalis yang utuh sebab kapitalisme yang ada di negara satelit bukanlah kapitalisme alamiah, melainkan kapitalisme berpenyakit yang mengisap kekayaan negara-negara satelit. Oleh karena itu, Frank menawarkan bentuk revolusi yang langsung menuju masyarakat sosialis. Bagi Frank, tahapan masyarakat kapitalis di negara satelit tidak dapat terwujud karena kuatnya pengaruh atau campur tangan kapitalisme asing.

4. *Theotonio Dos Santos*

Walaupun sama-sama penganut teori ketergantungan, Theotonio Dos Santos tidak sepenuhnya sepakat dengan pendapat Frank. Dos Santos sepakat dengan ide negara metropolis dan negara satelit yang hanya menjadi bayangan dari negara metropolis. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa negara satelit pun dapat berkembang, walaupun perkembangan itu masih bergantung ke negara metropolis. Ketergantungan menurut Dos Santos adalah:

Keadaan pada masa ketika kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dan negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat. Hubungan saling bergantung antara dua sistem ekonomi atau lebih, dan hubungan antara sistem ekonomi ini dan perdagangan dunia, menjadi hubungan ketergantungan apabila ekonomi beberapa negara (yang dominan) bisa berekspansi dan mampu berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara-negara lainnya (yang bergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif (Arif Budiman, 2000: 66).

Sumbangan Dos Santos yang lainnya adalah uraian yang lebih terperinci mengenai bentuk-bentuk ketergantungan sebagai berikut.

- a. *Ketergantungan kolonial*, selain mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk diekspor ke negara asal kolonialis, ketergantungan ini pun mendominasi secara politik, sosial, dan budaya. Ketergantungan ini merupakan bentuk penjajahan secara langsung. Penduduk setempat tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan keinginannya. Bahkan, para kolonialis tersebut mengklaim bahwa daerah jajahan tersebut merupakan hak miliknya.
- b. *Ketergantungan finansial-industrial*, walaupun negara satelit secara politis telah merdeka, kegiatan ekspor bahan mentah (SDA) untuk negara metropolis masih tetap berlangsung. Ekonomi negara satelit masih dikendalikan oleh kekuatan finansial dan industrial yang kuat dari negara-negara metropolis.
- c. *Ketergantungan teknologis-industrial*, ini merupakan bentuk ketergantungan terbaru. Kegiatan ekonomi di negara satelit tidak lagi ekspor bahan mentah, tetapi industri yang ada di negara metropolislah yang dipindahkan ke negara satelit. Hal ini semata-mata dilakukan demi efisiensi bisnis. Biaya distribusi menjadi lebih murah, harga buruh sangat murah, serta pangsa pasar yang melimpah di negara satelit itu sendiri.

Salah satu kritik terhadap teori ketergantungan dalam tataran praktis adalah munculnya *New Industrial Countries* (NICs) atau negara industri baru yang berhasil, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong (sebelum bergabung kembali dengan Cina), dan Singapura. Peter Evans, sosiolog asal Amerika, yang juga penganut teori ketergantungan, menjelaskan bahwa pembangunan yang terjadi di NICs merupakan bentuk baru dari ketergantungan yang disebut *dependent-development*. Menurutnya, kemajuan industri yang terjadi di negara satelit masih tetap bergantung pada negara pusat sebab seluruh kebijakan industrial di negara satelit dipegang oleh negara pusat. Selain itu, melalui peraturan mengenai Hak Cipta, penguasaan dan penggunaan teknologi di negara satelit masih tetap dibatasi. Jadi, semaju apa pun NICs, menurut Evans, semuanya masih berada dalam koridor apa yang “diinginkan” oleh negara pusat (Arif Budiman, 2000: 76-79).

C. Negara Dunia Ketiga

“Dunia Ketiga” adalah istilah yang pertama kali diciptakan Alfred Sauvy, seorang ekonom dan demografer Prancis dalam sebuah artikelnya yang terbit dalam majalah Prancis *L’Observateur*, tanggal 14 Agustus 1952 (Ratna Sukmayani dkk., 2008: 11).

Pada awalnya istilah “dunia ketiga” digunakan untuk menyebut negara-negara yang tidak bersekutu dengan Blok Barat ataupun Blok Soviet yang sedang berkonfrontasi selama masa Perang Dingin. Sauvy menggunakan istilah “dunia ketiga” untuk menyebut negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Amerika Latin, Afrika, Oseania, dan Asia yang tidak bersekutu dengan Blok Barat atau Blok Kapitalis (disebut juga Blok NATO) selama Perang Dingin (1945-1989). Itu berarti negara dunia ketiga adalah negara yang tidak termasuk Blok Barat. Negara yang masuk dan menjadi anggota Blok Barat disebut sebagai negara “dunia pertama”. Negara “dunia kedua” adalah negara yang menjadi anggota Blok Timur (Pakta Warsawa) atau Blok Komunis. Istilah-istilah ini dipakai pasca-Perang Dunia II dan terus mewarnai percaturan politik dunia selama masa Perang Dingin.

Saat ini istilah “dunia ketiga” digunakan untuk menyebut semua negara yang masuk dalam kategori “negara berkembang” (*developing country*), tanpa meninjau aliansi geopolitiknya. Dalam pemikiran Sauvy, “dunia ketiga” dihubungkan dengan “golongan ketiga” atau *tiers etat* dalam hierarki kekuasaan Prancis sebelum dan selama revolusi. Golongan ketiga dilawankan dengan “golongan kedua” (para biarawan) dan “golongan pertama” (para bangsawan) yang memiliki berbagai hak istimewa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dunia ketiga tidak hanya memiliki hak-hak yang sangat terbatas dan dibatasi, tetapi juga dieksploitasi untuk kepentingan dunia pertama. Praktik penjajahan, baik sebelum perang dunia ketiga maupun setelahnya menunjukkan kebenaran pemahaman Sauvy ini.

Negara-negara dunia ketiga umumnya berada di bawah penjajahan bangsa Eropa. Keadaan ekonomi di negara-negara dunia ketiga sangat terbelakang. Hal ini disebabkan berbagai sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan negara-negara dunia pertama atau penjajah. Setelah Perang Dunia II pun negara-negara Barat (dunia pertama) dan negara-negara komunis (dunia kedua) berusaha dan bersaing menguasai negara-negara dunia ketiga. Oleh sebab itu,

negara-negara dunia ketiga sering disebut sebagai negara-negara non-blok (*Non Align Countries*).

Istilah dunia ketiga (tidak termasuk Cina karena secara politik masuk menjadi anggota Blok Komunis) muncul pertama kali secara politik dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Pada saat inilah negara-negara Asia-Afrika yang tidak masuk dalam Blok Barat (dunia pertama) maupun Blok Timur (dunia kedua) mendeklarasikan diri sebagai negara-negara non-blok. Sejak saat inilah dunia ketiga identik dengan non-blok. Belakangan muncul istilah “dunia keempat” untuk menyebut negara-negara yang tidak berkembang dalam sektor industri dan menggantungkan hidup hanya dari sektor pertanian. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut negara-negara yang masyarakatnya masih hidup secara tradisional dan berpindah-pindah (nomaden) dan negara yang dikategorikan sebagai negara gagal (*failed countries*).

Pembangunan yang terjadi di negara dunia ketiga pada umumnya bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan dari berbagai bidang, terutama bidang ekonomi karena pembangunan di negara dunia ketiga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu dari kedua hal tersebut dipengaruhi oleh pendapatan yang kurang sehingga menyebabkan banyaknya rakyat miskin di negara tersebut.

Negara Berkembang

Pada perkembangan selanjutnya, istilah “dunia ketiga” digunakan untuk menyebut semua negara yang masuk dalam kategori “negara berkembang” (*developing country*), dunia ketiga pun dieksploitasi untuk kepentingan dunia pertama. Negara berkembang digunakan untuk menjelaskan dan mengategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita (Ratna Sukmayani dkk., 2008: 3). Suatu negara dikategorikan sebagai negara berkembang jika negara tersebut belum mencapai tingkat negara maju, tetapi bukan negara gagal (*failed state*).

Dengan kata lain, negara berkembang berada di antara negara maju (tingkat teratas) dengan negara gagal (tingkat terendah). Negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju disebut negara industri baru (*newly industrialized country/NICs*).

Sebagian besar negara di dunia, yaitu sekitar 76% dikategorikan sebagai negara berkembang. Negara-negara tersebut adalah sebagian besar negara di Afrika, Amerika Tengah, dan sebagian negara di Laut Karibia. Termasuk juga negara-negara Arab serta sebagian besar negara Asia Tenggara.

Ratna Sukmayani dkk. (2008: 4-5) menjelaskan beberapa ciri utama negara berkembang, di antaranya:

- a. sebagian besar penduduk (>70%) bekerja pada sektor pertanian;
- b. industrinya berlatar belakang agraris, terutama memanfaatkan hasil kehutanan, pertanian, dan perikanan (industri sektor pertama dan sektor kedua);
- c. tenaga pertanian mengandalkan tenaga kerja manusia;
- d. luas lahan garapan relatif sempit dengan teknologi yang sederhana sehingga hasilnya tidak maksimal;
- e. pendapatan per kapita rendah;
- f. angka kelahiran dan kematian masih tinggi;
- g. tingginya angka pengangguran karena besarnya jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan;
- h. pendidikan formal tersebar secara tidak merata dengan kualitas yang buruk;
- i. kelebihan jumlah penduduk yang menyebabkan tidak terjangkau atau tidak meratanya pelayanan sosial;
- j. kedudukan dan peran wanita sangat terbatas dan cenderung dipandang sebagai kelas dua.

D. Pembangunan di Negara Sedang Berkembang (Dunia Ketiga)

Proses pembangunan yang dilakukan di negara berkembang membutuhkan waktu yang panjang. Model pembangunan di negara sedang berkembang lebih banyak berkiblat pada negara maju, terutama negara Eropa dan Amerika Serikat. Akan tetapi, hasil yang diperoleh tidaklah sama. Bagi negara sedang berkembang, kemajuan yang pesat di Eropa dan Amerika menginspirasi untuk mengikuti segala hal yang dilakukan pada negara tersebut.

Banyak hal yang membedakan hasil pembangunan negara maju dan negara sedang berkembang. Kondisi sosial ekonomi, geografis penduduk dan politik sangat berpengaruh terhadap hasil pembangunan. Bagi negara berkembang, kemajuan di negara Eropa dan Amerika sangat menarik untuk ditelaah dan selalu mencoba untuk bisa diikuti sejaknya.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini, para ahli ekonomi pembangunan menuangkan pemikiran mereka dalam bentuk teori mengenai penghambat pembangunan di negara sedang berkembang atau yang dikenal dengan istilah *Theories of Underdevelopment*. Penghambat pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penghambat dari dalam negeri dan dari luar negeri.

1. Faktor Dalam Negeri

Faktor dalam negeri merupakan faktor penghambat pembangunan yang bersumber dari negara sedang berkembang itu sendiri. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Faktor-faktor dalam negeri yang dapat menjadi penghambat pembangunan adalah sebagai berikut.

Penduduk

Dalam pembangunan, penduduk berperan sebagai penghambat, tetapi juga dapat berperan sebagai pendorong. Hal ini bergantung pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penduduk itu sendiri, yaitu jumlah penduduk, kualitas penduduk, dan distribusi penduduk.

Peran penduduk sebagai faktor pendorong dalam pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak penambahan tenaga kerja dari tahun ke tahun. Dengan demikian, penduduk yang semakin besar merupakan aset dalam persediaan tenaga kerja.
- b. Penduduk sebagai pangsa pasar. Penduduk merupakan konsumen dari hasil produksi. Jumlah penduduk yang besar merupakan konsumen yang potensial. Dengan demikian, besarnya jumlah penduduk dapat menciptakan pasar yang akan memperluas pasar yang ada.

Sebaliknya, peran penduduk sebagai faktor penghambat dalam pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Produktivitas penduduk yang rendah. Di negara berkembang masih banyak penduduk yang terbelakang. Hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah ini dapat dilihat dengan semakin tingginya tingkat pengangguran yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Selanjutnya, dengan semakin rendahnya tingkat pendapatan ini, semakin rendah pula kemampuan untuk melakukan tabungan yang selanjutnya mengakibatkan investasi menjadi rendah.
- b. Distribusi penduduk yang tidak merata. Di negara berkembang jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk hanya terfokuskan pada daerah tertentu, sedangkan daerah lainnya justru kekurangan penduduk atau jumlah sangat sedikit. Sebagai akibatnya dapat mengakibatkan pembagian pendapatan menjadi tidak merata atau timpang.

Dari kedua peran tersebut, penduduk di negara sedang berkembang lebih banyak berperan sebagai penghambat dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar di negara sedang berkembang kurang menguntungkan dalam pembangunan dengan melihat kondisi dan ciri-ciri penduduk yang masih terbelakang, tingginya tingkat pengangguran, tingkat pendapatan per kapita yang rendah, sarana transportasi yang belum baik, kurangnya *skill*, dan

sebagainya lebih banyak menimbulkan hal-hal negatif dalam proses pembangunan ekonomi.

2. *Dualisme*

Dualisme dapat diartikan sebagai adanya dua sistem yang sangat berbeda dan keduanya berwujud secara berdampingan. Jenis-jenis dualisme adalah sebagai berikut.

- a. Dualisme sosial. Profesor Boeke mengatakan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Keduanya berwujud secara berdampingan, tetapi wujud yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang satu modern, sedangkan sistem yang lainnya tradisional. Sistem sosial yang lebih modern ini berasal dari negara-negara Barat.
- b. Dualisme teknologi. Dalam menelaah mengenai dualisme di negara berkembang, Higgins melakukan studi tentang dualisme ini. Ia menekankan pada adanya dualisme di bidang teknologi. Dualisme teknologi adalah teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda coraknya, dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas.
- c. Dualisme finansial. Analisis Myint mengenai pasar melahirkan dualisme finansial yang dapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu: (1) adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna (*organized money market*); (2) adanya pasar uang yang tidak terorganisasi (*unorganization money market*). Pasar uang pertama meliputi bank-bank komersil dan badan-badan keuangan lainnya. Hal ini terutama terdapat di kota-kota besar dan pusat-pusat perdagangan. Adapun pasar uang jenis yang kedua adalah bukan bentuk institusional terdiri atas tuan tanah, pedagang-pedagang perantara. Pasar uang jenis ini sangat menonjol untuk daerah pedesaan yang terkenal dengan renternir dan sistem ijon. Adanya kebutuhan yang mendesak akan uang mengakibatkan cara tersebut yang mudah dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.
- d. Dualisme regional, yaitu ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat ketidakseimbangan ini terjadi jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar-

berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik, misalnya dualisme antara kota dan desa, antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jurang pemisah tersebut jelas kurang menguntungkan bagi pembangunan sebab ada perbedaan yang mencolok antara golongan kaya dan miskin dan perbedaan ini semakin lama semakin melebar dengan distribusi pembagian pemerataan pendapatan menjadi timpang. Di samping itu, kemajuan dalam bidang teknologi juga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja yang ada. Dualisme teknologi melahirkan akibat buruk terhadap lajunya pembangunan dan keharmonisan proses pembangunan.

3. *Lingkaran Perangkap Kemiskinan*

Lingkaran perangkap kemiskinan dikemukakan oleh ahli ekonomi yang bernama Nurske yang memelopori penilaian atas masalah pembentukan modal di negara-negara berkembang. Lingkaran perangkap kemiskinan atau lingkaran kemiskinan atau *The Vicious Circle*, adalah “rangkai kekuatan yang saling memengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan yang menunjukkan suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi”.

Nurske berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, tetapi juga menimbulkan hambatan pada pembangunan pada masa yang akan datang. Menurutnya, penyebab utama lingkaran perangkap kemiskinan adalah adanya hambatan dalam menciptakan tingkat penanaman modal di negara berkembang. Pada pihak lain, tingkat penanaman modal bergantung pada tingkat pembentukan modal. Oleh karena itu, ia menyebutkan tiga penyebab terjadinya lingkaran perangkap kemiskinan ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Dari segi penawaran modal. Dari segi penawaran dapat dinyatakan bahwa tingkat produktivitas masyarakat yang rendah mengakibatkan tingkat pendapatan yang rendah pula sehingga kemampuan untuk menciptakan tabungan menjadi rendah pula. Hal ini menyebabkan tingkat pembentukan modal

menjadi rendah dan berarti negara berkembang kekurangan akan modal.

- b. Dari segi permintaan modal. Kekurangan modal mengakibatkan tingkat produktivitas masyarakat menjadi rendah. Di negara berkembang terdapat corak yang berbeda sehubungan dengan tingkat penanaman modal yang rendah ini, yaitu bahwa tingkat pembentukan modal yang rendah ini disebabkan luas pasar yang sempit. Pasar untuk berbagai jenis barang terbatas dan jumlah penduduk yang besar tidak diikuti adanya daya beli mengakibatkan produksi tidak terserap olah pasar. Rendahnya daya beli ini disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah pula.
- c. *International demonstration effect*, yaitu kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju.

Pola konsumsi ini dapat ditiru dengan adanya impor menjadi semakin besar. Sudah tentu barang impor ini mutunya jauh lebih baik dibandingkan dengan barang dalam negeri. Oleh karena itu, semakin meningkatnya impor, semakin besar pengeluaran. Sebaliknya, kemampuan untuk menabung menjadi berkurang.

Selanjutnya, semakin rendahnya tingkat tabungan, semakin rendah pula tingkat pembentukan modal. Menurutnya, hubungan ekonomi internasional suatu negara akan sangat menguntungkan negara-negara yang relatif miskin. Hubungan tersebut memungkinkan suatu negara yang lebih miskin menyadari dan selanjutnya mengubah sikap, kebiasaan, dan adat istiadat yang dapat menjadi penghambat pada usaha pembangunan. Di samping itu, hubungan ekonomi internasional ini dapat mengembangkan pandangan baru, teknik memproduksi baru, sikap dan cara-cara bekerja yang baru, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya lingkaran perangkap kemiskinan disebabkan oleh:

- a. ketidakmampuan untuk menggerakkan tabungan yang ada;
- b. kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal;

- c. taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemahiran masyarakat yang masih rendah.

Ketiga faktor tersebut merupakan hambatan terciptanya pembentukan modal dan perkembangan ekonomi yang pesat di negara sedang berkembang.

E. Inti Teori Ketergantungan

Sebagaimana paparan sebelumnya, bahwa secara historis, teori dependensi lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoretis, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah, negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori dependensi yang berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga tidak disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, tetapi lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara dunia ketiga itu.

Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara dunia ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara dunia ketiga. Dengan campur tangan tersebut, pembangunan di negara dunia ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, tetapi semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan.

Secara garis besar, teori dependensi adalah keadaan yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan utama yang memengaruhi kemajuan ekonomi di negara berkembang, seperti keputusan mengenai harga komoditas, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh individu atau institusi di luar negara yang bersangkutan (Zulkarimen Nasution, 2007: 44). Oleh karena itu, beberapa asumsi dasar dari teori ketergantungan ini adalah sebagai berikut.

1. Dilihat dari satu gejala yang sangat umum, keadaan ketergantungan berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Teori dependensi berusaha menggambarkan watak-watak umum keadaan

ketergantungan di dunia ketiga sepanjang perkembangan kapitalisme dari abad ke-16 sampai sekarang.

2. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh “faktor luar” sebab faktor-faktor yang menghambat pembangunan tidak terletak pada persoalan kekurangan modal atau kekurangan tenaga dan semangat wiraswasta, tetapi terletak di luar jangkauan politik ekonomi dalam negeri suatu negara. Warisan sejarah kolonial dan pembagian kerja internasional yang timpang bertanggung jawab terhadap kemandekan pembangunan negara dunia ketiga.
3. Permasalahan ketergantungan dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalir surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Hal ini diperburuk lagi karena negara dunia ketiga mengalami kemerosotan nilai tukar perdagangan relatifnya.
4. Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Pada satu pihak, mengalirnya surplus ekonomi dari dunia ketiga menyebabkan keterbelakangannya, satu faktor yang mendorong lajunya pembangunan di negara maju.
5. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Bagi teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran tidak dapat terlaksana. Sekalipun sedikit, perkembangan dapat saja terjadi di negara pinggiran ketika, misalnya, sedang terjadi depresi ekonomi dunia atau perang dunia. Teori dependensi berkeyakinan bahwa pembangunan yang otonom dan berkelanjutan hampir dapat dikatakan tidak mungkin dalam situasi yang terus-menerus terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara maju.

Dengan demikian, teori dependensi juga lahir atas respons ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran yang menopang keberadaan teori dependensi ini adalah aliran Neo-Marxisme. Ada dua hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik.

1. Negara pinggiran yang pra-kapitalis, yaitu kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis, seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa.
2. Negara pinggiran akan maju jika disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut. Negara pinggiran diibaratkan sebagai putri cantik yang sedang tertidur, yang akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori dependensi.

Bantahan teori dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini adalah sebagai berikut.

1. Negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Apabila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya.
2. Justru karena dominasi, sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara dunia ketiga, negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena bergantung pada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format “neo-kolonialisme” yang diterapkan oleh negara maju kepada negara dunia ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara dunia ketiga (Arief Budiman, 2000: 62-63).

Di samping itu, lahirnya teori dependensi ini juga dipengaruhi dan merupakan jawaban atas krisis teori Marxis ortodoks di Amerika Latin. Menurut pandangan Marxis ortodoks, Amerika Latin harus mempunyai tahapan revolusi industri “borjuis” sebelum melampaui revolusi sosialis proletar. Namun, Revolusi Republik Rakyat Cina (RRC) tahun 1949 dan Revolusi Kuba pada akhir tahun 1950-an mengajarkan pada kaum cendekiawan bahwa negara dunia ketiga tidak harus mengikuti tahapan perkembangan tersebut. Tertarik pada model pembangunan RRC dan Kuba, banyak intelektual radikal di Amerika Latin berpendapat bahwa negara-negara Amerika Latin dapat saja langsung menuju dan berada pada tahapan revolusi sosialis.

Dengan demikian, yang dimaksud ketergantungan adalah keadaan yang menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat. Hubungan saling ketergantungan antara dua sistem ekonomi atau lebih terjadi apabila ekonomi beberapa negara (yang dominan) bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi di negara lainnya (yang bergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik yang positif maupun negatif.

Teori ketergantungan ini muncul dengan asumsi bahwa tidak ada daerah atau negara yang otonom di dunia ini, semua turut serta dalam ekonomi dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dikemukakan oleh golongan Non-Marxis atau dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh golongan Marxis. Dos Santos juga beranggapan bahwa negara pinggiran juga bisa berkembang meskipun perkembangan itu merupakan perkembangan yang tergantung (perkembangan ikutan). Impuls dan dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara pinggiran yang bersangkutan, tetapi datang dari negara pusatnya.

Keterbelakangan yang terjadi di negara pinggiran disebabkan ekonomi negara-negara ini kurang dapat menyatu dengan kapitalisme. Jika ekonomi negara pusat berkembang atau maju, bisa terjadi bahwa ekonomi negara berkembang ikut maju. Demikian pula, jika negara pusat mengalami kesulitan ekonomi, negara-negara pinggiran akan mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan ekonomi negara-negara pinggiran sangat bergantung pada ekonomi negara-negara pusat. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya, negara-negara pinggiran yang mengalami kesulitan ekonomi, keadaan ekonomi negara-negara pusat tidak akan terpengaruh karena ekonomi negara-negara pusat tidak bergantung pada ekonomi negara-negara pinggiran.

Pada sisi lain, teori ketergantungan juga termasuk teori struktural yang memihak pada kemiskinan di dunia ketiga, sedangkan upaya mengkhususkan diri pada produksi pertanian merupakan akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif. Maksudnya, negara yang kuat melakukan eksploitatif terhadap yang lemah.

Pendekatan dari teori ketergantungan memberikan asumsi dasar mengenai suatu keterbelakangan. Menurut Frank, teori ketergantungan bertolak belakang dengan teori modernisasi, teori modernisasi menjelaskan mengenai keterbelakangan karena tidak adanya sesuatu, sedangkan teori ketergantungan menjelaskan karena adanya sesuatu. Keterbelakangan menurut teori ketergantungan tidak dipahami sebagai suatu keadaan asli, ataupun sebagai masyarakat tradisional, tetapi suatu yang tercipta oleh masyarakat pra-kapitalis yang berhubungan melalui ekonomi dan politik tertentu dengan individu atau lebih masyarakat kapitalis.

Akar penyebab keterbelakangan dalam perspektif ketergantungan adalah adanya ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi ada ketika suatu masyarakat jatuh di bawah kekuasaan sistem ekonomi kelompok kapitalis atau kelompok pemilik modal. Teori ketergantungan ini sebagai suatu penjelasan tentang keterbelakangan ekonomi yang telah dijabarkan dan dikembangkan secara pesat oleh Andre Gunder Frank dan Samir Amin. Frank menerapkan tentang konsep kemajuan dan keterbelakangan melalui negara-negara dalam sistem ekonomi dunia kapitalis, dan memandang ekonomi dunia menjadi dua unsur utama, yaitu metropolis dan satelit. Aliran surplus ekonomi dalam ekonomi dunia berasal dari satelit (atau pinggiran) menuju metropolis (atau pusat) dan itu sudah diatur dalam perekonomian dunia. Negara terbelakang secara ekonomi didominasi oleh negara kapitalis maju yang secara terus-menerus mengambil kekayaan dari mereka. Frank menyebutnya dalam istilah *development of underdevelopment* (disebut dengan perkembangan terbelakang). Dalam pandangan ini keterbelakangan negara-negara miskin terhadap negara-negara maju terlihat mencolok dan membuat semakin terpuruknya perekonomian negara-negara miskin. Korban terbesar dari proses ini adalah mayoritas terbesar adalah petani dan buruh kota dan pihak yang diuntungkan, yaitu negara-negara metropolis serta para elite pertanian dan industri dari negara-negara satelit. Kelompok yang diuntungkan akan memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan situasi ketergantungan ekonomi.

F. Akibat Ketergantungan

Menurut penganut dari paham liberal, hubungan antarnegara-negara pusat dengan negara-negara pinggiran merupakan hubungan

saling ketergantungan, yang kedua belah pihak ada dalam posisi saling menguntungkan. Negara pusat membutuhkan bahan baku untuk industrinya, sedangkan negara-negara pinggiran membutuhkan barang-barang industri untuk pembangunannya. Akan tetapi, satu hal yang dilupakan menurut pandangan kaum liberal adalah derajat keuntungan antara negara pusat dan negara pinggiran berbeda. Negara-negara pinggiran jelas lebih bergantung pada negara-negara pusat. Hubungan yang terjadi antara negara pusat dan negara pinggiran dapat disejajarkan dengan hubungan majikan dan buruh, tetapi apakah dapat dikatakan keduanya saling bergantung dengan derajat yang sama?

Kaum Marxis klasik beranggapan bahwa negara-negara pinggiran yang pra-kapitalis merupakan negara yang tidak dinamis, tetapi setelah disentuh oleh kapitalis maju akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju. Akan tetapi, pada kenyataannya, negara-negara pinggiran yang pra-kapitalis mempunyai dinamika sendiri, yang jika tidak disentuh oleh negara kapitalis maju, akan berkembang secara mandiri. Hal ini disebabkan sentuhan oleh negara kapitalis maju menyebabkan perkembangan negara pinggiran menjadi terhambat. Dengan demikian, keterbelakangan yang terjadi di negara-negara pinggiran disebabkan oleh adanya ekspansi negara-negara kapitalis, jadi disebabkan oleh faktor eksternal.

Menurut Frank (1969), keterbelakangan di negara-negara pinggiran bukan karena masyarakat itu kekurangan modal, melainkan karena proses ekonomi, politik dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalis. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran merupakan akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara-negara pusat. Hal itu terjadi karena proses sosial, ekonomi, dan politik tersebut menimbulkan struktur internasional dari negara-negara yang tidak sama kuatnya yang mengakibatkan proses akumulasi yang cepat pada kawasan tertentu (negara-negara pusat) dan memaksa suatu siklus keterbelakangan pada kawasan yang lain (negara-negara pinggiran).

Teori ketergantungan pada dasarnya menyetujui asumsi bahwa kekurangan modal dan ketiadaan keahlian merupakan penyebab ketergantungan. Akan tetapi, faktor penyebabnya bukan dicari pada nilai-nilai tradisional bangsa itu, melainkan pada proses

imperialisme dan neo-imperialisme yang menyedot *surplus* modal yang terjadi di negara-negara pinggiran ke negara pusat (Budiman, 1995). Perkembangan yang wajar dari negara-negara pinggiran yang seharusnya menuju pada pembangunan yang mandiri, terganggu akibat masuknya kekuatan ekonomi dan politik dari negara-negara pusat. Oleh karena itu, penanaman modal dan keahlian yang disuntikkan begitu saja ke negara-negara pinggiran tidak akan banyak bermanfaat sebelum struktur ekonomi dan politik yang dibuat memberikan keuntungan pada modal asing ini diubah secara radikal.

Perkembangan yang wajar dari negara-negara pinggiran, yang seharusnya mengantarkannya pada pembangunan mandiri telah terganggu akibat masuknya kekuatan ekonomi dan politik negara-negara pusat. Suntikan modal dan teknologi oleh negara pusat pada negara-negara pinggiran tidak akan bermanfaat sebelum struktur ekonomi dan struktur politik dibuat untuk memberikan keuntungan yang seimbang. Prebisch mengatakan bahwa penurunan nilai tukar dari komoditas pertanian terhadap komoditas barang-barang industri mengakibatkan neraca perdagangan negara-negara pinggiran yang merupakan produsen hasil pertanian mengalami defisit yang cukup besar. Gejala ini disebabkan permintaan untuk barang-barang pertanian tidak elastis.

Dalam hal ini berlaku Hukum Engels yang menyatakan bahwa pendapatan yang meningkat menyebabkan persentase konsumsi makanan terhadap pendapatan menurun. Artinya, pendapatan yang naik tidak akan menaikkan konsumsi makanan, tetapi meningkatkan konsumsi barang-barang industri. Akibatnya, anggaran pertanian (pinggiran) yang digunakan untuk mengimpor barang-barang industri dari negara pusat akan semakin meningkat, sedangkan pendapatan dari hasil eksportnya relatif tetap. Inilah yang menimbulkan defisit pada neraca perdagangan.

Berbeda dengan barang industri, kenaikan dalam pendapatan akan mengakibatkan kenaikan pada konsumsi barang-barang industri. Oleh karena itu, kenaikan pendapatan di negara industri tidak akan menaikkan secara berarti impor barang pertanian di negara-negara pinggiran. Akan tetapi, kenaikan pendapatan di negara-negara pinggiran akan menaikkan secara berarti barang-barang industri dari negara-negara pusat. Hal ini akan memperbesar jumlah ekspor barang-barang industri dari negara pusat ke negara pinggiran.

Adanya monopoli teknologi dari negara pusat membuat negara pinggiran harus membayar sewa apabila ingin meminjam teknologi tersebut. Akibatnya, proses industrialisasi di negara-negara pinggiran menjadi semakin tinggi ongkosnya karena harus membayar bermacam-macam uang sewa. Artinya, surplus yang diciptakan negara pinggiran, pada akhirnya banyak disedot kembali ke negara pusat (Khor Kok, 1989). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila data dari Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa antara tahun 1946 sampai 1967, modal yang baru masuk ke negara-negara Amerika Latin berjumlah US\$ 4.415 juta, yang diinvestasikan kembali ke Amerika Serikat berjumlah US\$ 4.424 juta. Adapun keuntungan yang dibawa kembali ke Amerika Serikat berjumlah US\$ 14.775 juta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan keuntungan dari modal Amerika Serikat yang berjumlah US\$ 5.415 juta adalah US\$ 18.983 juta (Dos Santos, 1970), (Todaro, 1987). Dos Santos juga mengatakan bahwa larinya keuntungan modal ke luar negeri ini mengakibatkan mengeringnya modal di dalam negeri. Hal itu menyebabkan negara pinggiran tidak mampu mendirikan industri nasional sendiri sehingga industrialisasi yang dijalankan masih tetap bergantung pada bantuan asing. Ketimpangan keuntungan akibat ketergantungan ini juga dapat dilihat dari perbandingan rata-rata pendapatan orang Amerika Serikat dengan India yang pada tahun 1930-an hanya 15: 1 menjadi 35: 1 pada tahun 1950-an.

Akibat ketergantungan industri dalam arti teknik (*technological industrial dependence*), menurut Dos Santos membawa perubahan terhadap struktur negara pinggiran, yaitu berupa:

1. konflik keruangan timbul, yaitu akibat kebutuhan untuk mempertahankan lahan pertanian adalah kebutuhan untuk mengembangkan pusat-pusat industri;
2. industri dan teknologi lebih responsif terhadap kepentingan perusahaan asing/multinasional daripada kebutuhan nasional dalam negeri;
3. timbulnya ketimpangan sosial dan ekonomi akibat terkonsentrasinya pendapatan dan teknologi. Di negara-negara pinggiran, sektor ekonomi yang paling dinamis biasanya dikuasai oleh modal asing. Oleh karena itu, keuntungan dari sektor ini diserap kembali ke negara-negara industri maju.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa modal yang masuk ke negara pinggiran lebih sedikit daripada modal yang meninggalkan negara tersebut. Chase-Dunn (1975) menguraikan mekanisme investasi asing dan ketergantungan pada utang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu sebagai berikut.

1. Akibat investasi asing, sumber alam di negara-negara pinggiran dikuras habis sehingga negara-negara pinggiran kehilangan sumber bagi pembangunan. Laba dari investasi asing diangkut ke luar negeri.
2. Produksi yang berorientasi ke luar negeri dan masuknya perusahaan multinasional mengubah struktur ekonomi negara pinggiran. Struktur ekonomi baru ini akan menghasilkan dinamika ekonomi yang menyebabkan keterbelakangan karena lebih melayani modal asing dan borjuis lokal yang bekerja sama dengan pemilik modal asing tersebut. Keadaan ini juga menyebabkan industri kecil di negara pinggiran kalah bersaing dengan industri multinasional yang disokong oleh investasi asing.
3. Hubungan antara elite di negara pusat dan negara pinggiran mencegah terjadinya pembangunan nasional.
4. Terjadi ketimpangan pendapatan akibat dari kelompok elite di daerah pinggiran memperoleh bagian yang lebih banyak dari pendapatan nasional karena kekuatannya didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada di negara pusat. Akan tetapi, investasi modal asing juga bisa berakibat positif bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara pinggiran, yaitu:
 - a. modal asing langsung memproduksi barang dan menimbulkan permintaan bagi barang lain yang diperlukan bagi produksi tersebut. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - b. utang luar negeri yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional;
 - c. terjadi transfer teknologi, perbaikan kebiasaan kerja, modernisasi organisasi pembangunan, dan sebagainya yang berguna bagi pembangunan.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa ketergantungan negara pinggiran terhadap negara pusat sangat tidak menguntungkan bagi negara pinggiran. Hal itu disebabkan ketergantungan yang tercipta akan membuat keterbelakangan negara-negara pinggiran.

G. Kritik terhadap Teori Ketergantungan

Setelah menghadapi sekian banyak tuduhan dari teori dependensi, para analis pembangunan yang berpegangan pada teori awal tersebut yang merasa bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam teori dependensi itu sesuatu yang dilebih-lebihkan. Adapun yang menuduh "kaum dependista" telah mendistorsikan sejarah dalam kupasan mereka, terutama yang menyangkut hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara terbelakang. Akan tetapi, pada kenyataannya teori dependensi dan keterbelakangan tersebut mendapat pengaruh yang besar di tengah negara-negara sedang berkembang.

Menurut Servaes (1986) dalam Zulkarimen Nasution (2007: 49), hal-hal yang dikritik pada teori dependensi dan keterbelakangan itu pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Pandangan kaum dependensia tentang kontradiksi yang fundamental di dunia antara pusat dan periferi ternyata tidak berhasil memperhitungkan struktur-struktur kelas yang bersifat internal dan kelas produksi di periferi yang menghambat terbentuknya tenaga produktif.
2. Teori dependensi cenderung untuk berfokus pada masalah pusat dan modal internasional karena kedua hal itu "dipersalahkan" sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan daripada masalah pembentukan kelas-kelas lokal.
3. Teori dependensi telah gagal dalam membedakan kapitalis dengan feodalis; atau bentuk-bentuk pengendalian produser masa prakapitalis lainnya dan apropriasi surplus.
4. Teori dependensi mengabaikan produktivitas tenaga kerja sebagai titik sentral dalam pembangunan ekonomi nasional, dan meletakkan tenaga penggerak (*motor force*) dari pembangunan kapitalis dan masalah keterbelakangan pada transfer surplus ekonomi pusat ke periferi.

5. Teori dependensi juga dinilai menggalakkan suatu ideologi berorientasi ke dunia ketiga yang meruntuhkan potensi solidaritas kelas internasional dengan menyatukan semuanya sebagai “musuh”, yaitu elite ataupun massa yang berada di bangsa-bangsa pusat.
6. Teori dependensi dinilai statis karena tidak mampu menjelaskan dan memperhitungkan perubahan-perubahan ekonomi pada negara-negara terbelakang menurut waktunya.

BAB 5

TEORI PASCA-KETERGANTUNGAN

A. Teori Sistem Dunia (*World System Theory*)

1. *Pendahuluan*

Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Menurut Immanuel Wallerstein, dunia adalah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Menurutnya, dunia terlalu kompleks jika dibagi atas dua kutub saja (negara pusat dan negara pinggiran) karena ada pula negara yang tidak termasuk dalam kedua kategori itu. Wallerstein menambahkan bahwa sistem dunia kapitalis dibagi dalam tiga jenis, yaitu: (a) negara *core* atau pusat; (b) semi-periferi atau setengah pinggiran; (c) negara periferi atau pinggiran. Ketiga jenis negara ini memiliki perbedaan dalam kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Kelompok negara kuat (pusat) mengambil keuntungan yang paling banyak karena mereka dapat memanipulasi sistem dunia sampai batas-batas tertentu dengan kekuatan dominasi yang dimilikinya. Adapun negara setengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitasi.

Negara semi pinggiran muncul karena jika hanya ada dua kutub di dunia, yaitu negara pusat dan pinggiran, akan muncul disintegrasi dalam sistem dunia itu dan negara semi pinggiran dinilai

akan menghindari disintegrasi tersebut. Negara semi pinggiran juga dinilai sebagai iklim ekonomi baru. Pada negara semi pinggiran, para pemilik modal bisa memindahkan modalnya dari tempat yang tidak lagi efisien ke tempat baru yang sedang tumbuh. Salah satu penyebabnya adalah di negara pusat yang sebelumnya merupakan ekonomi unggul mengalami penurunan atau kehilangan keuntungan biaya komparatif sebagai akibat meningkatnya upah yang terus-menerus karena eksploitasi buruh di negara-negara pinggiran.

Penekanan pada teori ini adalah negara-negara di dunia bisa naik dan bisa turun kelas. Negara pusat bisa saja menjadi negara semi pinggiran, atau sebaliknya negara semi pinggiran bisa menjadi negara pusat atau negara pinggiran, dan negara pinggiran bisa menjadi negara semi pinggiran. Hal ini terbukti dengan turunnya Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi negara pusat digantikan Amerika Serikat pasca-kehancuran dahsyat di Eropa. Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Misalnya, negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri karena mahal, sedangkan komoditas primer mereka murah sekali maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor.

Kenaikan kelas bisa pula terjadi melalui undangan. Perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat melakukan ekspansi ke luar kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat perkembangan ini, muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerja sama. Melalui proses ini, posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi setengah pinggiran.

Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Peru dan Chile misalnya, dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan asing.

2. *Dari Dependensi Menuju Sistem Dunia*

Pertentangan modernisasi dan ketergantungan membawa dampak positif dengan lahirnya teori pembangunan baru, yang dikenal sebagai teori sistem dunia. Teori ini mengadopsi beberapa

konsep yang telah terlebih dahulu diajukan oleh teori dependensi, yaitu konsep ketimpangan nilai tukar, eksploitasi negara pinggiran oleh negara senter, dan konsep pasar dunia.

Teori sistem dunia yang didasari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Adapun teori dependensi berbicara tentang kapitalisme dan eksploitasi sebagai penyebab kegagalan negara pinggiran. Frank menyajikan lima tesis tentang dependensi, yaitu sebagai berikut.

- a. Kesenjangan pembangunan antara negara sentral dan pinggiran, pembangunan pada negara satelit dibatasi oleh status negara satelit tersebut.
- b. Kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi, terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara sentral melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju.
- c. Negara yang terbelakang dan terlihat feodal saat ini merupakan negara yang memiliki kedekatan ikatan dengan negara sentral pada masa lalu. Frank menjelaskan bahwa negara satelit yang memiliki hubungan sangat erat telah menjadi "sapi perah" bagi negara sentral. Negara satelit tersebut hanya sebatas sebagai penghasil produk primer yang sangat dibutuhkan sebagai modal dalam industri kapitalis di negara sentral.
- d. Kemunculan perkebunan besar di negara satelit sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan keuntungan ekonomi negara sentral. Perkebunan yang dirintis oleh negara sentral merupakan cikal bakal munculnya industri kapitalis yang sangat besar yang berdampak pada eksploitasi lahan, sumber daya alam, dan tenaga kerja negara satelit.
- e. Eksploitasi yang menjadi ciri khas kapitalisme menyebabkan menurunnya kemampuan memproduksi pertanian di negara satelit. Ciri pertanian subsistem pada negara terbelakang menjadi hilang dan diganti menjadi pertanian yang kapitalis.

Adapun Santos mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri. Tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara sentral adalah kapitalisme sehingga timbulnya usaha melakukan ekspansi keluar dan tipe hubungan ekonomi pada negara pinggiran merupakan bentuk ketergantungan yang dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme oleh negara sentral.

Santos juga menjelaskan timbulnya kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Menurutnya, keterbatasan sumber daya pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang diterapkan oleh mereka memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami oleh negara miskin. Dengan kata lain, negara miskin selalu menjadi negara terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu bergantung pada negara maju. Sementara itu, teori dependensi memiliki kecenderungan untuk mempersoalkan kapitalisme sebagai penyebab kemiskinan dan kegagalan pembangunan di negara pinggiran.

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam serta proses pertukatan yang tidak seimbang antara negara sentral dan negara pinggiran menyebabkan tidak seimbangnya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing kelompok negara.

Walaupun memiliki beberapa kesamaan, teori dependensi dan teori sistem dunia memiliki perbedaan pokok antar-keduanya, yaitu sebagai berikut.

- a. Teori dependensi menggunakan unit analisis pada tingkat negara atau nasional, sedangkan teori sistem dunia menggunakan unit analisis global atau sistem dunia yang merupakan gambaran dari hubungan antarnegara.
- b. Teori dependensi menggunakan metode historis struktural yang mempelajari masa pasang surut sebuah negara. Adapun teori sistem dunia menggunakan dinamika sejarah sistem dunia secara global.
- c. Teori dependensi menggunakan struktur teori dua kutub, sedangkan teori sistem dunia menggunakan struktur teori tiga kutub.

- d. Teori dependensi menyatakan bahwa pembangunan bersifat searah dan deterministik dari negara sentral ke negara pinggiran. Adapun teori sistem dunia menyatakan bahwa arah pembangunan lebih bersifat fleksibel dengan adanya peluang perpindahan status suatu negara dalam sistem dunia.
- e. Teori dependensi menjadikan negara pinggiran sebagai arena kajian, sedangkan teori sistem dunia tidak hanya menggunakan negara pinggiran, tetapi juga negara semi pinggiran dan sistem ekonomi dunia sebagai arena kajiannya.

3. *Immanuel Wallerstein: Teori Sistem Dunia*

Teori sistem dunia yang dipelopori Immanuel Wallerstein sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori ketergantungan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, teori ketergantungan dianggap tidak dapat menjelaskan kemajuan yang terjadi di negara pinggiran sehingga teori sistem dunia mencoba menjelaskan kemajuan di negara pinggiran (Arief Budiman, 2000: 107).

Dalam menjelaskan teori sistem dunia, Wallerstein menggunakan analogi Historis. Menurutnya, pada masa lalu dunia terbagi dalam unit-unit kecil yang berbentuk kerajaan dan masing-masing hidup dalam teritorial yang terpisah, tidak berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, terjadi penggabungan oleh satu kekuatan dominan, baik secara militer maupun cara-cara lainnya. Penggabungan inilah yang menyebabkan terciptanya satu kerajaan yang besar. Walaupun kekuasaannya tidak sampai seluruh dunia, ruang lingkungannya sangat besar sehingga di bawah kekuasaan kerajaan tersebut dunia berada dalam satu sistem yang terpusat (Arief Budiman, 2000: 108).

Wallerstein membagi tiga kelompok negara: pusat, setengah-pinggiran, dan pinggiran. Perbedaan ketiga kelompok ini terletak dalam kemampuan ekonomi dan politiknya. Kelompok terkuat adalah negara pusat, yang dalam batasan tertentu, mereka dapat memanipulasi sistem dunia sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka. Sementara itu, negara setengah-pinggiran adalah negara oportunis, yang menanggung keuntungan dari eksploitasi negara pinggiran oleh negara pusat.

Seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, sistem dunia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis. Dinamisnya sistem dunia

menurut Wallerstein merupakan peluang sekaligus ancaman bagi negara-negara di dunia untuk naik atau turun kelas. Suatu negara yang semula pusat dapat menjadi setengah-pinggiran, demikian pula yang semula setengah-pinggiran dapat menjadi pusat, semikian pula yang pinggiran dapat menjadi setengah-pinggiran, dan begitu pula seterusnya.

4. Teori Pusat dan Pinggiran

Dalam diskursus teori pembangunan, istilah “pusat-pinggiran” pertama kali dimunculkan oleh para penganut teori ketergantungan (*dependency theory*). Salah satu asumsi utama teori ketergantungan adalah terbaginya perekonomian dunia menjadi dua kutub, yaitu perekonomian negara maju dan negara terbelakang. Pembagian ini pada dasarnya mengadopsi pandangan Marx tentang struktur masyarakat yang terpolarisasi pada dua golongan, yaitu golongan borjuis dan golongan proletariat. Andre Gunder Frank membagi perekonomian dunia menjadi negara metropolis maju dan negara satelit, sedangkan Samir Amin membaginya menjadi negara-negara maju di pusat dan kelompok negara miskin di pinggiran (Kuncoro, 2000: 61).

Negara-negara maju di pusat dicirikan oleh perekonomian yang modern dengan sistem pasar yang baik, serta memiliki hubungan sosial yang bersifat individualistik yang setiap hubungan dilakukan melalui kontrak transaksi. Sementara itu, masyarakat di negara pinggiran masih didominasi oleh sifat paternalistik dan kerja sama sosial yang tinggi, dengan perekonomian yang bersifat tradisional dan sistem pasar belum berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan pertentangan pusat-pinggiran, ahli ekonomi asal Brasil, Celso Furtado, mendefinisikan hubungan pusat-pinggiran “bukan semata-mata sebagai pembagian tak merata atas manfaat-manfaat pembangunan, melainkan juga merupakan hubungan ketergantungan yang berkaitan dengan dominasi dan eksploitasi ekonomi oleh pusat terhadap pinggiran” (Ardnt, 1991: 142). Sementara itu, sebagaimana dikutip oleh Forbes (1986: 104), melalui studinya di Afrika Selatan Rogerson menyatakan bahwa pusat telah menjalankan hegemoni regional sehingga pembangunan di pinggiran lebih berupa pembangunan daerah kantong ekspor yang terbatas pada pengolahan bahan mentah secara sederhana tanpa dukungan mata

rantai yang cukup besar dan cukup tangguh. Oleh karena itu, fenomena pinggiran merupakan wujud pelestarian ketimpangan dan rasionalisasi ketidakadilan yang terkandung dalam pembagian kerja yang mapan.

Pembahasan terhadap pusat-pinggiran sebagai sebuah “struktur dunia” semakin menguat seiring dengan kemunculan teori sistem-dunia yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein melalui dua tulisannya, yaitu *The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis* (1974) dan *The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (1976). Kedua tulisan tersebut muncul saat teori modernisasi mengalami kritik besar-besaran, terutama dari teori ketergantungan. Sama halnya dengan para ahli teori ketergantungan, Wallerstein mengkritik asumsi teori modernisasi yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemajuan semua negara hanya bisa mengikuti jalan perkembangan evolusioner tunggal. Kritiknya juga ditujukan pada pengabaian teori modernisasi terhadap perkembangan sejarah dunia dalam pembentukan struktur transnasional.

Pendekatan Teori Sistem Dunia

Teori sistem-dunia adalah perspektif makrososiologi yang berupaya menjelaskan dinamika “ekonomi dunia kapitalis” sebagai sistem yang bersifat total. Pendekatan ini digunakan oleh Immanuel Wallerstein, terutama melalui karya *The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis* (1974). Pada 1976 Wallerstein memublikasikan bukunya yang berjudul *The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Dengan karya tersebut, Wallerstein memberikan kontribusi besar di dalam pemikiran sejarah dan sosiologi dan memancing berbagai respons dan inspirasi bagi pemikir lainnya.

Konsep-konsep utamanya dan blok bangunan intelektualnya berhasil menancapkan dampak sekaligus sambutan hangat dari negara-negara berkembang. Kajian Wallerstein mencakup sosiologi sejarah dan sejarah ekonomi. Karena tekanannya yang begitu besar terhadap pembangunan dan ketimpangan antarbangsa-bangsa, teori-teorinya dianut oleh para teoretikus dan praktisi pembangunan.

Kombinasi ini membuat Proyek Sistem-Dunia bermakna intelektual sekaligus politik. Selain itu, pendekatan Wallerstein bersifat praxis, dalam arti adanya korelasi antara teori dan praktik. Sementara itu, tujuan aktivitas intelektual adalah menciptakan pengetahuan yang membongkar struktur-struktur tersembunyi yang memungkinkan seorang intelektual bertindak dan mengubah dunia.

Karya Wallerstein berkembang ketika teori modernisasi dan pembangunan diserang habis-habisan. Wallerstein bertujuan membangun “perbedaan konseptual yang jelas dengan teori-teori modernisasi, lalu memberikan paradigma teoretis yang baru untuk menginvestigasi muncul dan berkembangnya kapitalisme, industrialisme dan negara-negara nasional”. Kritisismenya terhadap modernisasi meliputi:

- a. retifikasi negara bangsa sebagai unit inti analisis;
- b. asumsi bahwa semua negara hanya bisa mengikuti jalan perkembangan evolusioner yang tunggal;
- c. mengesampingkan perkembangan sejarah dunia dari struktur transnasional yang membatasi perkembangan lokal dan nasional;
- d. menjelaskan tipe-tipe ideal ahistoris tentang “tradisi” versus “modernitas”, yang dielaborasi dan diterapkan dalam kasus-kasus nasional.

Ada tiga blok bangunan intelektual dari teori sistem-dunia yang dirujuk Wallerstein, yaitu sekolah *Annales*, Marx, dan teori ketergantungan (*dependency theory*). Blok bangunan ini diasosiasikan dengan pengalaman hidup Wallerstein dan keterlibatannya dalam berbagai isu, teori, dan situasi. Teori sistem-dunia berutang pada sekolah *Annales* yang diwakili oleh Fernand Braudel mengenai pendekatan kesejarahan (*historical approach*).

Wallerstein mengambil gagasan Braudel perihal *la long duree* (*long term*) serta melakukan studi dengan fokus pada kawasan geoekologis sebagai unit analisis, sejarah pedesaan, dan keyakinan pada material empiris dari Braudel. Dampak *Annales* bagi Wallerstein terletak pada level metodologis.

Dari Marx, Wallerstein belajar bahwa (1) realitas fundamental konflik sosial berbasis pada kelompok manusia; (2) konsen dengan

totalitas yang relevan; (3) hakikat transiter bentuk-bentuk sosial dan teori-teori tentangnya; (4) sentralitas proses akumulasi yang menghasilkan perjuangan kelas secara kompetitif; (5) dialektika gerak melalui konflik dan kontradiksi. Melalui kajian ini, Wallerstein hendak merevisi Marxisme tersebut.

Teori sistem-dunia juga mengadaptasi teori ketergantungan (*dependency theory*). Dari teori ini Wallerstein menjelaskan pandangan neoMarxis mengenai proses pembangunan, yang populer di negara-negara berkembang yang di antara tokohnya adalah Fernando Henrique Cardoso. Teori ketergantungan memahami “peripheri” dengan cara melihat relasi pusat-pinggiran yang tumbuh di kawasan periperi, seperti Amerika Latin. Dari sanalah kritik terhadap kapitalisme global sekarang ini berkembang.

Pengaruh penting lainnya adalah Karl Polanyi dan Josep Schumpeter. Dari sini sistem-dunia tertarik pada lingkaran bisnis, dan gagasan mengenai tiga mode organisasi ekonomi, yaitu mode recipokal, mode redistribusi dan pasar. Tiga mode ini analog dengan konsep Wallerstein mengenai *mini-system*, *world-system*, dan *world-economy*.

5. Kritik terhadap Teori Sistem Dunia

Kritik yang dilontarkan terhadap teori sistem dunia adalah bahwa teori sistem dunia terlalu memerhatikan dinamika eksternal tanpa memerhatikan dinamika internal suatu negara. Sebaik-baiknya suatu kesempatan yang muncul, tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, kesempatan tersebut tidak akan dapat diraih.

B. Teori Pembangunan Alternatif: *Post Colonialism*, *Post Structural*, dan *Post Developmentalism*

1. Teori Poskolonial (*Post Colonialism*)

Teori poskolonial ingin menggugat praktik kolonialisme yang melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas dan kreofisasi bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tetapi didialektikan melalui kesadaran atau gagasan. Poskolonial merupakan alat atau perangkat kritik yang melihat secara “jernih”

cara menggerakkan sendi-sendi budaya, sosial, dan ekonomi untuk kepentingan kelas dominan atau pusat. Poskolonial mencoba membongkar mitos-mitos yang “mengerdilkan” daya kritis dari penguasaan hegemoni melalui gerakan budaya dan kesadaran yang subtil. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa poskolonial adalah perlawanan sehari-hari, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ben Anderson bahwa sebetulnya mode atau siasat perlawanan massa rakyat kecil tanpa politik yang dilakukan dengan gerakan “picisan” untuk mengkaji ulang “politik modern” identitas adiluhung kalangan elite yang (sedang) berkuasa (Benedict Anderson, 1999: 8-9).

Kajian poskolonial adalah salah satu kajian akademis yang berkembang setelah tahun 1980-an. Perkembangan ini sebagai dampak pemikiran teori kritis dan postmodern yang mewarisi pemikiran Nietzsche, seperti Heidegger, Derrida, Michel Foucault, Bataille, dan sebagainya. Ada karakteristik yang sama dan menjadi ciri utama teori kritis dan postmodern, yaitu bahwa teori sosial berguna untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan yang lebih memungkinkan perubahan lingkungan social budaya secara rasional dan lebih manusiawi. Hal ini terlihat jelas pada kajian poskolonial. Oleh karena itu, Akhyar Yusuf Lubis (2006: 199) mengemukakan bahwa teori kritis dan postmodern berjasa besar dalam menumbuhkan kesadaran di kalangan ilmuwan bahwa dalam praktik-klasifikasi ilmiah, pemahaman dan penelitian tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan, kekuasaan, dan ideologi.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Manuel Castel tentang terjadinya perubahan luar biasa dalam dunia ilmiah, pada bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya menjelang akhir abad ke-20. Perubahan dari masyarakat yang cenderung terposisi pada “dua kutub”, identitas tunggal dan komunal, menjadi masyarakat yang saling berintegrasi dan bergesekan antarmasyarakat yang bersifat lokal dan global secara bersamaan (Akhyar Yusuf Lubis, 2006: 201).

Apa Arti Poskolonial?

Kajian poskolonial “menawarkan” sebuah pemahaman kritis dan berupaya untuk mengungkap berbagai dimensi ideologis, hegemonis, dan imrealis yang terdapat dalam ilmu sosial-budaya. Untuk itu, wacana poskolonial yang disebut juga wacana yang berada

di luar orientalisme karena berupaya untuk mengubah “konstruksi” realitas kontemporer model berpikir Barat modern. Jika teori kolonial menggunakan “paradigma positivisme” sebagai dasar epistemologinya, teori poskolonial menggunakan teori kritis dan posmodernisme, terutama melalui postrukturalisme sebagai dasarnya.

Teori poskolonial merupakan suatu teori yang mempelajari kondisi dari keadaan sesudahnya. Teori poskolonial berkenaan dengan keadaan abad ke-18 sampai abad ke-19. Teori ini memberikan perhatian pada budaya pribumi sebagai budaya tertindas dari kekuasaan kolonialisme. Teori ini juga berkaitan dengan representasi ras, etnisitas, dan pembentukan negara-bangsa. Tujuan kajian poskolonial adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengangkat kembali sejarah ilmu, teknologi, dan pengobatan Barat, seperti ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, India, Cina, ataupun pengetahuan pribumi dan pengetahuan dari budaya lain, melalui kajian empiris dan historis. *Kedua*, mengembangkan wacana kontemporer tentang sifat, gaya, dan lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengobatan non-Barat. *Ketiga*, mengembangkan kebijakan ilmu pengetahuan yang mengakui dan menghargai praktik-praktik ilmiah, teknologi, dan pengobatan pribumi atau asli.

2. *Teori Pos-Struktural (Post Structural)*

Ide pembangunan merupakan wacana yang terus berkembang hingga saat ini. Berbagai teori pembangunan berkembang dari masa ke masa. Akan tetapi, dalam perkembangannya tersebut, teori pembangunan tidak terlepas dari berbagai macam kritik dari ahli pembangunan yang lainnya. Bahkan, posisi diskursus mengenai pembangunan sendiri akhirnya ikut dikritik. Kritik ini berkembang dari pandangan post-strukturalisme.

Dalam relevansinya dengan pembangunan, pandangan pos-strukturalis mencoba mengkritik diskursus pembangunan sebagai wacana yang universal. Menurut pandangan ini, nilai-nilai pembangunan yang selama ini berkembang, yang berasal dari pemikiran Barat dapat membahayakan dunia ketiga. Nilai-nilai universal inilah yang akan membentuk suatu yang disebut Derrida sebagai logosentrisme (pencarian sistem berpikir universal yang mengungkapkan apa yang benar, tepat, indah, dan seterusnya) (George Ritzer dan Douglas, 2008: 608).

Logosentrisme dalam pembangunan membahayakan perkembangan bagi dunia ketiga. Kita dipaksa mengafirmasi segala nilai universal (Barat) dalam wacana pembangunan. Dampaknya apa yang dikatakan maju atau progresif merupakan apa yang dibentuk atau diinginkan Barat. Bisa dikatakan wacana universal sebenarnya hanya merupakan produk politik dari kontestasi ahli-ahli pemikir Barat. Kritik ini bagi pembangunan merupakan pukulan telak terhadap suatu wacana mengenai kemajuan. Di sini, kita dapat melihat bahwa ukuran kemajuan suatu bangsa hanya tercapai apabila kita menyesuaikan atau mengafirmasi dengan pembangunan Barat. Inilah yang dikritik oleh Post-strukturalisme, logosentrisme ilmu pembangunan (George Ritzer dan Douglas, 2008: 611).

Post-strukturalisme juga meletakkan dasar bagi pandangan post-modernisme yang melihat definisi pembangunan dari sisi sendiri sekarang ini. Baginya pembangunan merupakan sesuatu yang “berbahaya” karena konsep Eurocentric dapat menghancurkan kultur lokal dan lingkungan (Kate William, 2005: 218). Ketika Escobar menjelaskan kritik terhadap pembangunan dalam pemikirannya mengenai *post-development*, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai modernitas ternyata sebuah produk politik dari Barat yang memaksa kita untuk mengafirmasinya. Berbagai progres dalam pembangunan hanya dinilai dari Barat, kita dipaksa menerapkannya secara mentah-mentah. Tanpa melihat konteks sosial dan budaya suatu negara. Hal ini hanya akan menyebabkan keterbelakangan bagi dunia ketiga dan kemajuan bagi Barat. Untuk itu, Escobar menilai pentingnya nilai-nilai etnografi dan kajian budaya dalam pembangunan untuk dapat menciptakan pembangunan yang sesuai dengan konteks budaya lokal (Arturo Escobar, 1995: 222).

3. *Teori Post Developmentalism*

Istilah developmentalisme lebih menggambarkan realitas objektif tentang haluan ekonomi negara-negara dunia ketiga daripada kapitalisme atau neo-liberalisme yang lebih luas dan kompleks pengertiannya. *Pertama*, istilah neo-liberalisme yang populer menjadi sasaran kritik akhir-akhir ini, dirasakan oleh sebagian kalangan ekonom dan teknokrat sebagai bernuansa insinuatif. *Kedua*, neo-liberalisme terkesan mencerminkan kepentingan sepihak negara-negara industri maju, khususnya AS, dalam mempertahankan hegemoni ekonominya.

Sementara, developmentalisme sebenarnya merupakan kemistri ideologis antara kepentingan negara-negara industri maju dengan kepentingan elite politik negara-negara dunia ketiga.

Mula-mula developmentalisme adalah salah satu teori pembangunan, tetapi kemudian berkembang menjadi suatu ideologi, sebagaimana disebutkan Tony Smith, pada tahun 1985, setelah teori pembangunan internasional diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Ideologi ini timbul dan berkembang menurut versi negara-negara industri maju ataupun dunia ketiga. Dari negara-negara maju, khususnya AS, teori ini berkembang dari doktrin *Four Points Program* yang dilancarkan Presiden AS, Harry S. Truman, pada tahun 1949, yang kemudian menjadi landasan politik luar negeri AS. Program itu mencakup kerja sama internasional melalui PBB, pemulihan ekonomi akibat kerusakan Eropa dari Perang Dunia II, pertahanan negara-negara Dunia Bebas (*Free World*) dari ancaman agresi yang bermuara pada pembentukan pakta-pakta militer, dan pemanfaatan iptek bagi kemajuan bangsa-bangsa.

Developmentalisme merupakan kelanjutan program pemulihan ekonomi dunia ketiga. Motif utamanya adalah pembendungan pengaruh komunisme di negara-negara dunia ketiga yang cenderung memilih satu dan bentuk lain sosialisme. Asumsinya, sumber penyebaran komunisme adalah kemiskinan. Oleh karena itu, penangkal penyebaran komunisme adalah pembangunan ekonomi yang mampu menghapus kemiskinan.

Sementara di dunia ketiga lahir nasionalisme ekonomi sebagai kelanjutan nasionalisme politik sesudah merdeka dari penjajahan. Nasionalisme ekonomi mengambil berbagai bentuk, terutama industrialisasi. Dari negara-negara Amerika Latin, melalui Raul Prebisch, lahir gagasan industrialisasi substitusi impor yang bertujuan menggantikan barang-barang impor dengan produksi domestik sehingga perekonomian nasional bisa bebas dari ketergantungan pada luar negeri. Program ini merugikan negara-negara industri maju yang telah mengekspor barang-barang konsumsi ke negara-negara bekas jajahan.

C. Teori-teori dan Praktik Pembangunan Kontemporer: MDG's, Neoliberalisme, dan Feminisme

1. Teori Millenium Development Goals (MDG's)

Pada akhir dasawarsa 1950-an, istilah “pembangunan” sering dianggap sebagai “obat” terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya “teori pertumbuhan”. Menurut Clark, pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan.

Sekitar tahun 1980-an, strategi pembangunan mulai bergeser menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Strategi ini pun masih mengalami masalah, yaitu tingginya tingkat ketergantungan negara berkembang kepada negara maju berupa investasi, bantuan luar negeri dan pinjaman. Kemudian, sejak memasuki abad ke-20 muncul strategi baru, yaitu konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan konsep MDGs.

MDGs adalah deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang disepakati dan diadopsi oleh 189 negara. Dalam kesepakatan ini terdapat delapan butir tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 dan mulai dijalankan pada September 2000. Pembangunan sering diidentikkan oleh masyarakat sebagai adanya penambahan bangunan (fisik), seperti gedung sekolah, puskesmas, pasar, dan jalan raya, sedangkan hal-hal di luar itu tidak dianggap sebagai pembangunan. Padahal pembangunan yang dimaksud dan jauh lebih penting dari sekadar dari itu adalah pembangunan SDM. SDM merupakan modal dasar pembangunan yang utama. SDM yang menjadi modal dasar pembangunan adalah manusia yang terdidik, terlatih, dan terampil dalam menangani masalah.

Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai proses perubahan dan diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk mewujudkan semua itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan deklarasi *Millenium Development Goal* (MDG) yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Millenium. Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia.

KTT Milenium tersebut juga menghasilkan konsensus yang merangkai berbagai upaya untuk mencapai tujuan MDG dengan perhatian utama pada hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, demokratisasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian. Pada mulanya MDG merupakan sebuah *review* atas kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh OECD-DAC pada pertengahan tahun 1990 dan kemudian dimasukkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (*International Development Goals*) tahun 2000 dan direvisi menjadi Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) pada KTT Milenium.

Setiap tujuan (*goal*) dari MDG memiliki satu atau beberapa target dengan beberapa indikatornya. MDG memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekretariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia. Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target.

Selain Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), ada beberapa tujuan pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, serta KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. MDG tidak bertentangan dengan komitmen global yang sebelumnya karena sebagian dari MDG itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF.

Keikutsertaan Indonesia dalam MDG

Sejak tergabung dalam keanggotaan PBB, secara otomatis Indonesia terlibat dalam menyukseskan kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000 dan menandatangani *Millenium Development Goal (MDG)*, menjadikan Indonesia harus berusaha untuk turut menyukseskan MDG sebagai komitmen global.

MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar-pemerintahan. Penggunaan indikator MDG akan merangsang lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah untuk menyatukan upaya pembangunan sehingga bisa dihasilkan sinergi positif yang menguntungkan rakyat banyak. Hal ini disebabkan persatuan dan kesatuan yang terjadi pada tingkat penduduk, terutama pada tingkat rakyat banyak (*grass root level*) memerlukan pelayanan manusiawi dan pada kemudian hari bisa menikmatinya, merupakan sumbangan pembangunan yang sangat dibutuhkan.

2. Teori Neoliberalisme

Pengertian dan Sejarahnya

Katanya neoliberalisme berasal dari kata “liberal” yang mendapat imbuhan *neo-* yang mengandung makna baru dan akhiran *-isme* yang dapat dimaknai sebagai paham atau pemikiran. Singkatnya, neoliberalisme menunjuk pada suatu paham (isme) liberal, kebebasan. Selanjutnya, bagaimana pandangan tentang liberalisme itu sendiri sampai berevolusi menjadi neoliberalisme?

Pandangan tentang liberalisme awalnya merupakan gagasan pemikir fisiokrat Prancis, Francois Quesnay dengan idiom yang kemudian sangat terkenal “*Laizzes-Faire, Laizzes-Passer*” (Mochtar Mas’oed, 1997: 5 dan George Soros, 2002: 47). Inti gagasannya adalah kritik terhadap campur tangan pemerintah dalam pasar karena umumnya tindakan itu merugikan pasar.

Gagasan ini dilanjutkan oleh Adam Smith dalam karyanya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776). Ia menyebutkan:

Setiap individu selalu berusaha mencari peluang untuk memanfaatkan setiap kapital yang dikendalikannya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu saja, yang dipikirkannya adalah keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan keuntungan bagi masyarakat. Akan tetapi, ketika mengejar keuntungan pribadi itu, ia akan memilih bidang kegiatan yang paling menguntungkan bagi masyarakatnya. Pejabat pemerintah yang berusaha mengatur cara warga masyarakat menanamkan modal mereka agar sesuai dengan kehendak pemerintah, tidak hanya akan membebani diri sendiri dengan perhatian yang tidak perlu, tetapi juga akan mengambil alih wewenang yang seharusnya (dimiliki oleh rakyat)..., dan tidak yang lebih berbahaya daripada menaruh wewenang itu di tangan seseorang yang bermimpi bahwa ia adalah orang yang cocok untuk menjalankan kekuasaan itu (Mochtar Mas'ood, 1997: 5).

Adam Smith yang sangat yakin akan keunggulan mekanisme pasar yang disebutnya dengan *invisible hand*, dengan serta-merta menolak tangan-tangan negara dalam penguasaan terhadap ekonomi. Ia sangat mendambakan dan mengutamakan inisiatif individual, pemilikan swasta, dengan campur tangan pemerintah yang terbatas (Syahrir dalam Daniel Bell dan Irving Kristol [ed.], 1988: xx-xxi).

Mengapa Adam Smith sangat menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi warganya? Apa yang ditentang oleh Adam Smith adalah rezim merkantilis Inggris yang memiliki prinsip bahwa kepentingan nasional harus diperjuangkan dengan cara memanfaatkan kekuatan negara untuk mendapatkan kekayaan sehingga dapat dicapai akumulasi kekuatan nasional. Rezim merkantilis meletakkan semua usaha ekonomi di bawah penguasaan serta dijalankan oleh negara dan memangkaskan inisiatif individual yang pada akhirnya tidak memanusiawikan warga negaranya.

Senada dengan Smith, David Ricardo (1772-1823) mengemukakan pendapatnya tentang gagasan liberal, khususnya dalam perdagangan internasional. Ia menganjurkan perdagangan bebas antarbangsa sebagai landasan hubungan ekonomi antarnegara. Perdagangan bebas dapat mempersatukan bangsa-bangsa seluruh dunia sebagai satu ikatan kepentingan dan interaksi. Dengan ikatan semacam ini, hubungan antarnegara menjadi efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini

digambarkan sebagai parameter yang sederajat dengan kebebasan (Syahrir dalam Daniel Bell dan Irving Kristol [ed.], 1988: 8).

Mazhab liberal menegaskan bahwa ketegangan antara negara dan pasar merupakan bentuk konflik antara penindasan dan kebebasan, kekuasaan dan hak individu, dogma otokratik, dan logika rasional (Syahrir dalam Daniel Bell dan Irving Kristol [ed.], 1988: 8). Anggapan ini berakar pada feodalisme raja-raja Eropa dan dogmatisme gereja ortodok yang sangat sewenang-wenang. Dengan berlandaskan pada pengalaman itu, ketika terdapat konflik antara negara dan pasar, jelas, kaum liberal akan berpihak pada pasar.

Dalam praktik ekonomi politik, kaum liberalis akan berpandangan sangat konservatif bahwa negara menjalankan sedikit urusan yang memang tidak dapat dikerjakan oleh individu. Urusan itu misalnya mengenai keamanan, pembentukan sistem hukum, dan pembuatan mata uang.

a. *John Stuart Mill dan Evolusi Perspektif Liberal*

Dalam perkembangannya, terdapat dinamika hubungan antara negara dan pasar yang kemudian menyebabkan pergeseran pandangan terhadap posisi dan peran keduanya. Hal ini melahirkan evolusi terhadap pemikiran liberalisme. Pada periode ini gagasan liberalisme merupakan elaborasi antara pemikiran Adam Smith dan David Ricardo yang memiliki beberapa perbedaan. Tokoh yang cukup penting dalam perkembangan pemikiran liberalisme adalah John Stuart Mill (1805-1873). Mill mewarisi pemikiran Adam Smith dan David Ricardo dari ayahnya, seorang ekonom politik James Mill. J.S. Mill kemudian membuat karya *Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy* (1848). Karya Mill ini kemudian menjadi rujukan terpenting dalam penafsiran liberalisme.

Mill melakukan evaluasi terhadap praktik liberalisme selama ini. Ia melihat bahwa filsafat liberalisme telah sangat berhasil dalam melakukan revolusi peradaban Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk penguatan peran-peran individual dan pasar terhadap negara sehingga individu memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi untuk kesejahteraan pribadi serta untuk akumulasi kekayaan. Namun, lebih jauh Mill mengandaikan sebuah filsafat tentang kemajuan sosial dalam pengertian “kemajuan moral

dan spiritual". Dari sana, ia kemudian mengusulkan agar negara melakukan tindakan secara terbatas dan selektif untuk menjaga pasar, dan mengevaluasi kegagalan dan kelemahannya sehingga tercapai kemajuan sosial (rasional) (Syahrir dalam Daniel Bell dan Irving Kristol [ed.], 1988: 11).

Selanjutnya, Mill berpendapat bahwa negara harus tetap berlepas tangan terhadap sebagian besar kehidupan warganya, kecuali dalam pendidikan anak dan bantuan untuk kaum miskin, ketika inisiatif individu tidak mampu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Syahrir dalam Daniel Bell dan Irving Kristol [ed.], 1988: 12-13).

b. John Maynard Keynes dan Konsep Welfare State

Berakhirnya Perang Dunia I menyisakan beragam permasalahan pelik dalam hal ekonomi, politik, dan kesejahteraan umat manusia. Munculnya rezim Marxis-Leninis Uni Soviet, bersamaan dengan timbulnya *Great Depression* di seluruh dunia pada tahun 1930-an mendapatkan perhatian yang serius dari ekonom Inggris, John Maynard Keynes (1883-1946) (Syahrir dalam Daniel Bell dan Irving Kristol [ed.], 1988: 15).

Pada saat itu sedang terjadi fundamentalisme negara dalam kehidupan ekonomi, bahwa negara berwatak *omnipresent* (berada di mana-mana) dan *omnipotent* (kuat di segala sektor) (Mochtar Mas' oed, 1994: 45). Lebih jauh, peran negara mewujudkan dalam bentuk merkantilisme ekonomi yang begitu ekspansionis dengan metode imperialis. Hal tersebut tidak hanya meruntuhkan fondasi keseimbangan ekonomi, tetapi juga menghancurkan tatanan perdamaian dunia. Pada sisi lain, malaise tahun 1930-an juga menunjukkan kepada Keynes bahwa pasar sebagai sebuah kinerja individu yang digerakkan oleh mekanisme *invisible hand* ternyata tidak dapat bekerja menurut asumsi pasar yang rasional. Dalam pasar tidak ada mekanisme yang menjamin persesuaian antara kepentingan individu dan kepentingan publik sehingga tidak dapat berlaku bahwa setiap pengejaran kepentingan individu juga akan berbanding lurus dengan keuntungan yang dicapai publik (Mochtar Mas' oed, 1997: 14).

Keynes juga berpandangan bahwa individu dan pasar cenderung menghasilkan keputusan yang tidak bijaksana ketika dihadapkan

pada keadaan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada cara yang efektif untuk membagi risiko di antara sesama individu dalam pasar sehingga benturan-benturan antar-kepentingan individu tidak bisa dielakkan.

Melalui karya yang sangat monumental, *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) (Sobri, 1987: 9) berpendapat bahwa harus ada keseimbangan kekuatan antara negara dan pasar. Negara dan pasar masing-masing memiliki kelemahan. Untuk itu, Keynes menawarkan kepaduan antara negara yang kuat dan pasar yang kuat. Ia menawarkan adanya keterlibatan negara dalam memperkuat dan memperbaiki beroperasinya mekanisme pasar. Selama ini negara tidak diperkenankan menggunakan kekuasaannya dengan argumen kepentingan nasional yang merkantilistik sehingga akhirnya membunuh keseimbangan pasar.

Di sini Keynes masih menjadi pejuang dalam rangka pasar bebas dalam segala bidang, termasuk perdagangan dan keuangan internasional. Ia menatap perlunya kehadiran pemerintah untuk mengontrol hal-hal yang berada di luar mekanisme pasar yang memakai logika *invisible hand*, terutama di sini adalah masalah yang muncul akibat ekonomi makro, yaitu inflasi dan pengangguran (Mochtar Mas' oed, 1997: 14).

Keynes kemudian menampilkannya sebuah mazhab ekonomi baru yang menyebutkan perlunya sebuah mekanisme liberal dalam kancah internasional, tetapi pada sisi lain, pada ranah domestik, negara memiliki peran yang tegas untuk menanggulangi hambatan berupa risiko, ketidakpastian, dan ketidaktahuan. Pada kemudian hari gagasan ini memengaruhi dan menjadi dasar dalam pembentukan lembaga internasional modern, mulai sistem perdagangan dan keuangan internasional pada satu sisi, sampai pada program asuransi pengangguran, jaminan sosial, dan asuransi deposito bank (Mochtar Mas' oed, 1997: 15).

Pada dekade pasca-Perang Dunia II, perekonomian sebagian besar negara Eropa dan peserta perang lainnya terpuruk hingga titik stagnasi. Menyikapi permasalahan tersebut, para pemimpin negara sekutu berkumpul di Bretton Woods, negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat dengan agenda merumuskan struktur global pascaperang dan malaise ekonomi dunia. Di sinilah mazhab

ekonomi Keynes mendapatkan momentumnya dan Keynes menjadi salah satu delegasi yang mewakili Inggris (Mochtar Mas'ood, 1997: 16).

Dari hasil pertemuan tersebut, lahirlah sistem Bretton Woods sebagai bentuk kompromi Keynesian, kompromi antara pasar bebas dan negara yang kuat atau dikenal dengan *embedded liberalism* (liberalisme terkendali). Dalam sistem ini, perdagangan bebas berlaku dalam kancah internasional, tetapi masing-masing negara berhak menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan inflasi, pengendalian pengangguran, dan penggalakan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, untuk memenuhi konsep ekonomi ala Bretton Woods, dibentuklah lembaga ekonomi, perdagangan, dan keuangan dunia. *International Monetary Fund* (IMF) mewakili lembaga yang bergerak dalam bantuan ekonomi bagi negara-negara yang terpuruk ekonominya akibat perang. Bank Dunia mewakili lembaga keuangan dunia yang mengontrol mekanisme keuangan dunia, serta *International Trade Organization* (ITO) sebagai representasi rezim regulasi perdagangan dunia. Lembaga ini berubah hanya menjadi semacam kesepakatan yang longgar antarnegara dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sebab Amerika Serikat menolak untuk ikut di dalamnya karena dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ketika organisasi ini dianggap menguntungkan, Amerika Serikat masuk dan selanjutnya lembaga ini berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) (Mochtar Mas'ood, 1997: 25).

Sejak saat itu perdebatan dalam sistem perekonomian liberal telah bergeser. Tidak lagi pada perdebatan negara versus pasar, namun seberapa besar tingkat dan sifat intervensi negara terhadap pasar. Dengan demikian, perbedaan antara sistem merkantilisme dan liberalisme menjadi kabur dalam beberapa hal (M. Dawam Rahardjo [ed.], 1987: 41-43).

c. *Kritik terhadap Keynesian Economic dan Lahirnya Neoliberalisme*

Pada akhir tahun 1970-an dalam perekonomian Amerika Serikat dan Eropa Barat terjadi stagflasi dan ketidakpastian masa depan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami penurunan disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi dari tahun ke tahun. Melihat

kondisi ini, para teoretisi memunculkan analisisnya, baik dari aliran *post-keynesian economics*, rezim moneter internasional, *rational expectation*, sampai pada *supply side economics* (Awalil Rizky, 2006: 41).

Wacana yang paling gencar disuarakan berasal dari kelompok yang tergabung dalam blok kanan baru atau dalam politik Amerika Serikat dikenal dengan neo-konservatif, sebuah aliran politik yang mengagungkan peran pasar secara mutlak dalam mekanisme ekonomi, baik pada level nasional maupun global. Mazhab ini yang lebih dikenal dengan neoliberal. Liberal dalam pemaknaan awalnya adalah mekanisme pasar yang bebas dari intervensi negara.

Pemaknaan ini berubah ketika ekonomi Keynesian menjadi paradigma *mainstream*. Keynes melakukan penguatan pada peran negara dalam pengendalian dan penguatan pasar, tetapi tetap menolak kecenderungan pemaknaan sosialis terhadap sistem ekonomi ini – sebagaimana yang berlaku pada negara-negara blok Soviet. Dari sini pergeseran pemaknaan liberal dimulai. Pada bagian lain, kaum liberal klasik yang tergabung dalam partai konservatif kanan mendengungkan kembali liberalisme tersebut yang kemudian terkenal sesuai dengan aliran politiknya, yaitu neo konservatif atau kanan baru (*new right*). Para teoretisi dan pengamat kemudian menyebutnya dengan neoliberal sesuai dengan aliran pemikirannya yang merupakan metamorfosis dari pemikiran liberal klasik ala Adam Smith dan David Ricardo (Mochtar Mas'ood, 1997: 17).

Sebagai metamorfosis dari liberalisme klasik, neoliberalisme memiliki perbedaan epistemologis yang cukup substansial dari nenek moyangnya. Jika liberalisme klasik memandang ekonomi hanya sebagai salah satu mode hubungan sosial antaraktor, neoliberalisme mengembangkan paradigma ekonomi sebagai basis epistemologis dalam memandang setiap relasi antaraktor, baik individu, masyarakat, maupun negara dan hubungan internasional.

3. Teori Feminisme

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika wanita menuntut kesetaraan hak yang sama dengan pria. Istilah ini pertama kali digunakan dalam debat politik di Prancis pada akhir abad ke-19. Menurut June Hannam (2007: 22) dalam buku *Feminism*, kata “feminisme” adalah pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan

antara dua jenis kelamin, tetapi peranan wanita berada di bawah pria; keyakinan bahwa kondisi wanita terbentuk secara sosial sehingga dapat diubah menjadi penekanan pada otonomi wanita.

Sekitar pertengahan abad ke-18, para wanita di Eropa, Amerika Utara, dan para koloninya di Kanada, Selandia Baru dan Australia mengatur bersama pertama kalinya di dalam kelompok dan masyarakat yang bertujuan mencapai perubahan dan perkembangan di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik wanita. Organisasi-organisasi menjadi pusat dari sejarah gerakan feminisme. Mereka terus mendidik dan membuat para wanita menuangkan isi pikirannya. Mereka ingin ideologi mereka dikenali pada masa depan. Mereka menulis autobiografi, riwayat hidup atau sejarah yang kelak akan kita kenal sebagai karakteristik dari awal munculnya feminisme (Hannam, 2007: 7).

Fokus dari organisasi-organisasi pergerakan wanita ini telah membawa perkembangan dalam sejarah feminisme, yang dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada tahun 1860-1920 dan gelombang kedua pada tahun 1960-1970an. (Hannam, 2007: 8).

Setelah feminisme gelombang kedua, dimulailah feminisme gelombang ketiga. Feminisme gelombang ketiga ini masih sulit didefinisikan dan label ini masih mempunyai sangat sedikit arti. Akan tetapi, debat-debat menunjukkan feminisme masih menunjukkan vitalitasnya dan wanita memiliki potensi untuk mengambil tindakan tidak hanya secara personal, tetapi juga secara politis. Para wanita telah dan terus menemukan berbagai macam tempat untuk menjalankan dan mengekspresikan identitas politik dan kampanye masalah tersendiri secara optimis yang dapat menjadi batu loncatan untuk lebih luas lagi (Hannam, 2007: 166).

Paham feminisme berkembang pesat dan lama-kelamaan menyebar ke negara lain, misalnya Asia. Menurut June Hannam, pada umumnya gerakan feminisme di Asia berfokus pada meluasnya industrialisasi ketika negara-negara kaya di area ini mengeksploitasi para wanita di negara lain yang masih berkembang dan hal ini menghasilkan teori feminis baru yang kompleks. Misalnya, para wanita Jepang yang menghubungkan penindasan mereka, khususnya dalam kekerasan di dalam rumah tangga dengan penindasan wanita

di Asia Tenggara yang merupakan akibat dari bangsa Jepang yang mencari tenaga kerja yang murah (Hannam, 2007: 153-154).

Kesadaran feminis di Jepang merupakan bagian dari perlawanan perkembangan modernisasi (Mackie, 2003: 2). Dalam membentuk negara modern industrialisasi, wanita dideskripsikan sebagai “istri yang baik dan ibu yang bijaksana yang berperan untuk reproduksi dan mengurus anak. Mereka berperan sebagai pendukung pasif dalam pembentukan “negara yang kaya dan tentara yang kuat” (*fukoku kyōhei*). Setelah itu, pada akhir abad ke-19, setelah tersebarnya paham liberalisme, tercetuslah teori feminisme pertama. Beberapa aktivis feminis terkemuka menjalankan gerakan “Hak populer dan kebebasan” (*Jiyū Minken Undō*) pada tahun 1870-1880-an, ketika beberapa wanita kelas menengah mengikuti kegiatan filantropis yang merupakan bentuk dari politik kepura-puraan yang tidak menentang stereotipe feminisme (Mackie, 2003: 3).

BAB 6

TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEORY*)

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat yang serbainstan dan asal jadi, serta budaya konsumtif semakin mendarah daging pada sebagian besar masyarakat. Padahal, seharusnya hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan, dan pembangunan kulit. Konsep *Sustainable Development* atau disebut juga SD memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam pada masa depan, generasi yang akan datang pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga tiang utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan karena menimbulkan hubungan sebab akibat. Hubungan ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus

berjalan (*viable*). Adapun hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar terus bertahan (*bearable*).

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian pada lingkungan, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sedangkan eksploitasi terhadapnya dilakukan terus-menerus. Pembangunan yang dilakukan pada masa sekarang hendaknya tidak merusak lingkungan, boros terhadap SDA, dan tetap memerhatikan generasi yang akan datang. Sekalipun demikian, generasi yang akan datang juga tidak boleh dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Mereka harus diberi kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

B. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Ada beberapa pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987, pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Laporan dari KTT Dunia 2005 menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa “keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Dengan demikian, “pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual”.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi

sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang semuanya dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan juga harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: ekuitas sosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini, secara sadar harus diusahakan investasi dalam modal: ekonomi (finansial, modal mesin, dan lain-lain), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan, dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi-sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tidak terbaharui). Juga disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, tetapi juga mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut tiga pilar pembangunan berkelanjutan).

Faktor sosial, maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi yang erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat agar masyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan masa mendatang. Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan adalah: (1) terpeliharanya proses ekologi yang esensial, (2) tersedianya sumber daya yang cukup, dan (3) lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai (Otto, 2004: 161).

Sutamihardja (2004: 76) menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mewujudkan hal berikut.

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi (*intergeneration equity*), yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan harus memerhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.

2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem untuk menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antargenerasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan, baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitatnya.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di kota tersebut, proses-proses yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemikiran dan pemahaman bahwa kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah ancaman utama pembangunan. Ada tiga kriteria pembangunan berkelanjutan di perkotaan, yang disebut 3 pro, yaitu sebagai berikut.

1. Pro-keadilan sosial, artinya keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender
2. Pro-ekonomi kesejahteraan, artinya pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan.
3. Pro-lingkungan berkelanjutan, artinya etika lingkungan non-antroposentris menjadi pedoman hidup masyarakat sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumber daya alam

vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non-material.

C. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana, tetapi kompleks sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal (Fauzi, 2004), konsep keberlanjutan ini mengandung dua dimensi. *Pertama*, dimensi waktu karena keberlanjutan menyangkut hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. *Kedua*, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Pezzey (1992) dalam Fauzi (2004) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Keberlanjutan dari sisi statik, yaitu pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”.

Perman (1997) dalam Fauzi (2004) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian berikut.

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*).
2. Keberlanjutan adalah kondisi sumber daya alam yang dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi pada masa mendatang.
3. Keberlanjutan adalah kondisi sumber daya alam (*natural capital stock*) yang tidak berkurang sepanjang waktu (*non-declining*).
4. Keberlanjutan adalah kondisi sumber daya alam yang dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam.

5. Keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Haris (2000) dalam Fauzi (2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman.

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

D. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada kita dapat merumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Ada empat komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, partisipasi, keberagaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang (Askar Jaya, t.t.: 2004).

Pertama, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan. Pembangunan harus dilandasi hal-hal, seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, peran dan kesempatan perempuan, ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Akan tetapi, pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur.

Kedua, pembangunan yang menghargai keragaman. Pemeliharaan keragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa

kini dan masa datang. Keragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

Ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

Keempat, pembangunan yang membutuhkan perspektif jangka panjang. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi sehingga perlu dipertimbangkan.

Budimanta (2005) menyatakan bahwa dalam proses pembangunan berkelanjutan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Cara berpikir yang integratif, yaitu pembangunan harus melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial, dan manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, ataupun melaksanakan pembangunan tersebut.
2. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Saat ini para pengambil keputusan dalam pembangunan lebih menggunakan kerangka pikir jangka pendek, cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis energi (karena saat ini kita telah menjadi nett importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi

surplus energi), moda transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan, dan seterusnya.

3. Mempertimbangkan keragaman hayati. Untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang, diperlukan perawatan keragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
4. Distribusi keadilan sosial ekonomi, yaitu pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

E. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Surna T. Djajadiningrat (2005: 123) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal: (1) ekologis, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, (4) politik, dan (5) keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

Pertama, keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis, beberapa hal yang harus dilakukan adalah: (1) memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara, dan seluruh kehidupan berkelanjutan; (2) tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan, yaitu daya dukung, daya asimilatif, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya terpulihkan; (3) melaksanakan kegiatan yang tidak mengalir dengan menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumber daya yang tidak dapat dipulihkan berarti pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan dapat dikembangkan substitusi dengan sumber daya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan dengan pemanfaatannya sekecil mungkin.

Kedua, keberlanjutan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar ini, diperlukan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan ekonomi makro ada empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro tersebut mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

Ketiga, keberlanjutan sosial budaya, yang dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran, yaitu: (1) stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga; (2) memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut; (3) mempertahankan keragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi; (4) mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Keempat, keberlanjutan politik. Keberlanjutan politik diarahkan pada kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi pada bidang ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, demokrasi yang dilaksanakan perlu memerhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman.

Kelima, keberlanjutan pertahanan, seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar yang langsung dan tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara, dan bangsa (Askar Jaya, t.t.: 2004).

F. Ruang Lingkup Pembangunan Berkelanjutan

1. Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor berikut.

- a. *Kondisi sumber daya alam.* Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan.
- b. *Kualitas lingkungan.* Lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan, akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.
- c. *Faktor kependudukan* adalah unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan.

Untuk memungkinkan pembangunan secara berkelanjutan, diperlukan pokok-pokok kebijakan berikut.

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
- c. Penanggulangan pencemaran air, udara, tanah mengutamakan:
 - 1) penanggulangan bahan beracun dan bahan berbahaya agar limbah ini dapat dikendalikan dan tidak membahayakan masyarakat;

- 2) penanggulangan limbah padat, terutama di kota-kota besar agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan;
 - 3) penetapan buku mutu emisi dan *efluen*;
 - 4) pengembangan baku mutu air dan udara.
- d. Pengembangan keragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
 - e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui:
 - 1) pengelolaan daerah aliran sungai;
 - 2) rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan dan galian C;
 - 3) pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
 - f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
 - g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
 - i. Pengembangan kerja sama luar negeri.

2. *Pengembangan Tata Ruang*

Penataan ruang adalah usaha untuk pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik dan pemanfaatan ruang yang optimal, seimbang, serasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Penataan ruang bertujuan mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional secara serasi dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara berkelanjutan jika penataan ruang memerhatikan usaha-usaha:

- a. perlindungan terhadap proses ekologi dan penduduk kehidupan, misalnya menjaga tetap berfungsinya daur *biogeofisik* yang ada di alam;
- b. pelestarian keragaman jenis dan *plasma nutfah* (sumber genetika);
- c. pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang adalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan tersedianya luas lahan dan ruang, yang relatif tidak bertambah. Indonesia memiliki daratan kurang lebih 193 juta ha, luas lautan hingga batas ZEE dan luas angkasa hingga batas GSO.
- b. Tidak semua areal hutan dan ruang cocok untuk suatu kegiatan manusia.
- c. Terjadinya pemanfaatan lahan dan ruang yang saling mengganggu antara berbagai kegiatan.
- d. Belum adanya pengaturan kelembagaan yang jelas untuk penanganan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan, terutama disebabkan belum adanya perangkat perundang-undangan tata ruang dan belum siapnya perangkat pengelolaan penataan ruang (Surna T. Djajainingrat, 1994: 6-10).

Walaupun dihadapkan pada kendala tersebut, usaha penataan ruang tetap perlu dilakukan agar segala tindakan pemanfaatan sumber daya bagi kepentingan kebutuhan manusia tidak merugikan kehidupan manusia tersebut. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penatagunaan ruang, meliputi tatanan penyediaan peruntukan penggunaan tanah, air, udara, dan sumber daya lainnya, untuk meletakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya yang sesuai secara fisik dan hukum.

3. Penetapan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah

Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam media lingkungan

sehingga dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, air digolongkan peruntukannya sebagai berikut: (1) air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu; (2) air yang dapat digunakan sebagai bahan air minum; (3) air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan; (4) air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.

Pada tanggal 14 Desember 2001 ditetapkan PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam peraturan pemerintah ini, Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/kota menyusun rencana pendayagunaan air.

BAB III, Pasal 18 PP No. tahun 2001 menetapkan bahwa pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Provinsi dan lintas batas negara. Sementara pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah propinsi, sedangkan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota.

Baku mutu limbah cair ditetapkan oleh menteri yang membidangi lingkungan hidup. Menteri lain dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, untuk melindungi kualitas air, Gubernur setelah berkonsultasi dengan menteri dapat menetapkan baku mutu limbah cair lebih hebat dari baku mutu limbah cair yang ditetapkan Menteri.

4. Penerapan PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Walaupun PP No. 27 tahun 1999 telah lama berlaku, gambaran keadaan yang telah dicapai dalam kurun waktu tersebut belum optimal. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya perhatian terhadap penerapan AMDAL, terjadinya penyimpangan, adanya beberapa peraturan yang dirasakan kurang operasional, tidak adanya sistem pengawasan yang efektif.

AMDAL perlu dilakukan seawal mungkin dalam daur proyek, yaitu bersama-sama dengan eksplorasi, telaah kelayakan rekayasa, dan telaah kelayakan ekonomi sehingga AMDAL menjadi sebuah

komponen integral dalam telaah kelayakan proyek. Sebab-sebab penting tidak efektifnya AMDAL adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan AMDAL yang terlambat sehingga tidak memengaruhi proses perencanaan, tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan program atau proyek dan menaikkan biaya proyek.
- b. Kurangnya pengertian beberapa pihak tentang arti dan peranan AMDAL sehingga AMDAL dilaksanakan sekadar untuk memenuhi peraturan undang-undang atau disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek,.
- c. Belum cukup berkembangnya teknik AMDAL untuk dibuatkan yang relevan dan rekomendasi yang spesifik dan jelas.
- d. Kurangnya keterampilan pada Komisi AMDAL untuk memeriksa laporan AMDAL.
- e. Belum adanya pemantauan yang baik untuk mengetahui apakah rekomendasi AMDAL yang tertera dalam PKL benar-benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilaksanakan dalam implementasi proyek (Otto Soemartono, 2001: 27).

5. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan yang Berwawasan Lingkungan

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, terutama dalam proses administrasi perizinan lingkungan dan AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi setiap orang di Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 23 tahun 1997, Bab III, Pasal 5, “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat”.

Pasal 10 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan sebagai berikut: “pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup”.

Pendidikan lingkungan bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.

Dengan memerhatikan tujuan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses pendidikan lingkungan adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.
- b. Membantu individu dan masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan, dan memecahkan permasalahan lingkungan.
- c. Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya, melalui penyuluhan tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Pendidikan lingkungan perlu memenuhi dua kebutuhan masyarakat yang berkaitan, yaitu:

- a. mengembangkan sumber daya manusia yang berkemampuan teknis yang dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam, keterampilan yang dibutuhkan untuk menilai dan mengelola lingkungan;
- b. menumbuhkan sikap dan perilaku pada masyarakat yang peka dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kebutuhan pertama diarahkan pada pemecahan masalah lingkungan, sedangkan kebutuhan kedua diarahkan pada peningkatan kemampuan *public pressure* dalam mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan (Muhamad Erwin, 2009: 58-59).

6. *Pendekatan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*

Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting memerlukan pengelolaan sehingga dampak yang timbul dapat ditoleransi lingkungan. Dalam pengembangan dampak positif dan pencegahan terjadinya dampak negatif, pengelolaan dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, kelembagaan, dan teknologi (M. Syahri, 2013: 51).

Selanjutnya, Barrow berpendapat tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. merupakan perkembangan dan penyebaran yang memadai dan disesuaikan dengan semua kondisi yang harus ditingkatkan;
- b. menuntut pendekatan proaktif untuk pembangunan dan harus mengintegrasikan erat dengan disiplin lain;
- c. tanpa manajemen lingkungan proaktif, pembangunan tidak mungkin menjadi berkelanjutan dan manusia akan lebih rentan terhadap bencana.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, kaidah-kaidah ekosistem berikut harus diperhatikan:

- a. ekosistem diatur dan dikendalikan secara ilmiah;
- b. ekosistem mempunyai daya kemampuan yang optimal dalam keadaan seimbang;
- c. ada interaksi antara seluruh unsur lingkungan yang saling memengaruhi dan bersifat timbal balik;
- d. interaksi terjadi antara:
 - 1) komponen *biotis* dengan komponen-komponen *abiotis*;
 - 2) sesama komponen *biotis*;
 - 3) sesama komponen-komponen *abiotis*.
- e. Interaksi dikendalikan menurut dinamika yang stabil, untuk mencapai suatu optimum mengikuti perubahan yang dapat ditimbulkan terhadapnya dalam ukuran batas kesanggupannya;

- f. setiap ekosistem memiliki sifat yang khas di samping yang umum dan secara bersama-sama dengan ekosistem lainnya mempunyai peranan terhadap ekosistem keseluruhannya (*biosfer*);
- g. setiap ekosistem bergantung dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tempat, waktu dan masing-masing membentuk basis perbedaan antara ekosistem itu sendiri sebagai pencerminan sifat-sifat khas;
- h. antara satu dan yang lain ekosistem juga melibatkan diri untuk memilih interaksinya pula secara tertentu (M. Syahri, 2013: 53).

7. *Lingkungan dan Pembangunan*

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan itu luas dan cara pengelolannya sangat beragam. Pengelolaan lingkungan yang banyak dilakukan oleh masyarakat banyak dinamakan: “pengelolaan lingkungan secara rutin atau kebiasaan”. Contohnya, pengelolaan lingkungan secara rutin adalah pengelolaan usaha tani tradisional, pemeliharaan dan pengaturan kebersihan rumah tinggal dan pekarangannya, dan sebagainya.

Dalam bidang pembangunan nasional, pengertian tentang perencanaan adalah gagasan perihal tindakan atau langkah-langkah dalam pengelolaan sesuatu atas dasar hukum yang diajarkan oleh ilmu, khususnya ilmu pengelolaan.

Perencanaan pengelolaan lingkungan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada: (a) perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena sebab alamiah ataupun karena tindakan manusia; (b) perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.

Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat proyek pembangunan yang sedang direncanakan berupa pengukuran dampak lingkungan proyek. Salah satu cara pengukuran adalah “analisis dampak lingkungan” (Kaslan A. Thohir, 1991: 283).

8. *Isu-isu Pembangunan yang Berhubungan dengan Pembangunan Berkelanjutan dari Segi Positif dan Negatif*

Produk-produk kebudayaan modern melalui saluran dan teknologi komunikasi canggih telah memengaruhi kebudayaan kita. Situasi ini sangat memengaruhi sistem sosial bangsa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan sistem sosial ini memengaruhi hubungannya dengan ekosistem (sistem biologi). Saat ini telah lahir perubahan sosial yang sangat cepat dan kompleks dari berbagai sumber. Perubahan ini merupakan kekuatan global, yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif berikut.

- a. Perubahan yang meliputi kehidupan fisik dan kimia, seperti bom panas di perkotaan (*urban heat island*), perubahan iklim, efek rumah kaca, pencemaran oleh gas-gas beracun, *ozon* berlubang, banjir, kebisingan, kadar debu semakin meningkat, dan lainnya.
- b. Lingkungan biologi mulai gundul, semakin banyak habitat menjadi rusak dan musnah sehingga semakin banyak flora dan fauna lainnya menjadi langka atau musnah.
- c. Perubahan pada lingkungan sosial budaya dan ekonomi terhadap gaya hidup masyarakat. Masalah urbanisasi, berbagai perubahan atau pergeseran nilai, seperti pola makan, pola pakaian, pola pikir, sopan santun (etika), dan perubahan nilai lainnya.

9. *Beberapa Isu Utama Pengembangan Wilayah di Negara yang Sedang Berkembang*

Pertama, dualisme ekonomi. Adanya berbagai tatanan sosial yang bersifat dualistis merupakan tatanan sosial yang sering menjadi ciri penting, yang membedakan perkembangan wilayah di negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara industri maju. Tatanan sosial modern merupakan produk interaksi sosial dengan tatanan luar yang di *import*, sedangkan tatanan sosial tradisional merupakan corak khas milik pribumi. Pengertian dualisme sosial ini pertama kali diformulasikan oleh Boeke.

Perkembangan sektor ekonomi modern, yang timbul sebagai akibat perkembangan kegiatan perusahaan-perusahaan perkebunan

dan pertambangan, berimplikasi terhadap perubahan kegiatan ekonomi di sektor tradisional. Dengan demikian, kegiatan tukar-menukar bertambah luas dan kegiatan produksi sektor tradisional tidak hanya untuk keperluan sendiri (*subsisten*), tetapi juga untuk pemasaran, baik dalam wilayah maupun *ekspor*.

Dualisme teknologi dikemukakan oleh Higgins (1978) sebagai adanya ketimpangan penggunaan teknologi dan manajemen produksi antara sektor tradisional dan sektor modern yang lebih maju, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya ketimpangan tingkat produktivitas di antara kedua sektor tersebut.

Dualisme finansial dikemukakan oleh Myint (1976) untuk menyatakan tipe pasar uang, yaitu: (a) pasar uang yang terorganisasi pada pihak lain, terdiri atas bank-bank komersial dan badan-badan keuangan lainnya, yang pada umumnya terpusat di pusat-pusat perdagangan dan kota-kota, sebagai penopang sektor ekonomi modern; (b) pasar uang yang tidak terorganisasi terdiri atas tuan tanah, *ceti* desa, pedagang perantara, dan pemilik warung di daerah sektor ekonomi tradisional.

Kedua, lingkaran perangkap kemiskinan, yang telah diformulasikan oleh Clifford Geertz.

Pada sektor masyarakat tradisional banyak sumber daya alam yang belum dikembangkan secara optimal sebagai akibat terbelakangnya masyarakat tersebut dan kekurangan modal. Hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas di sektor tersebut sangat rendah yang berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah. Pada kondisi tingkat pendapatan yang rendah tersebut, kemampuan menabung sangat rendah dan tingkat *demand*-nya rendah akibat rendahnya tingkat konsumsi. Tingkat *demand* yang rendah menyebabkan rangsangan investasi yang rendah pula. Dengan demikian, jumlah modal yang terbentuk masih tetap di bawah yang dibutuhkan untuk memutuskan lingkaran perangkap kemiskinan tersebut.

Ketiga, pembangunan inter-regional eksploitatif-asimetrik. Gunar Myrdall (1957) memformulasikan sebab-sebab bertambah buruknya ketimpangan perkembangan ekonomi antarwilayah. Teori klasik berkeyakinan bahwa mekanisme pasar dalam jangka panjang dapat menciptakan struktur perkembangan wilayah yang seimbang. Ada dua kekuatan penting yang dikemukakan Myrdal, yaitu:

- a. wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang menghambat perkembangan wilayah yang masih terbelakang (*back-wash effects*);
- b. wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang mendorong perkembangan wilayah yang masih terbelakang (*spread effect*).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *backwash effect* adalah sebagai berikut.

- a. Corak perpindahan penduduk dari wilayah yang masih terbelakang ke wilayah maju. Sejumlah tenaga kerja yang berpendidikan/berkualitas lebih dinamis dan selalu mencari alternatif yang lebih baik.
- b. Arus investasi yang tidak seimbang. Karena struktur masyarakatnya yang lebih konservatif, permintaan modal di wilayah terbelakang sangat minimal.
- c. Pola dan aktivitas perdagangan yang didominasi oleh industri-industri di wilayah yang lebih maju sehingga wilayah terbelakang sangat sukar mengembangkan pasar bagi hasil-hasil industrinya.
- d. Adanya jaringan-jaringan pengangkutan yang jauh lebih baik di wilayah yang lebih maju sehingga kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien (menguntungkan).

Keempat, perkembangan inter-sektor tidak berimbang. Adanya sektor industri yang mampu menampung *surplus* produksi pertanian akan meningkatkan pendapatan sektor pertanian. Demikian pula, apabila terjadi *surplus* tenaga kerja pada sektor pertanian yang dapat ditampung di sektor industri tetap menjaga tingkat pendapatan yang tinggi di sektor pertanian. Tingkat pendapatan yang tinggi merangsang berbagai kebutuhan akan barang-barang non-pertanian. Kondisi ini bisa dimanfaatkan sebagai pasar bagi hasil-hasil industri. Akhirnya, hubungan sinergi antar-kedua sektor tersebut dapat terus merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah.

Secara *implisit* dijelaskan dalam uraian tersebut bahwa *output* dari masing-masing sektor ekonomi berhubungan secara komplementer.

Dengan demikian, lebih dijamin adanya pertumbuhan permintaan yang seimbang antarsektor sehingga pertumbuhan sektor akan terus berimbang.

Kelima, strategi pengembangan wilayah baru. Pengembangan wilayah merupakan bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu wilayah. Untuk itu, diperlukan strategi-strategi yang efektif untuk suatu percepatan pembangunan. Di samping strategi untuk wilayah yang tengah berkembang, strategi pembangunan wilayah baru, seperti di luar Pulau Jawa menjadi sangat penting. Kebijakan pembangunan selalu dihadapkan pada pilihan pendekatan pembangunan yang terbaik. Secara teoretis strategi pengembangan wilayah baru dapat digolongkan dalam dua kategori strategi, yaitu *demand side* dan *supply side strategy*.

- a. **Strategi *demand side***, yaitu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang dan jasa dari masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah meningkatkan taraf hidup penduduk.

Dalam pendekatan *demand side strategy*, tujuan pengembangan wilayah dilakukan dengan berbagai upaya meningkatkan taraf hidup penduduk di suatu wilayah. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan permintaan terhadap barang non-pertanian. Adanya peningkatan permintaan tersebut akan meningkatkan perkembangan sektor industri dan jasa-jasa yang akan lebih mendorong perkembangan wilayah tersebut. Program transmigrasi merupakan kasus yang sangat menarik dari *demand side strategy*.

- b. **Strategi *supply side***, yaitu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan produksi yang berorientasi keluar. Tujuan penggunaan strategi ini adalah meningkatkan pasokan dari komoditas, yang pada umumnya diproses dari sumber daya alam lokal.

Keuntungan penggunaan strategi *supply-side* adalah prosesnya cepat sehingga efek yang ditimbulkannya sangat terlihat. Adapun beberapa permasalahan yang sering muncul dari digunakannya strategi ini adalah: (1) timbulnya *enclave* karena keterbatasan kapasitas (pengetahuan, keahlian, dan kompetensi)

penduduk lokal sehingga hanya masyarakat tertentu dengan jumlah yang terbatas atau pendatang dari luar kawasan yang menikmatinya; (2) peka terhadap perubahan-perubahan ekonomi di luar wilayah (faktor eksternal) (Ernan Rustiadi, 2011: 139).

BAB 7

TEORI PEMBANGUNAN MANUSIA

A. Pengertian Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk, melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan (*United Nation Development Programme/UNPD*). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subjek pembangunan, yang artinya pembangunan dilakukan bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat.

Pembangunan manusia lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan produksi komoditas serta akumulasi modal. Pembangunan manusia perlu mendapatkan perhatian karena beberapa hal berikut. *Pertama*, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan kemiskinan. *Kedua*, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi tidak bisa mengurangi masalah sosial, seperti penyalahgunaan narkoba.

Pembangunan manusia meliputi dua unsur pokok. *Pertama*, materi yang dihasilkan dan dibagi. *Kedua*, masalah manusia yang menjadi manusia pembangun. Mengenai manusia pembangun,

para ahli ekonomi memang membicarakan sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi, dalam bab ini, pembicaraan tentang manusia lebih menekankan aspek keterampilan. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai masalah teknis untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan keterampilan, melalui bermacam sistem pendidikan.

Condrad Phillip Kottak dalam Michael M. Cernea (1988) menyatakan bahwa mengutamakan manusia dalam campur tangan pembangunan berarti memenuhi kebutuhan bagi perubahan yang dirasakan manusia, mengidentifikasi sasaran dan strategi bagi perubahan yang sesuai dengan budaya; membangun yang tepat-guna secara budaya, dapat dilaksanakan, dan rancangan yang efisien bagi inovasi; lebih bertujuan memanfaatkan daripada menentang kelompok dan organisasi yang ada; memantau dan mengevaluasi secara informal peserta selama pelaksanaan; mengumpulkan informasi terperinci sebelum dan sesudah pelaksanaan sehingga dampak sosioekonomi dapat dinilai secara akurat.

Konsep *human development* atau pembangunan manusia dibahas oleh UNDP untuk pertama kalinya pada era kotemporer dalam *Human Development Report* 1990. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menguntungkan manusia-masyarakat, maka *high national income* dan *growth* tidak secara langsung menjamin *human development* karena kadang-kadang hanya mementingkan pihak elite politis dan ekonomi.

UNDP memberikan definisi berikut: *human development is a process of enlarging people's choices. The most critical ones are to lead a long and healthy life, to be educated and to enjoy a decent standard of living. Additional choices include political freedom, guaranteed human rights and self respect.*

Dengan merujuk kepada Mahbub Haq (1995), pemahaman pembangunan manusia menunjukkan lima karakteristik dan empat komponen yang membentuknya. Kelima komponen tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Pembangunan manusia memusatkan perhatian kepada manusia *people in the center of the stage* sehingga pendekatan pembangunan diartikan seperti aksi perluasan pilihan atau alternatif bagi rakyat *expanding people's choice's*. Dalam semua proses pembangunan

dipertanyakan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan manfaat dari pembangunan?

2. Menekankan pada kedua sisi yang dimiliki pembangunan manusia, yaitu *formation of human capabilities* (peningkatan *health, knowledge, dan skills*) dan *people acquired capabilities* (untuk pekerjaan, kegiatan produktif, partisipasi dalam urusan politik, dan lainnya). Hal itu bermaksud bahwa proses pembangunan seharusnya memperdayakan masyarakat dengan menyediakan berbagai institusi atau prasarana untuk meningkatkan kapabilitas manusia sehingga mereka mampu beraktivitas di tengah masyarakat untuk mendorong pembangunan.
3. Untuk memperluas pilihan bagi rakyat diperlukan *means*, yaitu pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan *gross national product*. Sekalipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memberi kesejahteraan masyarakat, tetapi harus didistribusikan secara merata melalui kebijakan yang jelas.
4. *Human development* merupakan sebuah teori dan pendekatan yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Perhatian tidak hanya terfokus pada faktor ekonomi, tetapi juga pada semua faktor yang menyangkut suatu *society*.
5. Manusia merupakan tujuan, juga sarana dari pembangunan. Adapun *economic growth* adalah sebagai sarana untuk mencapai *human development*.

Adapun empat komponen penting dalam paradigma *human development* adalah sebagai berikut.

1. *Equity*, yaitu adanya keadilan dalam memperluas pilihan dan kesempatan untuk manusia. Hal ini berarti adanya akses terhadap kesempatan yang merata. Peningkatan GNP didistribusikan kepada masyarakat, melalui kebijakan fiskal yang optimal, *land reform*, akses kepada kredit, *political opportunities*, dan penghapusan hambatan sosial atau legal yang membatasi kaum minoritas kepada kesempatan ekonomi dan politik.
2. *Sustainability*, yaitu tingkat kesejahteraan yang dinikmati masa kini harus bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan kata lain, kelestarian dari semua kapital: kapital fisik; finansial;

lingkungan hidup; sumber daya manusia, dengan kapasitas memperbarui dan meregenerasi kapital tersebut.

3. *Productivity*, yaitu peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui *investment in people* agar potensial maksimal mereka dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan. Di sini manusia dilihat sebagai sarana atau partisipasi dari pembangunan.
4. *Empowerment* dimaksudkan pada pembangunan berdasarkan partisipasi penuh masyarakat, yaitu masyarakat bukan hanya sebagai penerima, melainkan juga aktif dalam menentukan pilihan mengenai cara membentuk hidup mereka sendiri. Pemberdayaan menurut Haq adalah investasi dalam pendidikan dan kesehatan agar masyarakat dapat mengambil keuntungan dari peluang yang ditawarkan pasar, akses kepada kredit dan *productive assets*; juga pemberdayaan yang sama kepada wanita dan pria agar mempunyai kesempatan bersaing yang setara.

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai suatu “model” pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk:

1. tentang penduduk, berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya;
2. untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri;
3. oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan (UNDP, HDR 1990).

Menurut UNDP, upaya ke arah “perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah

(BPSUNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Perbandingan Antarprovinsi 1990-1993).

B. Arah Pengembangan Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lainnya, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai *input* dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya, yaitu tanah, modal, dan mesin. Manusia digunakan sebagai sarana untuk mengejar tingkat *output* yang tinggi, tetapi dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang telah dihasilkan.

Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar keluar dari perangkat kemiskinan tanpa memiliki pilihan dalam meningkatkan kualitas hidup. Adapun pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan hanya sebagai penerima, bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan (agen pembangunan). Semua model pembangunan tersebut dinilai masih bersifat parsial/tunggal.

Menurut Wiwik D. Pratiwi, produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan merupakan empat hal pokok yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memiliki dua sisi yang harus seimbang. *Pertama*, peningkatan kapabilitas fisik penduduk, seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan keterampilan. *Kedua*, pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Berdasarkan pemahaman dari konsep tersebut, pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas kegiatan ekonomi dari berbagai sektor dapat berjalan optimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas seharusnya dibangun sesuai dengan arah pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya upaya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi menumbuhkan kesempatan kerja yang menjadi jembatan yang menghubungkan pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia mencakup sisi produksi ataupun distribusi dari berbagai komoditas dan pemanfaatan kemampuan manusia.

C. Pemberdayaan (*Empowerment*)

1. *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat*

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Hal ini berarti ada pergeseran tentang konsep pembangunan masyarakat. Jika awalnya masyarakat ditempatkan sebagai objek pembangunan, sekarang masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dan masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan.

Untuk itu, pendekatan yang dilakukan adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan ini lebih bersifat memberdayakan masyarakat atau dikenal dengan model "Pemberdayaan Masyarakat" (*Community Development*). Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi, dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan kata lain, menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yaitu yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Edi Suharto, 2009: 99). Konsep ini lebih luas dari semata-mata memengaruhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya banyak

dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap pertumbuhan pada masa lalu (Zaenal Abidin dkk., 2006: 117).

Berdasarkan konsep tersebut, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan Sumodiningrat (1998: 98), yaitu sebagai berikut.

Pertama, upaya itu harus terarah atau secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan, bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuannya adalah bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak masyarakat dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sebagaimana dijelaskan Edi Suharto (2009: 102), yaitu sebagai berikut.

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Untuk itu, diperlukan langkah-langkah positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses

ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, yang keberdayaannya sangat kurang.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dalam proses pemberdayaan sehingga yang lemah tidak boleh menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci berikut.

- a. Kekuasaan. Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan. Kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut dan elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.
- b. Kekurangberuntungan. Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Dengan demikian, pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural, dan personal (Miftachul Huda, 2009: 272-273).

Pendapat lain tentang tujuan dari gerakan pemberdayaan masyarakat (Zaebal Abidim, 2006: 130-131) adalah sebagai berikut.

- a. Membantu percepatan pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat, yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti air bersih, listrik, perumahan, jalan, dan usaha ekonomi produktif.
- b. Mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.
- c. Mendorong dan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga masyarakat lokal, seperti DPD, PKK, KUD, Karang Taruna, untuk berkiprah secara fungsional dalam proses pembangunan masyarakat.
- d. Mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, sebagai alternatif dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, dan menjaga stabilitas pembangunan.
- e. Mengembangkan jaringan kerja di antara lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat agar terjalin kerja sama dan keterpaduan antarprogram pemenuhan kebutuhan dasar, program pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan program peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f. Mengembangkan pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat.

Ada lima macam prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam Sutrisno (2005: 18), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Partisipasi (*participation*): setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

3. *Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan*

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Ada berbagai bentuk atau program pemberdayaan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan politik untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaining* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar risiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* untuk meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, secara umum kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan berikut.

Pertama, bantuan modal. Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek permodalan ini adalah: (1) pemberian bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

Kedua, bantuan pembangunan prasarana. Untuk mendorong masyarakat berdaya, diperlukan bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktivitasnya.

Ketiga, bantuan pendampingan. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat.

Keempat, kelembagaan merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga adalah memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan sebagainya.

Keempat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat, yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri.

4. Aktor Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.

- a. Peranan pemerintah teramat penting. Untuk itu, birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Beberapa upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
- 1) memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat;
 - 2) membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan kepada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri;
 - 3) menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Hal ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian;
 - 4) membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat;
 - 5) membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri;
 - 6) menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah. Untuk menjalankan misinya, birokrasi harus ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hierarkis, seperti aparat desa dan kecamatan maupun fungsional, seperti PPL, guru, dokter, dan bidan.
- b. Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat. Organisasi yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan

lokal. LSM berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, dan menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya, LSM sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri.

Lembaga masyarakat tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasiformal, seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri, seperti kelompok arisan, kelompok paketan, dan sebagainya

D. Kerja Sama (*Cooperation*)

Kerja sama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (yaitu, *in-group*-nya) dan kelompok lainnya. Kerja sama akan bertambah kuat apabila ada bahaya luar yang mengancam atau ada tindakan luar yang menyinggung kesetiaan, yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seorang atau segolong orang. Kerja sama dapat bersifat agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang lama mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas karena keinginan pokoknya tidak dapat terpenuhi karena adanya rintangan yang bersumber dari luar kelompok itu. Keadaan tersebut dapat menjadi lebih tajam lagi apabila kelompok tersebut merasa tersinggung atau dirugikan sistem kepercayaan atau dalam salah satu bidang sensitif dalam kebudayaan. Pentingnya fungsi kerja sama digambarkan oleh Charles H. Cooley sebagai berikut:

“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna.”

Dalam teori-teori sosiologi akan dapat dijumpai beberapa bentuk kerja sama. Kerja sama tersebut lebih lanjut dibedakan lagi dengan kerja

sama spontan (*spontaneous cooperation*), kerja sama langsung, (*directed cooperation*), kerja sama kontrak (*contractual cooperation*, dan kerja sama tradisional (*traditional cooperation*). Kerja sama spontan adalah kerja sama yang serta-merta. Kerja sama langsung merupakan hasil dari perintah atasan atau penguasa. Kerja sama kontrak merupakan kerja sama atas dasar tertentu dan kerja sama tradisional merupakan bentuk kerja sama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial.

Ada lima bentuk kerja sama, yaitu sebagai berikut.

1. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong.
2. *Bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.
3. Kooptasi (*cooptation*), yaitu proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
4. Koalisi (*coalition*), yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih, yang mempunyai tujuan sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih mempunyai struktur tidak sama antara satu dan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utamanya adalah mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, sifatnya adalah kooperatif.
5. *Join Ventrue*, yaitu kerja sama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batubara, perfilman, perhotelan, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2004: 65).

E. Kesetaraan (*Equity*)

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan keragaman. Konsep kesetaraan (*equity*) dapat dikaji dengan pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pada pendekatan formal, kita mengkaji kesetaraan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun norma, sedangkan pendekatan substantif mengkaji konsep kesetaraan berdasarkan keluaran ataupun proses terjadinya kesetaraan. Konsep kesetaraan

biasanya dihubungkan dengan gender, status, hierarki sosial, dan berbagai hal lainnya, yang mencirikan perbedaan dan persamaan.

Kesederajatan adalah sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan terhadap hak-hak itu agar setiap manusia mampu merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban agar semua bisa melaksanakan sehingga terciptanya tertib kehidupan.

Kesetaraan dalam Kehidupan Masyarakat

Dengan identitas pluralis dan multikulturalis, bangunan interaksi dan relasi antara manusia Indonesia antarmanusia bersifat setara. Paham kesetaraan menandai cara berpikir dan perilaku bangsa Indonesia apabila setiap orang Indonesia berdiri atas realitas bangsanya yang plural dan multikultural. Identitas kesetaraan ini tidak akan muncul dan berkembang dalam susunan masyarakat yang didirikan atas paham dominasi dan kekuasaan satu kelompok terhadap kelompok lain, kesetaraan merupakan identitas nasional Indonesia. Adapun indikator kesederajatan adalah sebagai berikut:

1. persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan;
2. persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak;
3. persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat (Supartono W., 2004: 54).

BAB 8

INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN

A. Pengertian Industrialisasi

Industrialisasi berasal dari kata “industri”, yang berarti memiliki makna kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, melalui mesin (Poerwadarminta, 1987). Industrialisasi adalah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris (pertanian) menjadi masyarakat industri. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dan perubahan sosial dapat berkembang, ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Industrialisasi dapat juga diartikan sebagai keadaan masyarakat yang lebih berfokus pada ekonomi, yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi.

Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia disaat manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih pada rasionalitas (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu pada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). Menurut para peneliti, banyak faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan. Mulai lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber daya alam yang

beragam dan melimpah, dan sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya.

Jika kita merujuk mengenai makna industri revolusi, lingkup pembahasannya lebih luas. Industrialisasi pada masyarakat berarti adanya pengertian teknik produksi dari cara yang tradisional ke arah modern, sebuah transformasi, yaitu perubahan masyarakat dalam segala segi kehidupan. Dalam bidang ekonomi, industrialisasi berarti munculnya kompleks industri besar yang produksi barang-barang sarana produksinya diusahakan secara massal (A. Dharmawan , 1986: 18).

Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua arti. *Pertama*, industri merupakan himpunan perusahaan sejenis. Contohnya, industri kertas berarti himpunan perusahaan penghasil kertas. *Kedua*, industri adalah sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Dalam pengertian kedua, kata “industri” yang disebut sektor industri pengolahan atau manufaktur, yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendapatan produksi.

Dalam merumuskan dan kebijakan pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi perlu diketahui berbagai masalah yang harus dipecahkan, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagian besar penduduk terdiri atas orang-orang yang tidak memiliki keterampilan teknis yang dituntut oleh proses industrialisasi. Kalaupun memiliki keterampilan tertentu, keterampilan tersebut terbatas pada bertani secara tradisional.
2. Latar belakang pendidikan, tidak hanya memiliki keterampilan manajerial, baik yang bersifat umum maupun yang fungsional, seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen logistik, dan sebagainya.
3. Terbatasnya modal yang mutlak diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan roda organisasi niaga. Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun adalah adanya

sekelompok kecil warga masyarakat yang menguasai sebagian besar modal dan sarana produksi lainnya.

4. Tingkat kewirausahaan yang sangat rendah di kalangan mereka yang bergerak dalam kegiatan bisnis, antara lain karena adanya pandangan bahwa “berdagang” tidak menempati skala teratas dalam kehidupan kekarayaan seseorang.
5. Tidak dikuasainya keterampilan teknis oleh sebagian besar warga masyarakat. Padahal, industrialisasi di samping bersifat padat modal, juga menggunakan teknologi canggih sehingga dunia usaha dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Adanya berbagai masalah tersebut tidak berarti bahwa negara-negara terbelakang dan sedang membangun tidak perlu mempertimbangkan jalan industrialisasi untuk membangun ekonominya. Adanya berbagai masalah tersebut hanya berarti bahwa para pengambil keputusan kunci dalam pembangunan ekonomi harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya (Sondang P. Siagian, 2009: 86).

B. Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi, dan perdagangan antarnegara. Hal tersebut pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mendorong perubahan struktur ekonomi pada banyak negara, yang semula berbasis pertanian menjadi berbasis industri.

Industrialisasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan. Meskipun pelaksanaan sangat bervariasi antarnegara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam pembentukan PDB, permintaan konsumen, ekspor, dan kesempatan kerja.

C. Faktor Pendorong Industrialisasi

Pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri primer atau hulu, seperti besi dan baja, semen, petrokimia, dan industri-industri tengah (antara hulu dan hilir), seperti industri barang modal (mesin) dan alat-alat produksi yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan dengan negara yang hanya memiliki industri-industri hilir atau ringan.

Kedua, besarnya pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang merupakan salah satu faktor perangsang bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi (dengan asumsi bahwa faktor penentu lainnya mendukung). Jika pasar domestik kecil, ekspor merupakan alternatif satu-satunya untuk mencapai produksi optimal.

Ketiga, keberadaan sumber daya alam (SDA). Ada kecenderungan bahwa negara-negara yang kaya SDA, tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah, dan negara tersebut cenderung tidak atau terlambat melakukan industrialisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat daripada negara-negara yang miskin SDA.

Keempat, kebijakan strategi pemerintah. Pola industrialisasi di negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif (seperti Indonesia, terutama selama pemerintahan Orde Baru hingga krisis terjadi) berbeda dengan negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung industrinya.

Selain faktor-faktor tersebut, ada pula faktor pokok yang mendorong terjadinya industrialisasi di suatu wilayah atau negara, yaitu sebagai berikut.

1. *Modal*, digunakan untuk membangun aset, pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja, dan sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri. Modal bisa berasal dari dalam negara dan dari luar negeri, yang disebut juga sebagai penanaman modal asing (PMA).

2. *Tenaga kerja*, yang jumlah dan standar kualitasnya sesuai dengan kebutuhan suatu perindustrian akan memperlancar industri tersebut dan mampu berkembang pada masa depan. Jika suatu negara kelebihan tenaga kerja, salah satu solusi yang baik adalah mengirim tenaga kerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja asing. Contohnya, tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW). Sebaliknya, jika suatu negara kekurangan tenaga kerja, salah satu jalan keluarnya adalah mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negaranya.
3. *Bahan mentah atau bahan baku*. Bahan baku merupakan salah satu unsur penting yang sangat memengaruhi kegiatan produksi suatu industri. Tanpa bahan baku yang cukup, proses produksi dapat terhambat, bahkan terhenti. Pasokan bahan mentah yang cukup, baik dari dalam maupun luar negeri atau impor dapat melancarkan dan mempercepat perkembangan suatu industri.
4. *Transportasi*, yang memegang peranan penting dalam suatu industri untuk mengangkut bahan mentah ke lokasi industri, mengangkut dan mengantarkan tenaga kerja, mengangkut barang jadi hasil *output* industri ke agen penyalur/distributor atau ke tahap produksi selanjutnya, dan sebagainya.
5. *Sumber energi atau tenaga*. Industri yang modern memerlukan sumber energi atau tenaga untuk menjalankan berbagai mesin produksi, menyalakan perangkat penunjang kegiatan bekerja, menjalankan kendaraan industri, dan sebagainya. Sumber energi dapat berwujud bahan bakar minyak (BBM), batubara, gas bumi, listrik, metan, baterai, dan sebagainya.
6. *Marketing atau pemasaran hasil output produksi*. Pemasaran produk hasil keluaran produksi harus dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar, memberikan dividen kepada pemegang saham, membayar pegawai, karyawan, buruh, dan lain-lain.
7. *Kebudayaan masyarakat*. Sebelum membangun dan menjalankan kegiatan industri, adat-istiadat, norma, nilai, kebiasaan, dan sebagainya yang berlaku di lingkungan sekitar harus dipelajari.

Tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat sekitar dapat menimbulkan konflik dengan penduduk sekitar. Selain itu, ketidakmampuan membaca pasar juga dapat membuat barang hasil produksi tidak laku di pasaran karena tidak sesuai dengan selera konsumen, tidak terjangkau daya beli masyarakat, boikot konsumen, dan lain-lain.

8. *Teknologi*. Dengan berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu akan dapat membantu industri untuk dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien serta mampu menciptakan dan memproduksi barang-barang yang lebih modern dan berteknologi tinggi.
9. *Pemerintah*, memegang peranan cukup penting dalam perkembangan suatu industri karena segala peraturan dan kebijakan perindustrian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparatnya. Pemerintahan yang stabil mampu membantu perkembangan industri dalam segi keamanan, kemudahan-kemudahan, subsidi, pemberian modal ringan, dan sebagainya.
10. *Dukungan masyarakat*. Semangat masyarakat untuk membangun daerah atau negara akan membantu industri di sekitarnya. Masyarakat yang cepat beradaptasi dengan pembangunan industri, baik di desa maupun di kota sangat mendukung keberhasilan suatu industri.
11. *Kondisi alam* yang baik serta iklim yang bersahabat akan membantu industri memperlancar kegiatan usahanya. Indonesia memiliki iklim tropis tanpa banyak cuaca yang ekstrem sehingga kegiatan produksi rata-rata dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun.
12. *Kondisi perekonomian*, yaitu pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industri sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan perindustrian lokal ataupun internasional.

D. Industrialisasi: sebagai Pembangunan Ekonomi

Siapa pun akan mengakui bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang rumit karena sifatnya yang multiphase dan

multidimensional. Karakteristik demikian merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, bidang-bidang yang menjadi objek pembangunan adalah bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan administrasi pemerintahan negara.

Meskipun demikian, karena berbagai faktor keterbatasan yang dihadapi oleh suatu negara, seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, keterbatasan daya, dan keterbatasan waktu, suatu negara harus menentukan skala prioritas pembangunannya. Tuntutan dalam penentuan prioritas pembangunan bagi negara-negara yang sedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan bidang ekonomi. Hal ini mudah dipahami dan diterima karena memang kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut paling tampak dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat.

Tidak ada satu pun strategi pembangunan ekonomi yang cocok digunakan untuk semua negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan materiil warganya. Negara-negara terbelakang ditandai oleh perekonomian yang agraris sifatnya. Negara-negara yang sedang berkembang mulai melakukan industrialisasi meskipun baru pada tahap permulaan. Ada pula negara yang dapat digolongkan sebagai *Newly Industrializing Countries* karena banyak sektor perekonomian yang sudah menerapkan teknologi tinggi.

Dari kategorisasi tersebut dan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dihadapi, adanya dua bentuk strategi pembangunan yang biasa ditempuh oleh negara berkembang, yaitu modernisasi pertanian dan industrialisasi.

Pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang dari dua sisi. *Pertama*, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan. *Kedua*, berkaitan dengan penumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai komoditas untuk ekspor. Para pakar pertanian sering mengemukakan tujuh hal

yang harus menjadi perhatian dalam upaya modernisasi pertanian, yaitu: (1) memperkenalkan cara bertani modern; (2) penggunaan bibit unggul; (3) penggunaan insektisida dan pestisida; (4) penggunaan sistem irigasi yang lebih baik; (5) penggunaan pupuk yang lebih intensif; (6) intensifikasi pertanian; (7) diversifikasi dan ekstensifikasi.

Industrialisasi sebagai Alternatif

Jalur industrialisasi umumnya ditempuh oleh negara yang ingin mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Orientasi industrialisasi ini mencakup dua segi, yaitu orientasi produksi berbagai barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri dan orientasi ekspor. Pada era global saat ini, proses industrialisasi tidak harus ditempuh sendiri oleh pemerintah dan dunia usaha di negara yang bersangkutan, tetapi dapat pula dilakukan di negara lain.

Betapa pun kayanya suatu negara dalam arti sumber daya alamnya yang melimpah, aspek terpenting yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusia. Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategis dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi.

E. Industrialisasi di Indonesia

Menurut departemen perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut.

1. Industri dasar, meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok kimia dasar (IKD). IMLD, antara lain industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Adapun IKD, antara lain industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, dan sebagainya. Misi industri dasar adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar seajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

2. Industri kecil, meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam dan industri logam. Misi kelompok ini adalah melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi menengah atau sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (ekspor).
3. Industri hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI), meliputi industri yang mengolah sumber daya hutan, hasil pertambangan, sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Misi kelompok AI adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. perusahaan/industri besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih;
2. perusahaan/industri sedang jika mempekerjakan 20-99 orang;
3. perusahaan/industri kecil jika mempekerjakan 5-19 orang;
4. industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Dari segi nilai tambah yang dihasilkan, perusahaan-perusahaan industri besar atau sedang yang paling menonjol. Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadapkan para perencana ekonomi Indonesia pada suatu dilema. Apabila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan pada usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Apabila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber tersebut harus diarahkan pada usaha-usaha pengembangan perusahaan industri besar.

Dalam operasionalisasi yang paling tampak, ada tiga pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia, yang ketiganya pernah diaplikasikan secara tersendiri ataupun bersama-sama. *Pertama*, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri yang berspektrum luas (*broad-based industry*). Strategi ini lebih menekankan pengembangan industri berbasis impor industri negara lain. Misalnya, industri elektronik, tekstil, otomotif, dan lain-lain. *Kedua*, strategi industrialisasi yang mengutamakan industri berteknologi canggih berbasis impor (*hi-tech industry*), seperti industri pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal, dan lain-lain. *Ketiga*, industri hasil pertanian (*agroindustry*) berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pembangunan pertanian. Ketiga pemikiran tersebut mendapatkan legitimasi yang sama-sama kuat mengingat terdapat argumentasi rasionalitasnya.

F. Globalisasi dan Strategi Industrialisasi

Pada masa yang akan datang, masyarakat kita akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional semakin berkaitan dengan perkembangan internasional.

Secara teoretis, kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan *global governance*. Oleh karena itu, persoalan ekonomi dan politik semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir negara-bangsa (*nation-state*). Persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi oleh suatu negara bukan hanya milik atau menjadi beban tanggungan negara itu sendiri, melainkan juga menjadi bagian dari persoalan ekonomi dan politik negara-negara lain. Persoalan tersebut menjadi bersifat internasional atau berskala global meskipun tumbuh dan berkembang pada tingkat lokal.

Saat ini kecenderungan itu dapat dilihat pada dua hal berikut. *Pertama*, kegiatan pembangunan masyarakat semakin luas dan menembus batas-batas administratif. *Kedua*, unit-unit sosial yang tumbuh semakin kompleks sehingga sulit untuk menemukan keunikan kultural suatu masyarakat.

Kecenderungan tersebut secara sosiologis memunculkan beberapa pertanyaan krusial. Pertanyaan pertama berkaitan dengan konsep masyarakat yang hendak dibangun atau menjadi sasaran pembangunan, yaitu apa sebenarnya batasan masyarakat? Siapa individu sebagai anggota masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan tersebut?

Pertanyaan kedua berkaitan dengan potensi lokal dalam proses globalisasi, yaitu seberapa jauh potensi lokal dapat dikembangkan sesuai dengan kehendak atau kepentingan masyarakat? Apakah mungkin membangun sebuah mekanisme yang mendukung globalisasi dan lokalisasi berkembang secara berdampingan? Jika tidak mungkin membangun mekanisme yang membuat globalisasi dan lokalisasi benar-benar berlangsung secara paralel, bagaimana mengoordinasi dari atau tertindih oleh gerak globalisasi?

Pertanyaan ketiga berkisar pada persoalan peran pemerintah dalam kegiatan perencanaan dan implementasi program pembangunan. Seberapa jauh pemerintah dapat melakukan fungsi yang memacu dan meluruskan perjalanan pembangunan masyarakat? Ketika prioritas pembangunan adalah memacu pertumbuhan di negara sendiri, pemerintah dapat menempatkan posisinya sebagai:

1. pelaksana kebijaksanaan ekonomi;
2. konsumen, produsen, sekaligus investor;
3. pengelola perusahaan (negara);
4. pengatur masyarakat (regulator).

Sebagai pelaksana kebijaksanaan ekonomi, pemerintah melakukan perubahan dan pembenahan masalah keuangan, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Melalui lembaga-lembaga pasar, pemerintah memengaruhi perjalanan serta proses penawaran dan permintaan. Sebagai konsumen, pemerintah mendorong kegiatan yang bersentuhan langsung dengan barang yang dikonsumsi. Hal serupa dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai produsen dan investor. Dalam konteks ini pemerintah tidak *netral*, tetapi turut mencampuri proses produksi. Sebagai pengelola perusahaan (negara), pemerintah secara aktif memengaruhi pasar dan pemasaran, di samping memberikan stimulan bagi tumbuh berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta. Akhirnya sebagai pengatur masyarakat (regulator), pemerintah menyusun perundang-undangan yang memuat peraturan

sanksi sehingga derap pembangunan ekonomi berjalan berada pada jalur yang dikehendaki.

Kebijakan dan Strategi Industrialisasi

Beberapa kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh oleh industrialisasi ini dalam mengatasi dan mengentaskan kemiskinan, antara lain sebagai berikut.

1. *Peraturan perundang-undangan.* Peraturan dan perundang-undangan harus mendukung terciptanya iklim yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi nasional, menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan, kesempatan kerja, kemitraan, dan kesempatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ada pula peraturan dan perundang-undangan yang menjamin investasi dalam suasana yang kondusif, yang membuka peluang kerja bagi orang miskin. Peraturan dan perundang-undangan menyangkut semua aspek dan selalu memasukkan serta menempatkan kemiskinan yang merupakan komponen yang melekat pada perundang-undangan tersebut.
2. *Pemerintahan yang baik (good governance).* Pemerintahan yang baik menyebabkan fungsi pelayanan dan peraturan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah bebas dari tindak korupsi sehingga tidak terjadi pengeroposan dalam pelaksanaan pembangunan, dan dapat merancang program dengan baik sehingga dapat melibatkan orang-orang miskin. Ada keserasian pemerintah pusat dan daerah yang senantiasa selaras dan seirama dalam berlaku adil, langsung ataupun tidak langsung.
3. *Didorong percepatan perubahan struktural.* Transformasi struktural ini, meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia.
4. *Peningkatan akses terhadap aset produksi.* Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sangat penting

dalam melindungi dan memajukan ekonomi rakyat. Pemilikan tanah yang semakin mengecil (marjinalisasi) harus dicegah (Mohammad Jafar Hafsah, 2008: 188).

5. *Pembangunan infrastruktur*. Berbagai upaya di atas tidak cukup bermanfaat bagi masyarakat apabila mereka hidup terpencil dan terisolasi sehingga tidak dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada di wilayahnya. Untuk itu, diperlukan infrastruktur yang memadai.

Prasarana dan perhubungan sangat penting karena sangat menentukan kelancaran arus pemasaran hasil produksi setempat. Tanpa prasarana perhubungan yang memadai, harga komoditas yang diproduksi setempat akan bernilai rendah karena biaya pengangkutan yang tinggi untuk sampai di pasar. Bahkan, keadaan ini juga akan mengakibatkan menurunnya kualitas komoditas pertanian sejalan dengan bertambahnya waktu yang terbuang sehingga menyebabkan harga semakin rendah. Barang hasil industri yang dibutuhkan, pada saat tiba di desa harganya menjadi lebih tinggi karena biaya transportasi yang lebih besar. Sebagai akibatnya, nilai tukar yang diterima petani di wilayah pedesaan akan semakin memburuk. Oleh karena itu, pembangunan jaringan transportasi harus diutamakan.

Demikian pula, pembangunan listrik, jalan-jalan usaha tani untuk memberikan kemudian akses bagi masyarakat miskin sehingga semua prasarana tersebut menjamin masyarakat untuk beraktivitas (Mohammad Jafar Hafsah, 2008: 191).

6. *Kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat*. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.
7. *Kebijaksanaan ketenagakerjaan*. Perlu kebijakan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal-bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Untuk itu, secara luas harus disediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan.

8. *Pemerataan pembangunan antardaerah dan desentralisasi.* Ekonomi rakyat tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat ini, perhatian besar perlu diberikan agar pembangunan dapat lebih merata sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk juga berkembang beraktivitas (Mohammad Jafar Hafsah, 2008: 193).
9. *Memberikan kesempatan berusaha dengan bantuan modal dan pelatihan kepada penduduk miskin.* Di samping diberi pelatihan dan magang, penduduk miskin perlu diberi akses dan kemudahan, antara lain:
 - a. memberikan bantuan dengan bunga rendah;
 - b. menjaga stabilitas makro ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai rupiah) karena bagaimanapun sektor real sangat bergantung pada kondisi makro ekonomi;
 - c. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
 - d. tetap menjaga tata ruang wilayah, terutama di perkotaan.
10. *Memberdayakan ekonomi lokal dengan membangun pusat pertumbuhan.* Strateginya, antara lain dengan membangun pusat pengembangan ekonomi pada satu pulau atau satu provinsi tertentu. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dan mempertimbangkan faktor pemerataan (Mohammad Jafar Hafsah, 2008: 194).

G. Hubungan Industrialisasi dengan Lingkungan

Di negara sedang berkembang, seperti Indonesia, proses industrialisasi melibatkan transformasi dari masyarakat yang secara ekonomi berciri agraris ke arah *manufacturing*. Proses itu mendorong terjadinya perubahan sosial dan meningkatnya diferensiasi struktur sosial. Hal ini dapat mengganggu integrasi sosial. Untuk mengantisipasinya, diperlukan peningkatan rasionalisasi yang mempunyai pengaruh baik pada perubahan sosial dan diferensiasi struktural. Siklus tersebut terus berlanjut menandai proses menuju pandangan hidup masyarakat industrial.

Beberapa masalah krusial yang terjadi bersamaan dengan proses industrialisasi di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, seperti berikut ini:

1. masalah mobilitas penduduk ketenagakerjaan;
2. masalah dualisme ekonomi;
3. masalah kontrol politik;
4. masalah benturan sosial dalam masyarakat setempat (Sunyoto Usman, 1998: 247).

Dari masalah yang terjadi tersebut, tampak bahwa mencari keseimbangan antara industrialisasi dan kepentingan masyarakat bukanlah sesuatu yang sederhana. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah studi AMDAL yang menempatkan kajian sosial sejajar dengan kajian-kajian biologi, hidrologi, geologi, dan sebagainya (Sunyoto Usman, 1998: 248).

H. Hubungan Pembangunan dengan Lingkungan

Pembangunan nasional dan sumber daya alam dan lingkungan memiliki relasi atau hubungan yang erat, bahkan hubungan timbal balik. Artinya, pembangunan nasional akan memengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan akan memengaruhi pembangunan nasional. Sumber daya alam dan lingkungan merupakan unsur sentral atau unsur dasar utama dalam pembangunan. Pembangunan Indonesia dengan prioritas pada pembangunan ekonomi, juga mencakup pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan-keamanan. Sektor-sektor pembangunan tersebut merupakan satu kesatuan pembangunan, yaitu pembangunan nasional.

I. Dampak Industrialisasi

Secara garis besar, industrialisasi memiliki dua dampak terhadap sekitar, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pembangunan industri mempunyai sisi positif dan negatif yang sangat jelas dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dampak positif, di antaranya: (1) mengurangi pengangguran. Pembangunan industri menyerap banyak tenaga kerja yang dibutuhkan; (2) terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Dengan adanya berbagai macam pabrik industri, kebutuhan akan barang mudah terpenuhi dengan harga yang terjangkau; (3) menekan laju

jumlah penduduk. Dengan adanya pembangunan akan memberikan kesempatan besar bagi kaum wanita untuk bekerja sehingga dapat menekan lajunya pertumbuhan penduduk.

Dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu: (1) pencemaran lingkungan; (2) berkurangnya lahan pertanian. Dengan pertumbuhan industri yang begitu pesat, secara tidak langsung akan membutuhkan tempat yang semakin luas untuk bangunan pabriknya. Untuk membangun pabrik, yang menjadi sasaran utama adalah lahan pertanian sehingga lahan-lahan produktif akan semakin berkurang.

BAB 9

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Masalah kependudukan merupakan masalah yang penting dalam pembangunan suatu negara. Informasi tentang jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peranan penting. Semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, semakin mudah dan tepat pembangunan itu dibuat. Masalah kependudukan sudah merupakan masalah serius yang tidak hanya dihadapi oleh negara-negara karena banyak menyangkut segi kehidupan. Bahkan, akhir-akhir ini para ahli ekonomi telah memusatkan perhatiannya pada hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Perencanaan pembangunan ini dituangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, yang kependudukan perlu dipertimbangkan sebagai tolok ukur pembangunan masyarakat.

Demikian pula, dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

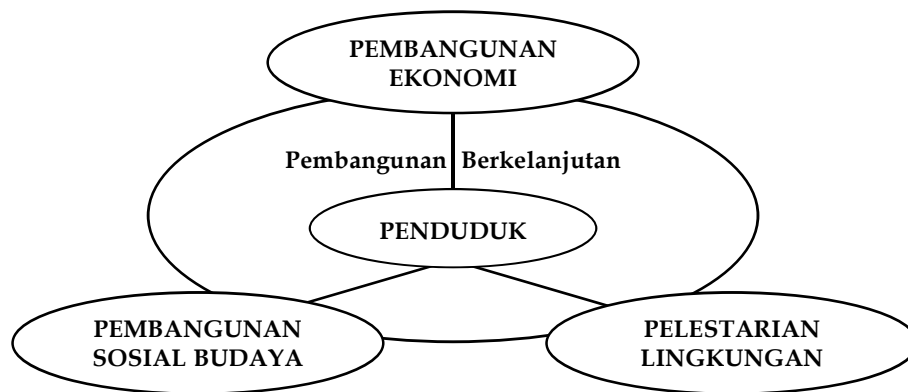
Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyeraskan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri.

Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan. Perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan merupakan strategi yang penting dalam rangka meningkatkan relevansi, efektivitas serta efisiensi kebijakan dan program pembangunan di Indonesia. Penggunaan data yang akurat dalam proses perencanaan telah diatur dalam peraturan perundangan. Pada Pasal 31 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa "Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan".

Agenda utama pembangunan berkelanjutan adalah memadukan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga pilar utama pembangunan, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan berkelanjutan karena penduduk merupakan pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan. Hubungan antara dinamika kependudukan dengan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

Gambar 1

**Hubungan antara Dinamika Kependudukan
dengan Pembangunan Berkelanjutan**



Pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang berpusat pada penduduk (*people-centered development*), adalah pembangunan yang direncanakan dengan memerhatikan kondisi dan dinamika penduduk. Semua perencanaan pembangunan harus *population responsive*, yaitu memerhatikan dan mempertimbangkan data dan informasi kependudukan secara lengkap, mulai dari jumlah, pertumbuhan, struktur umur, persebaran, ataupun kualitas penduduk. Pada sisi lain, pemerintah juga harus mampu merumuskan kebijakan pengelolaan kependudukan agar tercapai kondisi kependudukan yang kita harapkan (*population-influencing policies*).

B. Pentingnya Memahami Kependudukan dalam Pembangunan

Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor-faktor yang berkaitan dengannya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan sejarah kependudukan, terdapat dua pandangan terhadap perubahan penduduk ini. Pandangan pertama menyatakan pembangunan memengaruhi dinamika penduduk, artinya penduduk berfungsi sebagai *dependent variable*. Pandangan kedua menyatakan kondisi kependudukan memengaruhi pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam hal ini penduduk menjadi *independent variable*. Memerhatikan hal tersebut, sudah selayaknya apabila pemahaman terhadap teori penduduk, terutama yang dikaitkan dengan pembangunan menjadi sangat penting.

Berbagai teori yang membahas keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan, yaitu sebagai berikut (Todaro dan Smith, 2004; Weeks, 1986).

1. *Teori Pre Malthusian*. Sebelum Malthus, hanya ada satu pandangan mengenai penduduk, yaitu bahwa reproduksi dipandang sebagai usaha untuk mengganti penduduk yang meninggal. Munculnya pandangan ini disebabkan tingginya tingkat kematian penduduk pada masa-masa tersebut. Meskipun demikian, dalam penerapannya terjadi berbagai perbedaan, baik karena perbedaan antartempat maupun antarwaktu. Perbedaan tersebut mencakup hal-hal berikut.
 - a. Tahun 500 SM, pada zaman Cina Kuno dipelopori oleh Confusius (seorang pemikir Cina), yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat menurunkan nilai *output* per tenaga kerja, tingkat kehidupan masyarakat, dan menimbulkan perselisihan. Para pemikir pada masa ini juga mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang ideal rasio antara manusia dan luas lahan (*man-land ratio*). Untuk melakukan hal tersebut adalah memindahkan penduduk dari daerah yang kelebihan penduduk (*overpopulated*) ke daerah yang kurang penduduk (*underpopulated areas*).
 - b. Tahun 300 SM, Plato menekankan bahwa kestabilan penduduk (dalam konteks rasio manusia dan lahan) merupakan faktor penting untuk mencapai kesempurnaan manusia. Plato merupakan pemikir yang paling awal, yang mengemukakan doktrin bahwa kualitas manusia lebih penting daripada kuantitasnya.
 - c. Tahun 50 SM, kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Julius dan Agustus, menganut paham pronatalis. Menurut Kaisar, pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mengganti korban perang dan untuk menjamin jumlah penduduk yang cukup untuk menjajah daerah jajahan.

- d. Tahun 354–430 M. Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, pandangan yang dianut adalah antinatali. Augustine percaya bahwa keperawanan merupakan keberadaan manusia yang paling tinggi. Kepercayaan semacam ini mengakibatkan orang menunda, bahkan tidak melakukan hubungan kelamin. Pandangan ini berdampak pada penurunan fertilitas.
 - e. Abad ke-17. Ditandai dengan munculnya aliran Merkantilisme. Pertumbuhan penduduk dipandang sebagai hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemakmuran negara sama dengan produksi total dikurang dengan upah yang diterima pekerja. Karena tingkat upah cenderung turun sebagai akibat meningkatnya angkatan kerja, negara-negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi akan mendapatkan keuntungan.
 - f. Abad ke-18. Doktrin pronatalis dari Merkantilis tidak sesuai dengan kenyataan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru meningkatkan kemiskinan. Kritik terhadap pandangan Merkantilis ini muncul dari aliran *physiocratic*, yang berpendapat bahwa bukan penduduk, melainkan tanahlah yang menjadi bagian terpenting dari kekayaan suatu negara. Salah satu tokoh terkenal yang menganut paham ini adalah Adam Smith. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya ada hubungan yang harmonis dan alam antara pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jumlah penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas lahan.
2. *Teori Malthus*. Melalui tulisan-tulisannya, dapat dikemukakan bahwa Malthus merupakan orang pertama yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara penyebab dan akibat pertumbuhan penduduk. Buku Malthus yang pertama adalah *Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society; with Remarks on the Speculations of*

Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers, yang dipublikasikan tahun 1798. Pada tahun 1803 buku tersebut direvisi dengan judul *An Essay on the Principle of Population; or a View of Its Past and Present Effects on Human Happiness; with an Inquiry into Our Prospects Respecting the Future Removal of Mitigation of the Evils Which it Occasions* (Lucas et.al., 1990).

Dalam model dasarnya, Malthus menggambarkan konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*). Malthus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32). Kecenderungan ini menyebabkan penduduk akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali apabila terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama, karena adanya pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap (tanah dan sumber daya alam lainnya), persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Menurut Malthus, karena setiap anggota masyarakat hanya memiliki tanah yang sedikit, kontribusi marginal atau produksi pangan akan semakin menurun. Pada masyarakat agraris, pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai produksi pangan per kapita. Oleh karena itu, ketika pertumbuhan pangan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat, pendapatan per kapita akan mengalami penurunan. Penurunan pendapatan per kapita ini akan menjadi sedemikian rendahnya sehingga mencapai sedikit di atas tingkat subsisten (kemiskinan absolut).

Malthus cenderung sependapat dengan Adam Smith. Selain kebutuhan tenaga kerja (*demand for labor*) sebagai penyebab pertumbuhan penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith, Malthus percaya bahwa dorongan untuk bereproduksi merupakan faktor yang mendahului sebelum kebutuhan tenaga kerja. Secara implisit, ini mengisyaratkan bahwa *over-population* (yang diukur dengan tingkat pengangguran) menekan upah menjadi turun sampai titik di saat penduduk tidak sanggup untuk menikah dan membentuk keluarga.

3. *Aliran Sosialis Karl Marx dan Friederich Engels*, dua orang dalam aliran sosialis yang sangat menentang teori Malthus. Mereka berpendapat bahwa tidak ada aturan yang bersifat umum untuk kependudukan (*population laws*). Kondisi penduduk bergantung pada kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Perbedaan fertilitas dan mortalitas ditentukan oleh variasi tingkat kehidupan dan perbedaan tersebut akan hilang apabila kekayaan didistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Menurut Marx dan Engels, akibat pertumbuhan penduduk dalam sistem kapitalis adalah kemiskinan dan *overpopulation*. Akan tetapi, dalam sistem sosialis, pertumbuhan penduduk tidak mempunyai efek samping karena pertumbuhan penduduk akan diserap oleh sistem ekonominya. Pendapat ini dalam kaitannya dengan Malthus, lebih berkaitan dengan akibat pertumbuhan penduduk daripada sebab pertumbuhan penduduk. Kemiskinan menurut Marx dan Engels disebabkan oleh organisasi masyarakat, khususnya masyarakat kapitalis. Menurut Marx, Malthusian hanya berlaku di masyarakat kapitalis, sedangkan dalam masyarakat sosialis yang murni tidak akan ada masalah kependudukan.

4. *Teori-teori lain pada era modern*. Setelah Marx dan Engels, beberapa teori/pendapat yang mengaitkan antara penduduk dan pembangunan adalah sebagai berikut.

- a. *John Stuart Mill*

John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan ekonom yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Ia mengemukakan bahwa standar hidup penduduk merupakan determinan utama untuk tingkat fertilitas. Ia percaya bahwa dalam hidup ini manusia dapat dan seharusnya secara bebas mencari cita-cita mereka sehingga Mill menolak pendapat bahwa kemiskinan tidak dapat dielakkan (sebagaimana yang dikemukakan Malthus). Selain itu, ia juga menolak bahwa kemiskinan tersebut merupakan hasil dari penerapan kapitalisme (sebagaimana yang dikemukakan Marx). Menurut Mill, negara yang ideal adalah negara yang semua masyarakatnya merasa nyaman secara ekonomis.

Mill berpendapat bahwa penduduk harus stabil dan harus berkembang, baik menurut budaya, moral, maupun aspek-aspek sosialnya, di samping juga secara ekonomis harus meningkat. Sebelum penduduk dan produksi bahan makanan stabil, di antara keduanya akan terjadi saling mendahului. Apabila pembangunan sosial ekonomi berhasil, ada kenaikan pendapatan, yang akan menaikkan standar hidup untuk seluruh generasi dan memungkinkan produksi melebihi pertumbuhan penduduk.

Konsep terkenal yang dikemukakan oleh Mill adalah mengenai jumlah penduduk optimal, yaitu jumlah penduduk yang menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah tersebut optimal dalam arti tidak ada perubahan, baik dalam jumlah maupun mutu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan tersedianya modal fisik (Ananta, 1990).

b. *Ludwig Brentano*

Ludwig Brentano adalah seorang ekonom dari Jerman. Jika Mill dan Brentano lebih menekankan analisisnya mengenai penyebab pertumbuhan penduduk, Emile Durkheim lebih memerhatikan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk. Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja merupakan ciri khas masyarakat modern yang semakin kompleks. Kekompleksan masyarakat mempunyai hubungan dengan pertumbuhan penduduk. Menurut Durkheim, pertumbuhan penduduk menyebabkan semakin terspesialisasinya masyarakat yang disebabkan usaha untuk mempertahankan keberadaan akan semakin lebih berat apabila jumlah penduduk semakin banyak.

c. *Kelompok MIT*

Saat ini Teori Batas Pertumbuhan Ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya alam semakin mendapat perhatian, terutama setelah adanya isu global *Limits to Growth*, sebagai hasil penelitian dari kelompok *Massachusetts Institut of Technology* (MIT), yaitu kelompok kerja dari Roma (*Club of Rome*). Inti isu tersebut (dipublikasi dalam buku yang berjudul *The*

Limits to Growth a Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind yang terbit pada tahun 1972), yaitu jika kecenderungan pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia terus terjadi seperti pada masa lampau, pertumbuhan bumi melampaui batas-batas kemampuan. Hal ini akan menimbulkan bencana dalam beberapa generasi mendatang.

Pemikiran tersebut sejalan dengan asumsi Malthus, yang menyatakan bahwa penduduk tumbuh menurut deret ukur, sementara pangan tumbuh secara deret hitung. Perbedaannya adalah, analisis yang digunakan lebih tajam dan luas serta dilengkapi data dan model analisis yang disebut sebagai "model dunia". Model dunia tersebut meneliti lima kecenderungan utama yang dihadapi dunia, yaitu: (1) industrialisasi yang semakin cepat; (2) pertumbuhan penduduk yang semakin cepat; (3) kekurangan gizi yang merajalela; (4) semakin susutnya *unrenewable resources*; (5) lingkungan hidup yang semakin rusak.

Tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan semakin pendeknya jangka waktu yang ditempuh untuk mencapai jumlah penduduk dua kali lipat.

C. Hubungan Kependudukan dan Pembangunan

Dalam pembangunan, jumlah penduduk memegang peranan penting. Penduduk adalah sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (*income per capita*) negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut (Mulyadi Subri, 2003: 55).

Dalam *Principles of Political Economy*, Malthus menganalisis pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan. Bahkan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan (M.L. Jhingan, 2004: 97).

Bagi negara berkembang, perkembangan penduduk yang cepat justru menghambat perkembangan ekonomi. Kaum klasik, seperti

Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus, sebagaimana dijelaskan di atas, berpendapat bahwa selalu akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dan tingkat perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Jika penduduk tidak dapat memperoleh pekerjaan, hal tersebut akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Suparmoko, 1999: 63).

Peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan permintaan akan sandang, pangan, dan papan menjadi meningkat. Akan tetapi, penawaran barang-barang ini tidak dapat ditingkatkan dalam jangka waktu pendek akibat kurangnya faktor pendukung, seperti bahan mentah, buruh terlatih, modal, dan sebagainya. Biaya dan harga barang-barang tersebut naik sehingga biaya hidup rakyat menjadi mahal. Akibatnya, standar kehidupan yang rendah itu menjadi lebih rendah dan kemiskinan semakin memperburuk standar kehidupan penduduk. Lingkaran setan antara kemiskinan dan standar kehidupan yang rendah ini semakin membelit (M.L. Jhingan, 2004: 406).

Cepatnya pertambahan jumlah penduduk atau disebut dengan ledakan penduduk dapat menjadi salah satu perintang pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, yang pada umumnya mengalami ledakan penduduk. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang biasa diukur dengan kenaikan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dihitung dari seluruh pendapatan nasional real atau *output*, yang dihasilkan secara keseluruhan selama satu tahun dibagi seluruh jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula *output* total yang dihasilkan agar penghasilan real per kapita naik (Irawan dan M. Suparmoko, 1996: 43).

Pada dasarnya penduduk memiliki dua fungsi bagi pembangunan ekonomi, yaitu permintaan dan sisi penawaran. Dilihat dari sisi permintaan, penduduk berfungsi sebagai konsumen, sedangkan dari segi penawaran, penduduk berfungsi sebagai produsen. Di negara-negara maju, pertambahan penduduk yang pesat justru berkontribusi bagi kenaikan penghasilan real per kapita. Selain itu, akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan menjadi sumber permintaan yang meningkat. Sebagaimana teori A. Hansen mengenai

stagnasi sekuar (*secular stagnation*), bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan agregatif. Demikian pula, para penganut Keynes memandang tambahan penduduk sebagai suatu kenaikan daya beli. Mereka memandang bahwa kemajuan, meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja selalu mengiringi pertambahan jumlah penduduk (Irawan dan M. Suparmoko, 1996: 45-46).

Dengan demikian, laju pertambahan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan penghambat bagi proses pembangunan ekonomi jika jumlah penduduk itu memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan (sebagai produsen) dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan (sebagai konsumen). Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi harus disertai tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan jumlah penduduk, tetapi tingkat penghasilan rendah tidak akan ada manfaat positif bagi pembangunan ekonomi, dan justru menjadi satu masalah utama dalam pembangunan.

D. Masalah Kependudukan

Kebijakan kependudukan merupakan gejala yang relatif baru. Berbagai kebijakan ekonomi ataupun sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kebijakan itu meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan, serta usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu memengaruhi penduduk, baik mengenai besar, komposisi, distribusi, pertumbuhannya serta ciri-ciri penduduk yang lain. Akan tetapi, pengaruh terhadap penduduk itu bukan tujuan utama, melainkan merupakan akibat sampingan dari kebijaksanaan itu.

Kebijakan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kebijakan kependudukan dapat memengaruhi fertilitas, baik untuk menaikkan maupun menurunkan angka kelahiran. Kebijakan mengenai fertilitas sering hanya dihubungkan dengan penurunan fertilitas melalui keluarga berencana. Bahkan, banyak orang menganggap kebijakan kependudukan identik dengan Keluarga Berencana. Masalah yang dapat memengaruhi fertilitas adalah nuptialitas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Umur perkawinan pertama, mudah atau sukarnya perceraian serta perkawinan ulang juga dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan kependudukan. Kebijakan mortalitas langsung dihubungkan dengan kesehatan, bahkan sering dihubungkan dengan klinik, rumah sakit, dan dokter.

Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi, distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relatif pendek.

Membahas migrasi biasanya mencakup urbanisasi. Urbanisasi sebagai keadaan dan proses pemusatan penduduk di daerah urban (perkotaan) yang dipengaruhi oleh migrasi dari desa ke kota. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa urbanisasi hanya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pertambahan alami, migrasi desa-kota, dan reklasifikasi daerah pedesaan (rural) menjadi perkotaan (urban).

Kebijakan kependudukan dapat bersifat nasional terpadu atau sektoral. Kebijakan nasional terpadu mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenai kependudukan. Semua komponen yang mempunyai hubungan dengan penduduk mempunyai orientasi yang sama sehingga merupakan satu sistem. Tiap-tiap komponen mempunyai kaitan dengan komponen lain yang menuju pada satu sasaran yang ditentukan, misalnya penurunan fertilitas, penurunan mortalitas atau peningkatan migrasi penduduk.

Program dan Kebijakan Kependudukan di Indonesia

Di dunia ini tidak ada negara lain yang mempunyai kebijakan redistribusi penduduk yang lebih luas dari Indonesia. Malaysia dan Philipina misalnya, mempunyai program pemukiman penduduk (*settlement*) yang terbatas dan lebih bersifat kegiatan pembangunan ekonomi. Proyek Felda (*Federal Land Development Authority*) di Malaysia merupakan usaha meningkatkan produksi karet dan kelapa sawit untuk ekspor dengan mendatangkan petani-petani yang terpilih. Philipina mempunyai program pembukaan daerah Mindanau yang ruang lingkungannya terbatas. Kebijaksanaan kependudukan telah dirumuskan dalam GBHN. Kebijakan ini merupakan bagian dan kebijaksanaan kependudukan yang meliputi:

1. pengendalian kelahiran;
2. penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak;

3. perpanjangan harapan hidup;
4. penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang;
5. pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata;
6. perkembangan dan penyebaran angkatan kerja.

Kebijakan kependudukan utama di Indonesia adalah kebijakan keluarga berencana. Kebijakan ini sudah luas diketahui oleh semua petugas KB ataupun masyarakat luas. Pertama-tama program KB, sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai kependudukan yang Presiden Soeharto ikut menandatangani, merupakan titik balik yang sangat penting di Indonesia. Program KB telah dapat mengubah pandangan dalam masyarakat yang pronatalis, yang melihat penduduk dan sudut kuantitas saja, menjadi pandangan antinatalis, yang menekankan pada kesejahteraan masing-masing keluarga dengan membatasi kelahiran.

Program kependudukan di Indonesia diartikan sebagai kegiatan *beyond family planning*, yaitu kegiatan-kegiatan yang menjangkau lebih jauh dari keluarga berencana. Misalnya, perbaikan gizi, peningkatan pendapatan dan lain-lain yang dapat menambah kemantapan program keluarga berencana.

Transmigrasi merupakan kebijakan kependudukan mengenai migrasi. Kebijakannya adalah redistribusi penduduk melalui migrasi yang diatur oleh pemerintah. Transmigrasi yang diatur itu hanya meliputi bagian kecil migrasi, tetapi dilakukan secara sadar dan dengan tujuan yang jelas. Sejak tahun 1972 di Undang-Undang No. 3 tahun 1972 yang mengatur Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, transmigrasi tidak hanya mempunyai aspek kependudukan tetapi juga aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan. Akan tetapi, karena itu dijalankan dengan memengaruhi variabel migrasi, maka transmigrasi merupakan satu program kependudukan. Usaha penyebaran fasilitas kesehatan secara merata sehingga menjangkau seluruh penduduk merupakan satu program kependudukan dalam rangka kebijaksanaan menurunkan kematian dan meningkatkan harapan hidup penduduk.

Kebijakan yang menyangkut distribusi penduduk sudah diikuti sejak permulaan abad ini oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kolonisasi beberapa daerah luar Jawa dengan memindahkan penduduk dan

Jawa adalah usaha redistribusi penduduk. Usaha itu merupakan kebijaksanaan kependudukan. Sekalipun hasilnya tidaklah besar, pemerintah Hindia Belanda memulai program itu. Setelah mengalami berbagai hambatan, menjelang Perang Dunia II, kolonisasi itu menjadi cukup penting.

Kebijakan kependudukan itu dijalankan sampai pemerintahan Orde Baru memberikan orientasi yang luas mulai tahun 1972. Undang-Undang No. 3 tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi bahwa pertimbangan demografis hanya merupakan satu dan 7 sasaran yang terdiri atas:

1. peningkatan taraf hidup;
2. pembangunan daerah;
3. keseimbangan penyebaran penduduk;
4. pembangunan yang merata di seluruh Indonesia;
5. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;
6. kesatuan dan persatuan bangsa;
7. memperkuat pertahanan dan keamanan sosial.

Kebijaksanaan transmigrasi mencakup segi-segi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di samping kebijaksanaan redistribusi penduduk. Kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan sektoral dan regional. Selain itu, transmigrasi diarahkan kepada Transmigrasi Swakarsa yang akan mengurangi beban pemerintah dan mendorong penduduk berinisiatif untuk pindah dalam rangka pembangunan daerah asal ataupun daerah tujuan transmigrasi.

E. Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Wacana mengenai pembangunan berwawasan kependudukan pada dasarnya sudah lama menjadi wacana yang berkembang di berbagai negara di dunia. Akan tetapi, implementasinya terutama di negara-negara berkembang masih belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kurangnya implementasi strategi pembangunan berwawasan kependudukan disebabkan masih kuatnya orientasi pemerintah di negara-negara tersebut untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa tinggi dan menjadikan

pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang.

Pada dasarnya penggunaan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Sekalipun demikian, hal tersebut memberikan jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan lebih berkesinambungan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawanya pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur.

Secara sederhana, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus.

1. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan serta dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.
2. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata (Tjiptoherijanto, 2005).

Dalam konteks tersebut, beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan suatu negara adalah sebagai berikut.

1. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk juga merupakan subjek dan objek pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas, yaitu kualitas fisik ataupun non-fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.
2. Keadaan penduduk yang ada sangat memengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, merupakan pendorong bagi pertumbuhan

ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan.

3. Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, sering peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

BAB 10

DINAMIKA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Dinamika pembangunan di Indonesia merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan Indonesia yang terdiri atas berbagai wilayah kepulauan dengan karakteristik daerah yang berbeda-beda merupakan potensi pada terjadinya kompleksitas pembangunan antardaerah, yang akan mengakibatkan tidak meratanya hasil-hasil pembangunan di daerah.

Secara umum, proses pembangunan di Indonesia dapat dibagi menjadi pembangunan pada masa Orde Baru dan pembangunan masa Reformasi. Akan tetapi, apabila melihat sejarah, proses atau dinamika pembangunan di Indonesia terbagi atas empat fase, yaitu *masa Pra-Kolonial dan Kolonial, masa pasca-Kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa Reformasi hingga sekarang*.

Arah perjalanan pembangunan Indonesia telah menciptakan berbagai pembaharuan untuk terus menuju kesejahteraan rakyat. Setiap tindakan pembangunan secara langsung atau tidak langsung dilaksanakan demi meningkatkan kecerdasan dan kemakmuran rakyat banyak. Khususnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih baik (Muljana B.S., 2001: 78).

Sistem kebijakan pembangunan di negara Indonesia menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih demokratis pasca-Reformasi. Masa Reformasi membuat semua proses pembangunan, baik pusat maupun daerah dituntut untuk melibatkan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Artinya, partisipasi aktif masyarakat sipil sangat diperlukan dalam proses pembangunan negara, baik tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga ke kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan.

Dalam pembahasan aspek dan gerak dinamika pembangunan nasional, terdapat lima aspek komponen yang merupakan tujuan akhir pembangunan nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. *Kemakmuran di bidang material*, sebagai keserbacukupan dalam kebutuhan fisik yang terutama terwujud dalam bentuk tersedianya sandang, pangan, dan papan.
2. *Kesejahteraan mental*, dikaitkan dengan tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan.
3. *Kesejahteraan fisik dan rohaniah*, berkaitan erat dengan keamanan dari berbagai jenis gangguan, baik yang menyangkut nyawa maupun harta benda kita. Adapun kerohanian berkaitan dengan kebebasan menganut suatu ajaran agama tertentu berdasarkan keyakinan seseorang serta melakukan ibadatnya menurut ajaran agama yang dipeluknya.
4. *Kebahagiaan*, tidak semata-mata dalam wujud kebendaan, tetapi juga pengakuan terhormat atas tingginya harkat dan martabat manusia itu sendiri.
5. *Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial*, memberikan keadilan yang sama terhadap semua orang, bukan berdasarkan kemakmuran material seseorang.

Dari Orde Lama hingga era Reformasi, pembangunan Indonesia terus menciptakan suasana yang kondusif, damai, aman, dan sejahtera.

B. Pola Dasar Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, bergerak melakukan perubahan secara terus-menerus dan bertahap ke arah kemajuan dan perbaikan seluruh aspek kehidupan bernegara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditargetkan tanpa disertai dengan perumusan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional yang jelas.

Proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan rencana, penyusunan program, kegiatan program, pengawasan sampai pada program terselesaikan.

Pola dasar pembangunan nasional menggariskan tujuan pembangunan nasional yang pelaksanaannya dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Ada sembilan asas yang memberikan arah pelaksanaan pembangunan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Mas'ood Mochtar (1989: 59), yaitu sebagai berikut.

1. Asas keimanan dan ketakwaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas manfaat, yaitu segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat bagi kemanusiaan, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. Asas demokrasi Pancasila, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Asas adil dan merata, yaitu pembangunan nasional dilakukan atas usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan, yaitu dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual jiwa raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerah, kepentingan kehidupan darat, laut, dan udara, serta kepentingan nasional dan internasional.
6. Asas hukum, yaitu setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
7. Asas kemandirian, yaitu pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan pada kepribadian bangsa.
8. Asas kejuangan, yaitu penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
9. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Faktor Pendukung Pembangunan Nasional

Menurut Lubis Ibramim (1998: 89), keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional didukung oleh beberapa faktor berikut.

1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Untuk terselenggaranya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, modal yang dipandang sangat penting adalah modal yang mencerminkan harga diri dan martabat bangsa yang merupakan motivasi kuat untuk bertekad memperbaiki nasib dengan mengandalkan kekuatan sendiri.

2. Posisi geografik negara, di antaranya tersedianya sumber daya alam tertentu; skala prioritas pembangunan ekonomi yang harus dipertimbangkan; jenis masalah yang diperhitungkan; akses pada sumber ekonomi yang dibutuhkan, tetapi berada di luar batas wilayah negara kita.
3. Penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan keunggulan yang luar biasa menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Apabila potensi ini dapat didayagunakan dan ditingkatkan, terutama kualitas fisik dan mental intelektualnya, selain merupakan sumber tenaga kerja yang besar serta menjadi konsumen bagi pasaran industri nasional, juga dapat menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi persaingan global di dunia internasional.
4. Kekayaan alam. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya alam yang dimiliki, yang menjadi modal dasar pembangunan ekonomi nasional.
5. Faktor rohaniah dan mental. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME serta diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan merupakan faktor pendukung bisa terlaksananya pembangunan ekonomi.
6. Globalisasi ekonomi. Tata pergaulan dunia yang melahirkan globalisasi dalam berbagai bidang, terutama bidang informasi dan ekonomi memberikan peluang untuk mengenali dan memanfaatkan budaya ekonomi bangsa lain dan membuka jalan masuk keluarnya produk dalam dan luar negeri yang akan bersaing dalam pasar internasional.
7. Kepercayaan kreditur luar negeri. Keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia menambah kepercayaan kreditur luar negeri.
8. Situasi politik nasional yang stabil. Hal ini merupakan kesadaran bahwa dalam keadaan situasi politik yang stabil, pembangunan dalam segala bidang dapat diselenggarakan.

D. Faktor Penghambat Pembangunan Nasional

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak berjalan mulus seperti yang dikehendaki karena dalam pelaksanaannya banyak masalah

yang merupakan penghambat pembangunan nasional. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Gejala SARA; adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar-golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejala SARA yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.
2. Produktivitas penduduk yang rendah, tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi membuat sumber daya manusia Indonesia cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia.
3. Kesenjangan sosial: kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja (pengangguran), pelayanan kesehatan, kesenjangan pembangunan antardaerah dapat menyebabkan kecemburuan sosial.
4. Kekurangan modal dan teknologi.
5. Persaingan dan proteksi negara lain dalam bidang perdagangan; persaingan semakin ketat terhadap komoditas ekspor, serta tindakan proteksi negara lain merupakan hambatan pengembangan ekspor Indonesia.
6. Tingkat pendidikan bangsa Indonesia; tingkat pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya masih rendah dan masih banyak ditemui penduduk yang buta aksara.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia belum seperti yang diperlihatkan oleh angka-angka statistik karena adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan non-Jawa. Pembangunan infrastruktur, yang menjadi katalisator pembangunan, hanya terjadi di Pulau Jawa sehingga pembangunan menjadi sangat tersentralistik ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Indonesia beralih dari sistem sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang lebih desentralistik (proses *Big Bang*) (Lubis Ibramim, 1998: 90).

Sistem pemerintahan desentralistik adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan peran daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sistem tersebut juga menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam mendorong dan menggerakkan arah pembangunan di

Indonesia. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menggerakkan pembangunan daerah. Seiring dengan pemberian kewajiban yang lebih besar tersebut, pemerintah daerah juga diberi hak dan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya (termasuk pengelolaan kekayaan alam dan keuangan daerah). Kewajiban, hak, dan kewenangan daerah dalam mengelola daerahnya secara mandiri inilah yang disebut otonomi daerah.

E. Pembangunan Masa Pra-Kolonial dan Kolonial

1. *Kondisi Pemerintahan*

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena berhasil diusir oleh Belanda, tetapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini.

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat usaha dan politik di lapangan ekonomi dan sosial. Berkat usaha Partai Liberal di negeri Belanda, Peraturan Bertanam paksa sedikit demi sedikit dihapuskan sampai lenyap. Sesuai dengan penduduk Eropa pada umumnya, bangsa Indonesia berada dalam sistem ekonomi yang bebas, yang tujuannya adalah mengejar dan mencapai tingkat kemakmuran yang memadai. Akan tetapi, hal tersebut sulit untuk dicapai karena sistem ekonomi Belanda selama penjajahannya sangat ketat dan kejam dengan menganut tiga metode ekonomi Belanda, di antaranya sebagai berikut.

- a. Paksaan menyerahkan atau menjual hasil bumi kepada perseroan dagang Belanda yang resmi, yaitu VOC.
- b. Peraturan tanam paksa, yang menjadikan pemerintah Belanda memegang produksi, yang senantiasa mengeksploitasi pemerintah.
- c. Liberalisme di bidang ekonomi modal asing, terutama modal Belanda dengan perantaraan Javasche Bank, Nederlandsche Handel Maatschappij, Nederlansch Indische Handelshbank, Escomtobank, dan lain-lain yang memegang produksi.

Ketiga metode tersebut menjadikan negara Indonesia tetap menderita dan bangsa Belanda semakin makmur. Pada sisi lain, kegiatan pengusaha Belanda semakin besar sehingga pemerintah pun ikut serta untuk membantu mereka. UU Agraria yang dibuat memberi keuntungan para pengusaha menyewa tanah dengan murah dan menggaji tenaga kerja dengan sangat murah. Agar para pekerja tersebut tidak meninggalkan pekerjaannya, Belanda membuat UU Poenale Sanctie yang berisi hukuman pidana bagi pekerja yang lari.

Pada abad ke-19, kemajuan demokrasi di Eropa Barat menjadikan orang-orang Eropa merasakan kenikmatan hak asasi manusia, seperti gagasan untuk hidup dengan layak dan menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tulisan. Kemajuan tersebut tidak berpengaruh kepada penjajah di Indonesia yang tetap membatasi hak-hak asasi manusia masyarakat Indonesia. Tuntutan rakyat Indonesia tidak dianggap penting oleh bangsa Belanda dan Belanda memiliki hak istimewa dan tidak dapat diganggu gugat.

Perang Dunia I (1914-1918) menggoncangkan dunia. Sekalipun negeri Belanda pada waktu itu netral, akibat perang yang dahsyat dapat dirasakan juga. Bangsa Indonesia mulai membangun dalam kesadaran politik.

Pada abad ke-20 terdapat kebangkitan bangsa-bangsa Asia. Beberapa daerah di Benua Asia diperintah, dijajah oleh bangsa kulit putih, India, Birma, Indonesia, Indo-Cina, Filipina. Bangsa-bangsa Asia ingin melepaskan diri dari genggaman bangsa Barat. Genggaman tersebut terasa saat berada di bidang politik dan ekonomi.

Beberapa faktor yang mendorong kebangkitan bangsa-bangsa Asia pada abad ke-20, di antaranya:

- a. bertambahnya pemuda terpelajar;
- b. kemenangan Jepang;
- c. Perang Dunia I (1914-1918);
- d. perjuangan Turki modern dalam pimpinan Mustafa Kemal Pasja;
- e. Revolusi Komunis.

2. *Pembangunan Masa Pra-Kolonial dan Kolonial*

Dalam hal ini Belanda membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk gedung sekolah dan menetapkan sistem pendidikan layaknya bangsa Belanda. Selain itu, Belanda memberikan bantuan pengadaan infrastruktur berupa alat-alat lalu lintas yang modern, sarana fasilitas umum yang memadai dan menyediakan sarana pendukung pariwisata yang memadai. Akan tetapi, bantuan tersebut justru akan menguntungkan pihak Belanda untuk terus mengeksploitasi bangsa Indonesia.

Pada saat itu bidang ekonomi uang sangat berperan penting. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak mengetahui arti mata uang tersebut. Dengan keadaan tersebut, Belanda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendirikan bank yang akan dipergunakan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak dapat memetik hasil uang tersebut sehingga para petani pun masih berada dalam genggaman modal asing.

Untuk menganalisis sejarah perekonomian Indonesia, masa pendudukan Belanda dapat dibagi menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu). Dalam bidang pendidikan, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa Belanda sebagai pengantar.

3. *Pendudukan Jepang (1942-1945)*

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengalihan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya diperoleh melalui jalan impor.

F. Pembangunan Masa Kemerdekaan (Orde Lama)

1. *Kondisi Pemerintahan*

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung penyerahan kedaulatan dan kekuasaan kepada R.I.S. di Amsterdam Jakarta. Upacara tersebut disaksikan oleh beribu-ribu rakyat. Dengan berdirinya R.I.S. mulailah pekerjaan pembangunan, pemberian isi yang nyata pada kemerdekaan Indonesia yang sudah ditegakkan.

Setelah perang fisik dengan senjata atau alat perang selesai, bangsa Indonesia harus menjalankan usaha-usaha pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

2. *Pembangunan Masa Kemerdekaan (Orde Lama)*

Pada era Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketentuan yang menjadi dasar perencanaan nasional:

- TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969.
- Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam menciptakan iklim Indonesia yang lebih kondusif, damai, dan sejahtera. Proses merehabilitasi dan merekonstruksi yang diamanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca-penjajahan Belanda.

Pada tahun 1947 perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi". Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya

tidak mengabaikan masalah nonekonomi, khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana, dan lain-lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu, cita-cita utama untuk “mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak dapat terwujud, apalagi jika tidak diperkuat oleh undang-undang yang baku pada masa itu.

Sekitar tahun 1960 sampai 1965, proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersendat-sendat akibat kondisi politik yang masih sangat labil yang menyebabkan kurangnya perhatian pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis, sedangkan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi, yang tecermin dari laju inflasi yang sampai 650% pada tahun 1966. Keadaan politik tidak menentu dan terus-menerus bergejolak sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakhir dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno.

Pada masa pemerintahan Soekarno kebijakan ekonomi pembangunan masih sangat labil, yang didera oleh berbagai persoalan, seperti pergejolakan politik yang belum kondusif dan sistem pemerintahan yang belum baik sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan.

a. Masa Pasca-Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat buruk disebabkan oleh hal-hal berikut.

- 1) Inflasi yang sangat tinggi disebabkan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
- 2) Blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

- 3) Kas negara kosong.
- 4) Eksploitasi besar-besaran pada masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain:

- 1) Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, yang dilakukan pada bulan Juli 1946;
- 2) upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatra dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia;
- 3) pembentukan *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi) pada 19 Januari 1947.

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan) (M. Hutauruk, 1984: 53).

b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal karena politik ataupun sistem ekonominya menggunakan prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:

- 1) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun;
- 2) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 melalui UU No. 24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi;
- 3) pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya, banyak

pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan tersebut.

c. *Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)*

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia yang menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur oleh pemerintah). Sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain sebagai berikut.

- 1) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan Rp1000 menjadi Rp100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- 2) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
- 3) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1000 menjadi Rp1. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter tersebut semakin terpuruk karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

G. Pembangunan Masa Orde Baru

1. *Kondisi Pemerintahan*

Masa Orde Baru dianggap sebagai masa keemasan bagi sejarah negara Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kejayaan di berbagai sektor pembangunan yang dicapai oleh masa pemerintahan

Orde Baru. Akan tetapi, pada sisi lain, masa Orde Baru juga dianggap sebagai masa kelam bagi perpolitikan dan stabilitas nasional negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyaknya konflik antara masyarakat dan pemerintahan.

Pemerintahan Orde Baru dimulai dengan adanya krisis politik di Indonesia, yang akhirnya mendesak presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menyatakan kekuasaan dilimpahkan sementara kepada Jendral Soeharto hingga pada tahun 1986 Soeharto disahkan oleh MPRS menjadi presiden pengganti Soekarno.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Soeharto dibantu oleh militer sebagai pelaku utama dan kaum teknokrat sebagai aktor pendamping. Kedua aktor tersebut sangat mendominasi dalam wajah perpolitikan negara saat itu. Pemerintah juga mempunyai peranan besar dalam menentukan jalannya negara dan keterlibatannya dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat (Zaim Saidi, 2008: 65).

Banyaknya permasalahan yang diwariskan oleh Orde Lama menyebabkan pemerintahan Orde Baru bergerak cepat untuk mengembalikan stabilitas negara dan kondisi perekonomian negara yang begitu terpuruk sebelumnya. Pemerintah beranggapan perlu adanya pembangunan ekonomi yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif atau disebut juga stabilitas nasional. Hal tersebut didasarkan pada buruknya situasi dan porak-porandanya keadaan saat Orde Lama hingga menimbulkan chaos politik dan ekonomi di dalam negara.

Orde Baru memfokuskan diri untuk menangani masalah tersebut dan menjadikannya sebagai sasaran utama untuk menata perekonomian yang buruk. Bahkan, masa Orde Baru memiliki slogan Pembangunan *Yes* dan Politik *No*, dengan makna perlunya melaksanakan pembangunan dengan meninggalkan kegiatan-kegiatan politik. Selain itu, masa Orde Baru juga menekankan masyarakat berorientasi pada program dan meninggalkan orientasi ideologi. Karena menurut pemerintahan Orde Baru, permasalahan yang ada pada masa Orde Lama juga bersumber dari ideologi dan sebenarnya pelaksanaan kemerdekaan hanya bisa dilakukan dengan pembangunan, hendaknya program dijadikan sebagai pedoman. Kebijakan masih pada pemerintah, tetapi sektor ekonomi diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan

ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, dan kapitalisme (Mahfud M.D., 2003: 75).

Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.

Pada masa Orde Baru pun sebenarnya telah dikenal istilah perencanaan partisipatif melalui Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Daerah (P5D) yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri (Permendagri No. 9 tahun 1982), dengan ketentuan teknis yang sangat terperinci. APBN pada masa pemerintahan Orde Baru disusun berdasarkan asumsi perhitungan dasar, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional.

Format APBN pada masa Orde Baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri atas penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan, sedangkan pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan sesuai dengan masa panen petani sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memerhatikan petani.

APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Perimbangan tersebut sangat tidak mungkin karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit. Artinya, pinjaman luar negeri ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal, seharusnya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai utang yang harus dikembalikan dan merupakan beban pengeluaran pada masa yang akan datang. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar

negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997 ketika kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia, yang membuat keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sedangkan kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok inilah yang akhirnya menyebabkan munculnya konflik dan kekacauan sosial dengan munculnya demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan *me-reshuffle* Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.

Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

2. *Pembangunan Era Orde Baru*

Pada masa ini proses pembangunan nasional terus digarap untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan per kapita juga meningkat dibandingkan dengan masa Orde Lama. Semuanya dicapai dan dituangkan dalam *blueprint* nasional atau rencana pembangunan nasional. Pada zaman Orde Baru, kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V, dan Repelita VII .

Kebijakan ekonomi pada era ini diarahkan pada pembangunan dalam segala bidang yang tercermin dalam 8 jalur pemerataan, yaitu kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan, yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun)

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan *preventive checks* untuk menekan jumlah kelahiran melalui KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Dinamika pembangunan nasional tercermin dari setiap upaya dan hasil-hasil yang telah dicapai mulai Repelita I sampai dengan Repelita V.

- a. Repelita pertama, titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
- b. Repelita kedua, titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
- c. Repelita ketiga, titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
- d. Repelita keempat, titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri sendiri, baik industri yang dapat menghasilkan mesin industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam repelita selanjutnya.
- e. Repelita kelima, titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan hasil produksi pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Seluruh upaya yang dilaksanakan pada setiap tahapan repelita tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan terciptanya landasan yang kukuh bagi pembangunan di bidang-bidang yang lain. Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Untuk itu, di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa.

Pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 (Aulia Pohan, 2008: 45).

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Beberapa hal dianggap sebagai bagian dari kelebihan pemerintahan Orde Baru, di antaranya:

- a. perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS \$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS \$1.000;
- b. sukses transmigrasi;
- c. sukses KB;
- d. sukses memerangi buta huruf.

Adapun kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru adalah:

- a. maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pembangunan Indonesia yang tidak merata;

- c. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin);
- d. kritik dibungkam dan oposisi diharamkan;
- e. kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan.

H. Pemerintahan Era Reformasi

1. *Kondisi Pemerintahan*

Pada masa ini tidak hanya ketatanegaraan yang mengalami perubahan, tetapi juga kebijakan ekonomi. Dengan demikian, apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa Reformasi belum melakukan manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

Hadirnya reformasi pembangunan dapat dikontrol langsung oleh rakyat dan kebijakan pembangunan pun didasari demokrasi yang berbunyi dari, oleh, dan untuk rakyat, partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa Orde Baru, kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siapa saja.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerja sama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya (Ahmad Erani, 2002: 97) di antaranya:

- a. masa depan Reformasi;
- b. masa depan ABRI;
- c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
- d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya, dan kroni-kroninya;
- e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan tidak mempunyai kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (*neoliberalisme*), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa ke mana bangsa ini.

2. *Pembangunan Era Reformasi*

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain pembangunan nasional, masa Reformasi juga menekankan pada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 32/2004, Undang-Undang No. 33/2004, dan Undang-Undang No. 18/2001 untuk pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang No. 21/2001 untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai rakyat inginkan.

Pada masa Reformasi, perekonomian Indonesia berangsur-angsur membaik, harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan pada era Reformasi ini merupakan bentuk perbaikan dalam segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Setidaknya, reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam mengubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya. Pada masa ini Indonesia mulai berorientasi keluar dalam hal menjalin kerja sama dengan dunia luar di bidang ekonomi. Pada kenyataannya, apabila Indonesia menerapkan pembangunan dalam bidang ekonomi yang berorientasi keluar, hal tersebut bisa mengubah tatanan baru dan menciptakan stabilitas perekonomian di Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya stabil dalam aspek-aspek lainnya.

Berikut ini beberapa kebijakan pembangunan yang dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

- a. Kebijakan dalam bidang politik. Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis, yaitu: (1) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, (2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, (3) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
- b. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintahan Presiden B.J.Habibie yang mengawali masa Reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh Presiden Megawati.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, antara lain sebagai berikut.

- a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp116,3 triliun.
- b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan

melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Akan tetapi, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Pada umumnya BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Akan tetapi, wacana untuk berutang lagi pada luar negeri kembali mencuat setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa pada bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pengucuran kredit perbankan ke sektor real sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI) sehingga kinerja sektor real kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, pada satu

sisi, pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tetapi pada pihak lain, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Pada masa Reformasi, proses pembangunan nasional sudah demokratis dan sudah memerankan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan partisipasi rakyat daerahnya. Peluang otonomi daerah telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap proses percepatan pembangunan nasional dan menjamin sistem demokrasi yang merakyat.

BAB 11

ALTERNATIF MODEL PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Secara umum pembangunan adalah proses perubahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia, yang meliputi perbaikan tingkat hidup, kesehatan, pendidikan, serta keadilan. Karena tumpuan dari proses perubahan tersebut adalah bidang ekonomi, definisi dari pembangunan sering terfokus pada definisi pembangunan ekonomi, yaitu: (1) pemenuhan kesejahteraan individu yang sering diukur dalam bentuk pendapatan per kapita, (2) pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum, dan (3) pemenuhan akan adanya harga diri (*self-esteem* dan *self-respect*).

Pembahasan tentang pembangunan merupakan pembicaraan tentang usaha mengubah keadaan masyarakat atau proses untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang menuntut kita pada persoalan menciptakan keadaan yang lebih baik karena pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, melalui akselerasi, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Konsep pembangunan pada mulanya dan pada dasarnya diacukan pada pengertian pembangunan. Secara garis besar, usaha

pembangunan mengandung beberapa peringkat pengambilan keputusan, yaitu penentuan tujuan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam setiap peringkat pengambilan keputusan tersebut terdapat keterlibatan faktor-faktor sosio kultural. Sekalipun demikian, sampai kini masih banyak sarjana sosial di Indonesia yang kurang memahami secara nyata hal yang dimaksud dengan faktor-faktor sosio kultural dalam pembangunan meskipun hal ini telah banyak dibicarakan dalam buku dan disinggung oleh para ahli Indonesia dalam berbagai forum (Amri Marjali, 2009: 55-56).

Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembangunan mencakup beberapa proses, mencakup modernisasi, industrialisasi, pertumbuhan ekonomi (yang lebih menilai manusia sebagai objek dan alat produksi), kemudian hanya pada penampakan material yang lebih menganggap manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

B. Berbagai Alternatif Model Pembangunan

Aplikasi model pembangunan yang digunakan sering menghasilkan program pembangunan yang tidak hanya mengabaikan, tetapi juga menurunkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui inisiatif lokal dan membuat mereka menjadi sangat bergantung pada birokrasi-birokrasi terpusat yang memiliki kemampuan absorpsi sumber daya yang sangat besar, tetapi sebaliknya kurang memiliki kepekaan untuk menanggapi kebutuhan lokal. Beberapa alternatif model pembangunan adalah sebagai berikut.

1. Model Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat

Model pembangunan yang berpusat pada rakyat disebut juga dengan pembangunan model partisipatif, yaitu pandangan yang melibatkan peran serta masyarakat sipil, yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Paradigma pembangunan ekonomi yang telah lama mendominasi model pembangunan di berbagai negara termasuk Indonesia tampaknya perlu diimbangi dengan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), dan harus diintegrasikan dengan paradigma sosial budaya sebagai keseluruhan proses pembangunan masyarakat.

Model partisipatif merupakan alternatif baru untuk meningkatkan produktivitas dan distribusi pembangunan bagi masyarakat.

Pendekatan ini berasumsi bahwa paradigma pembangunan memandang posisi masyarakat sebagai individu, kelompok, dan komunitasnya dalam konteks sosial budaya yang perlu dihargai, dilindungi, dan dikembangkan eksistensinya. Pada konteks ini masyarakat dipandang sebagai entitas penting dalam dimensi pembangunan sosial. Dari sini kemudian pengakuan, penguatan, dan pemberdayaan potensi rakyat, baik identitas (simbol dan nilai) sosial budaya maupun harkat dan martabatnya dapat dilakukan.

Model pendekatan yang berpusat pada rakyat berasumsi bahwa masyarakat dapat menggugat struktur dan situasi keterpurukan secara bertahap. Bersamaan dengan itu, masyarakat melakukan konstruksi ulang bangunan sosial budayanya yang barbau hegemoni. Korten dan Carner (1993) menyatakan bahwa konsep pembangunan ini menekankan pada upaya penciptaan dan pemberdayaan proses inisiatif dan kreativitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan melihat ukuran kesejahteraan materiil dan spiritual sebagai tujuan akhir pembangunan. Lebih jauh Korten dan Carner mengungkapkan pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagai berikut.

- a. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha swadaya kaum miskin untuk menangani kebutuhan mereka sendiri.
- b. Kesadaran bahwa meskipun sektor modern merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi yang konvensional, sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga masyarakat miskin.
- c. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin, demi pengelolaan yang produktif dan swadaya, berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Dalam pendekatan ini Korten dan Carner secara tegas menyoroti perlunya pengakuan dan dukungan usaha mandiri (swadaya), nilai-nilai tradisional, dan sumber daya lokal dari masyarakat dalam strategi pembangunan. Pengakuan dan dukungan ketiga komponen tersebut memberi andil bagi tercapainya tujuan pembangunan yang

sesungguhnya. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang dimaksud dapat dilakukan bersama oleh pemerintah organisasi sosial dan masyarakat sebagai *input* dan masukan reformulasi pembangunan, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dirinya melalui potensi internal yang dimiliki sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Lebih lanjut, Korten menyatakan tiga dasar untuk perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

- a. memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas;
- b. mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah sistem swaorganisasi;
- c. mengembangkan sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial berlandaskan kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Sebagai model yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, seluruh upaya penyuluhan pembangunan diarahkan pada usaha persuasi, edukasi, dan konseling untuk menggali potensi diri dan lingkungannya (komunitasnya). Dengan paradigma ini individu dan komunitasnya ditempatkan sebagai pelaku sekaligus sasaran dari proses mencari solusi dalam meraih hasil pembangunan. Proses ini memberikan kuasa kepada masyarakat untuk menemukan kemandirian dan mengatasi permasalahan yang muncul sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan indeks pembangunan manusia (IPM).

2. Model Pembangunan yang Relevan

Jact Rothman menyusun dan merumuskan tiga model pembangunan yang relevan dalam praktik pembangunan kepada masyarakat.

Pertama, model pengembangan lokal (*locality development model*). Model ini berasumsi bahwa perubahan dalam masyarakat

dapat dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal dimulai dengan pengembangan potensi dan aset lokal (nilai sosial-budaya). Model ini berupaya menumbuhkan motivasi, perencanaan, dan tindakan tepat dari partisipasi aktif warga setempat dalam mencapai tujuan pembangunan. Model ini sebagai upaya pemecahan dan pengembangan partisipasi pada tingkat bawah (*grassroots*), dan solusi untuk menghindari distorsi kepentingan atau hilangnya identitas lokal. Hal ini ditempuh melalui diskusi, musyawarah, komunikasi, dan lokakarya yang melibatkan kelembagaan organisasi dalam masyarakat dengan prinsip swadaya atau kerja sama yang bertujuan membuka orientasi pengetahuan, keterampilan, dan ilmu lainnya.

Kedua, model perencanaan sosial (*sosial planning model*). Model ini berawal dari asumsi bahwa perubahan memerlukan analisis teknis dan rasional, pencapaian tujuan yang baik perlu didukung oleh perencanaan yang baik pula. Model ini berupaya menanggulangi secara tepat kompleksitas permasalahan yang ada dalam masyarakat sehingga model ini dianggap sebagai strategi pemecahan masalah (*problem solving*) dengan tindakan yang terarah. Oleh karena itu, model ini mempunyai tujuan strategis, yaitu merencanakan, menyusun, menciptakan, melayani, mengerjakan permasalahan masyarakat dalam menemukan solusi dalam berbagai program kegiatan, seperti kampanye anti-narkoba, pemasaran sosial, anti-korupsi, dan lain-lain.

Ketiga, model aksi sosial (*sosial activity model*). Strategi dasar model ini menganggap masyarakat terdiri atas kelompok dan golongan atau organisasi yang didasarkan pada etnis, suku, profesi, keterampilan, dan keahlian. Model ini memperlakukan kelompok-kelompok tersebut sebagai sesuatu yang inheren dalam masyarakat sehingga perlu diakui statusnya. Model ini bertujuan mengadakan perubahan mendasar secara kelembagaan dan kebiasaan yang tidak bermanfaat. Dengan pendekatan yang terorganisasi, model ini melakukan tindakan-tindakan konstruktif, terarah, dan terencana untuk menyerap dan mengartikulasi kepentingan masyarakat.

Secara umum, ketiga model pembangunan tersebut menegaskan bahwa prinsip pembangunan yang menggunakan teknik partisipatif, rakyat menjadi pelaku (subjek) utama dalam mengelola, menguatkan, dan memberdayakan kapasitas mereka. Dengan demikian, ketiga model ini disepakati sebagai jalan keluar dalam menanggulangi isu-

isu pembangunan, seperti pendidikan keterampilan dalam arti luas, pertanian, kesehatan, sanitasi, sarana dan prasarana, serta lingkungan hidup (Deddy Mulyana, 2007: 108).

Berikut ini dijelaskan tiga model pembangunan yang relevan untuk membandingkan beberapa model pembangunan yang telah, sedang, atau akan dilakukan. Dengan demikian, kita mampu melihat, menganalisis, dan memilih strategi pendekatan yang tepat dan relevan. Model pembangunan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Model pembangunan dengan indikator pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Model yang diterapkan negara dunia ketiga, termasuk Indonesia telah memperlihatkan kuatnya model pembangunan masyarakat hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi.
- b. Model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan (*basic needs*) lahir dari prakarsa Gunnar Myrdal. Model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misalnya, dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi.
- c. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Fokus sentral pembangunan adalah penguatan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan, persamaan, dan *sustainability*. Model ini berwawasan lebih jauh dari sekadar angka pertumbuhan ekonomi (GNP) atau pengadaan pelayanan sosial (Deddy Mulyana, 2007: 109).

Profesor Mubyarto dan Profesor Bromley membahas gagasan baru dalam pembangunan, yaitu tentang pentingnya peran kelembagaan dalam pembangunan, yaitu tentang pentingnya peran kelembagaan dalam pembangunan. Selama aspek kelembagaan belum diperhatikan dengan baik, sulit untuk merumuskan dan melaksanakan aktivitas pembangunan yang mendukung terwujudnya pemerataan sosial, pengurangan kemiskinan, dan usaha-usaha peningkatan kualitas hidup lainnya. Aspek kelembagaan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Inovasi dalam

kebijakan publik semacam ini akan senantiasa memberikan perhatian terhadap tiga hal penting, yaitu etika, hukum, dan ilmu ekonomi.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang diatur dan dikendalikan secara terpusat merupakan serangkaian kegiatan pembangunan di daerah, bukan pembangunan daerah. Dalam hal ini daerah hanya mendapat alokasi dana untuk menjalankan program nasional yang ada di daerah tersebut. Proses seperti itu sering tidak didasarkan pada aspirasi penduduk daerah setempat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat banyak pada urutan pertama. Menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan diimplementasikan melalui pembangunan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Masriah dan Mujahid, 2011: 76).

C. Mencari Suatu Ideal Model Pembangunan

Apa yang diperlukan untuk memahami model pembangunan adalah kombinasi antara analisis linguistik dan analisis sosiologis. Mungkin juga yang diperlukan adalah kombinasi antara keterampilan logika Wittgenstein dan kemampuan sosiologi Weber.

Ada tiga macam arti fundamental yang berbeda, yang lekat pada istilah model. *Pertama*, kata “model” digunakan sebagai pengganti kata “tahap” atau merupakan pernyataan epistemologis tentang cara terbagi-baginya dunia. *Kedua*, model digunakan sebagai pengganti kata “strategi”. Hal ini menyangkut pragmatika perubahan sosial, atau cara-cara untuk membagi-bagi dunia. *Ketiga*, model sering digunakan untuk mengganti kata “teori”, bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan perubahan-perubahan (Beiling dan Totten, 1980: 67-69).

Model sebagai Strategi: Konsep Produksi Konsumen

Wilayah umum kedua untuk penggunaan model dalam eskalasi pembangunan adalah sebagai pengganti strategi atau cara membuat rancangan mengenai masa depan. Pada tahap ini tipe tenaga kerja yang diperlukan lebih sering mencakup para perencana, insinyur, serta ahli teknik, dan tidak mencakup ahli-ahli sosial.

Pada tingkat ini konsep tentang model berkaitan dengan indikator atau seperangkat indikator, yang dianggap menyediakan landasan untuk pembangunan pesat. Untuk itu, kita boleh mencari bantuan pada model Rostow dengan indikator utama produksi barang konsumsi, terutama produksi barang otomotif dan model Prebisch dengan indikator utama produksi industri nasional.

Menurut Rostow, implikasi yang terkandung dalam penggunaan model sebagai strategi pembangunan adalah sesuatu yang ternyata baik bagi Amerika Serikat, bisa ditiru serta diasimilasikan di mana saja, di dunia. Demikian pula, model Prebisch yang mengasumsikan bahwa sesuatu yang ternyata baik untuk Eropa Barat akan terbukti kebajikannya bagi negara-negara yang kurang berkembang. Tiada bukti yang dapat memperkuat masing-masing asumsi ini. Sesungguhnya model-model ini sering dicoba, tetapi jarang sekali yang berhasil. Hal ini sesungguhnya harus menimbulkan pertanyaan apakah model “perencanaan” perubahan kurang stereotipe daripada tahap-tahap perubahan yang didasarkan pada asumsi bagaimana dunia ini terbagi-bagi secara alamiah? Dalam kasus Rostow, penggunaan indikator konsumsi, seperti juga produksi barang otomotif, menimbulkan dilema (yaitu, paling tidak untuk bangsa-bangsa Amerika Latin) bahwa mungkin terjadi produksi otomotif tingkat tinggi, tetapi bangsa tersebut tetap berada dalam cengkeraman keadaan kurang berkembang. Hal ini masih bisa dilanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa tekanan yang diberikan secara berlebihan pada orientasi konsumtif dapat merangsang krisis yang semakin parah dalam ekonomi suatu negara dan menghambat pembangunan (Beiling dan Totten, 1980: 75-78).

D. Pembangunan Politik: Masyarakat dan Pemerintah

1. Pembangunan Politik Masyarakat

Dari uraian tentang kebudayaan politik Indonesia terlihat adanya keragaman kultural, yang jika tidak ditangani dengan baik, hal ini akan menjadi faktor yang bersifat disintegratif. Oleh karena itu, masalah integrasi pun merupakan tantangan yang tersendiri bagi sistem politik Indonesia.

Masyarakat negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, umumnya menghadapi masalah loyalitas. Dari loyalitas

yang lebar dan sempit ke arah loyalitas nasional. Seandainya pembangunan loyalitas masyarakat ini diarahkan melalui mobilisasi (yang didorong oleh pemerintah), hasilnya seperti terlihat dalam periode sistem politik Demokrasi Terpimpin, yaitu terjurus ke arah sistem totaliter. Timbullah dua pilihan, apakah pembangunan masyarakat akan dijalankan secara mobilisasi atau melalui partisipasi, ataukah melalui jalan tengah antara keduanya? (Rusadi Kantaprawira, 1988: 175).

2. Pembangunan Politik Pemerintahan

Dari uraian tentang struktur politik dapat dipahami bahwa eksekutif memegang peranan penting dalam mengarahkan dan membawa masyarakat secara keseluruhan ke arah tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud akan diwujudkan melalui serangkaian kebijaksanaan. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pencapaian tujuan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dalam keadaan tidak ada kestabilan pemerintahan/politik, eksekutif mungkin bersifat kompromistik dalam mengambil keputusan atau tidak bisa bertindak tegas karena lebih memerhatikan kelangsungan jabatannya daripada bertindak tegas, dengan akibat segala programnya akan menjadi buyar di tengah jalan. Ketenangan dan kesungguhan kerja sukar diwujudkan dalam keadaan yang instabil.

Selanjutnya, ditinjau dari segi karya riil yang dihasilkan pemerintah, kestabilan politik mempunyai kualitas yang berlainan. Akan tetapi, adanya stabilitas yang bagaimanapun (semu atau real), dirasakan lebih baik daripada sirnanya sama sekali stabilitas itu.

Pembangunan dalam semua sektor hanya mungkin berjalan lancar apabila stabilitas menjadi syarat mutlaknya (*conditio sine qua non*) (Rusadi Kantaprawira, 1988: 180-181).

E. Model Pembangunan Spontan

Pembangunan spontan yang dilaksanakan pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 berdasarkan doktrin *laissez faire*. Menurut doktrin tersebut, sistem ekonomi diatur oleh tata aturan alamiah dan dengan sendirinya akan berfungsi bagi keuntungan

masyarakat apabila tidak dihambat oleh campur tangan yang sifatnya artifisial, termasuk campur tangan pemerintah.

Satu-satunya negara yang mempunyai ekonomi yang berencana adalah Uni Soviet. Dalam pendekatan *laissez faire*, mekanisme pasar dan konsep pembangunan spontan ditolak sebab menurut ajaran Marxis, doktrin tersebut hanya merupakan alat bagi kelompok (minoritas) orang-orang untuk mengeksploitasi golongan masyarakat (mayoritas) (Syarif Muhidin, 1987: 76).

Menurut Peter Berger, ada dua model pembangunan yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas hidup orang “dunia ketiga”. Model tersebut adalah kapitalisme dan sosialisme, yang sama-sama tidak berasal dari dunia ketiga sendiri, tetapi digunakan di dunia ketiga. Di sini tiap-tiap model pembangunan dilandaskan pada mitos tertentu tentang masyarakat masa depan yang lebih baik dan usaha yang perlu dilakukan untuk mencapainya.

1. Model Kapitalisme

Model kapitalisme lebih dilandaskan pada ide pertumbuhan, khususnya ekonomi. Anggapannya pertumbuhan yang tinggi menjamin pencapaian masyarakat yang lebih baik pada kemudian hari, dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, persaingan pun ditekankan. Hasil yang ada memang tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kebebasan dalam masyarakat, tetapi ketimpangan dalam masyarakat pun dapat terjadi. Mereka yang kuat posisinya dalam usaha pertumbuhan lebih mampu menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang berkedudukan lemah kurang berkesempatan meningkatkan kualitas kehidupannya.

2. Model Sosialisme

Model sosialisme lebih memusatkan perhatian pada kekuatan politik sebagai saran pencapaian masyarakat yang lebih baik pada masa depan, yaitu masyarakat yang egaliter. Secara umum, model sosialisme beranggapan bahwa pencapaian masyarakat tidak bisa tercapai karena masyarakat dunia ketiga selama ini dieksploitasi oleh masyarakat industri maju. Hubungan di antara keduanya lebih menguntungkan pihak kedua (elite ekonomi) daripada pihak pertama. Sosialisme menekankan bahwa pemerataan harus dilaksanakan

terlebih dahulu, yaitu prasyarat pembangunan masyarakat egaliter, masyarakat yang manusiawi.

Menurut Berger, pembangunan mau tidak mau pasti membawa korban (pengorbanan) maka ia tidak menganjurkan model mana yang harus diterapkan di dunia ketiga. Menurutnya, model yang lebih baik adalah model yang sesedikit mungkin menimbulkan korban, khususnya korban manusia.

Ketika berbicara tentang kebijaksanaan pembangunan, secara khusus ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu *calculus of pain* dan *calculus of meaning*. *Calculus of pain* berkaitan dengan penderitaan fisik dan material yang dialami manusia dalam proses pembangunan. Jadi, pembangunan selayaknya meningkatkan kualitas kehidupan fisik manusia. Dalam hubungan ini tidak dapat diterima jika pembangunan hanya meningkatkan kesejahteraan segolongan orang di masyarakat, sementara golongan lain yang besar jumlahnya tetap berada dalam keadaan melarat, bahkan kian melarat dengan dilaksanakannya pembangunan; berbagai barang dan jasa. Dengan kata lain, produksi pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.

Nilai yang kedua, yaitu *calculus of meaning* menyatakan bahwa dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan, makna merupakan hal yang penting artinya dalam kehidupan manusia. Manusia secara individual ataupun kolektif memberikan makna terhadap realitas sosial yang dihadapinya dan berdasarkan makna atau definisi situasi itulah tindakan dilaksanakan.

Selama ini pembangunan sering diidentikkan dengan tren pembangunan kapitalisme liberal. Kapitalisme liberal sering disebut sebagai konsep awal yang mengutamakan pembangunan sebagai sarana *social change* dalam suatu negara.

Konsep pembangunan ala kapitalis liberal sebenarnya tidak hanya diadopsi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara, tetapi telah lama pula diadopsi oleh negara-negara Amerika Latin sejak era Depresi Ekonomi melanda Amerika dan Eropa tahun 1930. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Chile ketika berambisi membangun negaranya dengan jalan menjadikan negaranya sebagai negara industri melalui CORFO (1939).

Pada perkembangannya, kebijakan pembangunan ala Keynes yang kapitalis liberal dengan beberapa varian, seperti yang diterapkan oleh Chile memunculkan model kebijakan pembangunan lain yang cenderung berkontradiksi dengan konsep Keynes. Model kebijakan pembangunan itu di antaranya model komunis yang mencapai kejayaannya ketika diterapkan oleh USSR. Pembangunan ala Keynes juga mengundang respons dari beberapa ahli seperti Presbich dan Singer.

F. Model Pembangunan yang Dominan dalam Perspektif Sejarah

1. *Pembangunan yang Terpusat pada Pertumbuhan atau Produksi*

Model pembangunan yang dominan tentang pembangunan di negara-negara berkembang dimulai dari gagasan W.W. Rostow yang sangat dikenal sepanjang tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Menurut Rostow, proses pembangunan dapat dipandang sebagai rangkaian tahap pertumbuhan keluaran produksi berurutan yang dicapai melalui penanaman modal dalam kapasitas produksi yang berteknologi modern. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada pencapaian tingkat penanaman modal yang diperlukan birokrasi pemerintah dalam mengorganisasi masyarakat menjadi satuan-satuan produksi yang efisien dan dikendalikan secara terpusat.

2. *Pembangunan Berwawasan Pemerataan*

Model kedua dari pembangunan berwawasan pemerataan adalah model pembangunan kebutuhan dasar dari *International Labour Organization* (ILO) yang sangat terkenal pada paruh kedua dasawarsa 1970-an dan awal tahun 1980-an, menyusul diselenggarakannya *World Employment Conference* pada tahun 1976. Model kedua ini menekankan kebijaksanaan pemecahan masalah pada pemenuhan kebutuhan paling dasar masyarakat: air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar yang lain. Model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dan tidak hanya mencoba memecahkan masalah kemiskinan melalui mekanisme *tickle-down effect*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dharmawan. 1986. *Aspek-aspek dalam Sosiologi Industri*. Bandung: Binacipta.
- Adrian Leftwich. 2000. *States of Development: on the Primacy of Politics in Development*. Cambridge: Polity Press.
- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Agus Ahmad Safe'i dan Nanih Machendrawaty. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Agus Suryono. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- . 2010. *Dimensi-dimensi Prima Administrasi Pembangunan*. Malang: UB Press Malang.
- Ahmad Baso. 2005. *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*. Bandung: Mizan.
- Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Akhmad Sukardi. 2009. *Participatory Governance*. Yogyakarta: Leksbang PRESSindo Yogyakarta.
- Akhyar Yusuf Lubis. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

- 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme, Hingga Cultural Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Amin Abdullah. 2004. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amri Marjali. 2009. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Ananto Basuki dan Shofyan. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD.
- Ande Gunder Frank. 1969. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York: Modern Reader Paperbacks.
- Ania Loomba. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonialisme (Terj)*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Arbi Sanit. 1981. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Budiman. 1989. *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arturo Escobar. 1995. *Encountering Development*. New Jersey: Princeton University Press.
- Asep Sahid Gatara dan H. Subhan Sofhian. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Askar Jaya. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB.
- Aulia Pohan. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awalil Rizky. 2006. *Agenda Neoliberalisme di Indonesia: Merumuskan Sikap dan Aksi HMI*. Jakarta: PB HMI.
- Awan Mutakin, dkk. 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung: Genesindo.
- B. Yuda dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Bachrawi Sanusi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sugiharto. 2000. *Postmodernisme, Tantangan bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo. 2005 *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Beiling dan Totten. 1980. *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Benedict Anderson. 1999. *Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Blomstrom dan Hettne. 1984. *Development Theory in Transition, the Dependency Debate and Beyond: Third World Response*. London: Routledge.
- Budi Winarno. 2013. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: CAPS.
- Christoper Cahe-Dunn. 1975. *The Effect of International Economic Dependency on Development and Inequality: a Cross-National Study*. American Sociological Review.
- Christopher Norris. 2008. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jaques Derrida*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- C.S.T. Kansil dan Cristine Kansil S.T. 2004. *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Daniel Bell dan Irving Kristol. 1988. *Krisis Teori Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- David Campbell. 2007. *Poststrukturalism, in; Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith (eds.) International Relations Theories*. Oxford: Oxford University Press.
- David C. Korten dan Rudi Klaus. 1984. *People Centered Development*. West Hatford: Kunarian Press.
- Deddy Mulyana. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- D.K. Forbes. 1986. *Geografi Keterbelakangan, Sebuah Survei Kritis*. Jakarta: LP3ES.

- Edi Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Eduard Depari dan Collin Mac Andrews. 1998. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: t.p.
- Eko Budihardjo. 2013. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Erwin Muhammad. 2009. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Refika Aditama.
- F. Budi Hardiman. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fauzi. 2004. *Teori Persepsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Franz Magnis Suseno. 2001. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady Andi Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- George Ritzer dan Douglas. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- George Soros. 2002. *Krisis Kapitalisme Global: Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya*. Yogyakarta: Qalam.
- Gunawan Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan Sumodiningrat dan Rian Nugroho. 2005. *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul dalam Persaingan Global*. (PT Elex Media Komputindo). Jakarta: Gramedia.
- Hira Jhamtani. 2005. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.
- Hutauruk. 1984. *Gelora Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- H.W. Ardnt. 1991. *Pembangunan Ekonomi: Studi tentang Sejarah Pemikiran*. Jakarta: LP3ES.
- I. Wibowo, dkk. 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Ian Roxborough. 1979. *Theories of Underdevelopment*. London: The Macmillan Press.

- Irawan dan M. Suparmoko. 1996. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Irwan Djamal Zoer'aini. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J.E. Goldthrope. 1984. *Sosiologi Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- John Clark. 2000. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja.
- Junaidi Muhammad. 2013. *Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.
- Kate Willies. 2005. *Theories and Practice of Development*. New York: Routledge.
- Leela Gandhi. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Qalam.
- Leo Agustino. 2000. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Bandung: Dialog Press.
- Linda Tuhiwai Smith. 1999. *Decolonizing Methodologies, Research and Indigenous People*. London: Zed Books.
- Louis Irving Horowitz. 1985. *Revolusi Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lubis Ibramim. 1998. *Materi Pokok Pengawasan Pembangunan*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- M. Dawam Rahardjo. 1987. *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- M. Habib Mustopo. 2005. *Sejarah 3*. Jakarta: Yudhistira.
- M. Hutauruk. 1984. *Gelora Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- M. Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- M. Suparmoko. 2000. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- M. Syahri. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Moral*. Bandung: Widya Aksara Press.

- M.L. Jhinghan. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mansour Fakih. 1996. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2003. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- 2009. *Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Jakarta: INSIST Press.
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: t.p.
- Masriah dan Mujahid. 2011. *Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- May Teuku Rudy. 1993. *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: Eresco.
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Poitik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Mochtar Mas'oed. 1989. "Stabilisasi dan Pembangunan Ekonomi yang Berorientasi Keluar" dalam *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- 1994. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 1997. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM.
- Moh. Mahfud M.D. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Mohammad Jafar Hafsah. 2008. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Institute for Religious and Institutional Studies (Iris).
- M.P. Todaro. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

- Mubyarto. 1996. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muljana B.S. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI-Press.
- Mulyadi Subri. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawar Sjadzalli. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Pres.
- Mustopo M. Habib. 2005. *Sejarah 3*. Jakarta: Yudhistira: Jakarta.
- Myron Weiner. 1994. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ngusmanto. 2005. *Bahan Ajar Administrasi Pembangunan Pedesaan Terpadu*. Pontianak: Program Magister Ilmu Sosial Untan.
- Peter L. Berger. 1983. *Piramida Pengorbanan Manusia atau Jawaban di antara Sosialisme dan Kapitalisme*. Bandung: Iqra.
- Ratna Sukmayani. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Ratri Medya dan Wisnu Chandra Kristiaji. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Rita Abrahamsen. 2004. *Sudut Gelap Kemajuan, Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Robert Chambers. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: from Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Rosemarie Putnam Tong. 1998. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jelasutra.
- Rudy Harisyah Alam. 2001. *Perspektif Pasca-Postmodernisme*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rusadi Kantaprawira. 1988. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Offset.
- Rustiadi Ernan. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sadono Sukirno. 2007. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance Edisi II*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjamsiar Sjamsuddin. 2005. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Agritek YPN Malang.
- Sobri. 1987. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFU UII.
- Soedjatmoko. 1988. *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Soegrada Poerbakawatja. 1981. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soemartono Gatot R.M. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemartono Otto. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Solly M. Lubis. 1990. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian. 1979. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi & Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- S.R. Parker. 1990. *Sosiologi Industri*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stephen K. Sanderson. 2003. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Bogor: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB.
- Sutoro Eko. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda*.

- Sutrisno. 2005. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisi.
- Suwarsono Alvin. 2009. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Syarif Muhidin. 1987. *Perencanaan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Theotonio Dos Santos. 1970. *The Structure of Dependence*. *American Economic Review*. Vol 60.
- Thohir A. Kaslan. 1991. *Butir-butir Tata Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Civic Education; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Tjokrowinoto Moeljarto. 1999. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tom Bottomore. 1984. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi Kumorotomo. 1992. *Profil Desa Tertinggal*. Jakarta: Bapenas.
- Widjojo Nitisastro. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*. Jakarta: Kompas.
- Yuda B., dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yusup Priyasudiarja. 2002. *Max Weber Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Surabaya: Pustaka Prometh.
- Zaenal Abidin dkk. 2006. *Ngaji dan Ngejo*. Bandung: Setda Jabar.
- Zaim Saidi. 2008. *Soeharto Menjaring Matahari*. Bandung: Mizan.
- Zulkarimen Nasution. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
- b. bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
- c. bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional;
- e. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian /Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
22. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
23. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- (1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
- (2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memerhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
- (3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 12

- (1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

- (1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 14

- (1) Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

- (1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.
- (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 17

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 18

- (1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

- (1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
- (2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 20

- (1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

- (2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja- SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.
- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.
- (3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.
- (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.

Pasal 23

- (1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.
- (2) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Pasal 24

- (1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

- (1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 26

- (1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.
- (3) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Nasional tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal

5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menurut Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Undang-undang ini.

Pasal 36

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 37

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal 5 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 5 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 104

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Adon Nasrullah Jamaludin. Ia lahir di Bekasi pada tanggal 27 Maret 1972.

Pendidikan dasar hingga SLTP penulis habiskan di Kota Bekasi, di antaranya di SDN Pulopanjang di Sukatani-Bekasi (lulus pada tahun 1985), Madrasah Tsanawiyah di Sukatani-Bekasi (lulus pada tahun 1988), selanjutnya PGAN Cilamaya-Karawang (lulus pada tahun 1991). Setelah itu, melanjutkan S1 di Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung (lulus pada tahun 1996) dan S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus pada tahun 2003). Pada tahun 2011 ia melanjutkan pendidikan ke jenjang S3, Program Doktor (lulus pada tahun 2013).



Sejak tahun 1997, penulis diangkat menjadi dosen tetap di Jurusan Sosiologi Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung. Sejak tahun 2012 hingga sekarang ia menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selama menjadi dosen, ia telah menduduki beberapa jabatan di fakultas, di antaranya Sekretaris Jurusan Da'wah tahun 1997, Sekretaris Jurusan Sosiologi selama dua periode (1998-2006), Ketua Laboratorium (2007-2009),

Ketua Jurusan Sosiologi (2009-2012), Ketua Jurusan Perbandingan Agama (2012-2013), dan Ketua Laboratorium di Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Karya ilmiah yang pernah ditulisnya dalam berbentuk buku dasar, di antaranya *Metode Penulisan Skripsi untuk Mahasiswa* (2010), *Sejarah Program Studi Sosiologi Fak. Ushuluddin* (2009), *Sosiologi Agama* (2011), *Metode Penelitian Kualitatif* (2013), dan *Sosiologi Perkotaan* (2014). Adapun karya lainnya, seperti *Nafas Islam Jilid 1 dan 2* (2009), *Untaian Hikmah di Malam Ramadhan* (2008), serta *Kisah dan Hikmah: Kumpulan Kisah Teladan Kehidupan Anak Zaman* (2010).